



**LAPORAN
AKUNTABILITAS
KINERJA
INSTANSI
PEMERINTAH
(L A K j I P)
TAHUN 2017**

**DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT,
DAN DESA KABUPATEN SUMENEP
2018**

KATA PENGANTAR

Perkembangan yang sangat cepat dalam era informasi akhir-akhir ini, berakibat kepada meningkatnya kebutuhan dan tuntutan masyarakat akan pelayanan yang lebih baik dan memuaskan yang harus dilayani oleh instansi pemerintah, tak terkecuali oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumenep. Untuk itu, agar tetap eksis dan mampu menjawab tantangan pelayanan serta meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, maka Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumenep secara terus menerus melakukan perubahan ke arah perbaikan. Perubahan tersebut disusun dalam suatu tahapan yang konsisten dan berkelanjutan.

Dengan adanya perencanaan strategik memungkinkan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumenep berkomitmen pada aktivitas dan kegiatan di masa mendatang. Perencanaan strategik merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu tertentu dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada maupun yang mungkin dapat timbul. Rencana Strategik Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumenep mengandung Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Kebijakan dan Program yang realistis dengan mengantisipasi perkembangan masa depan.

Sebagai tonggak awal dari siklus Implementasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), proses perencanaan strategik merupakan tahapan penting yang harus dilalui oleh instansi pemerintah. Rencana strategik disusun dengan memperhatikan **stakeholders** (pihak-pihak yang berkepentingan) dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumenep dan melibatkan pula partisipasi dari pegawai dan pejabat, sehingga makna partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas yang menjadi pilar **good governance** diharapkan dapat tercermin dalam rencana strategik ini.

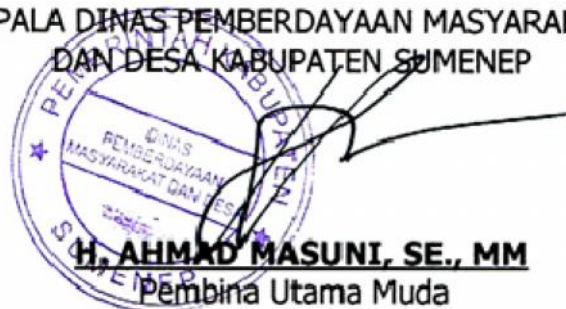
Berdasarkan PerMenPan Nomor : 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah berkewajiban untuk menyusun dan menyampaikan laporan Akuntabilitas Kinerja untuk mengetahui tingkat keberhasilan, visi, misi dalam mewujudkan tujuan. Sehubungan dengan hal tersebut, kami berusaha untuk memenuhi apa yang menjadi kewajiban dimaksud, yang telah merujuk pada ketentuan yang ada.

Laporan kinerja ini berisi Rencana Strategik (RS) tahun 2016 – 2020, Penetapan Kinerja Tahun 2017 yang memuat semua kegiatan yang ada pada DPA pada tahun 2017, Pengukuran Kinerja (PK), Penetapan Perjanjian Kinerja, yang dilengkapi dengan hasil analisis serta mengungkapkan pula keberhasilan, kegagalan, hambatan dan kendala dan langkah-langkah antisipasi.

Kami menyadari bahwa LAKIP ini belum sempurna seperti yang diharapkan, maka kami mengharapkan sumbang saran yang bersifat perbaikan. Demikian Laporan Kinerja ini kami sampaikan sebagai bahan evaluasi, guna meningkatkan kinerja pada tahun mendatang.

Sumenep, Januari 2018

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT,
DAN DESA KABUPATEN SUMENEP



H. AHMAD MASUNI, SE., MM

Pembina Utama Muda

NIP. 19631027 198903 1 006

DAFTAR ISI

	Hal
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
IKHTISAR EKSEKUTIF	v
I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Kedudukan	2
C. Tugas Pokok dan Fungsi	2
D. Struktur Organisasi	3
E. Standar Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Aparatur	4
II. PERENCANAAN KINERJA	16
A. Faktor-faktor Penentu Keberhasilan (Critical Succes Factors / CSF)	16
B. Nilai-nilai Luhur Organisasi	17
C. Pernyataan Visi	18
D. Pernyataan Misi	18
E. Tujuan dan Sasaran	19
F. Strategi (Cara mencapai sasaran)	22
G. Perencanaan dan Perjanjian Kinerja	25
H. Rencana Anggaran Tahun 2017	26
III. AKUNTABILITAS KINERJA	30
A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI	31
a. Perbandingan antara Target Tahun 2017 dan realisasi Kinerja Tahun 2017	31
b. Perbandingan antara Relalisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun ini dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir	33
c. Perbandingan antara Target Akhir Renstra dengan Realisasi 2017	34
d. Analisis Penyebab Keberhasilan /Kegagalan atau Peningkatan / Penurunan Kinerja serta Alternative Solusi Tahun 2017	35
e. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	54
f. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan atau Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja	56
B. REALISASI ANGGARAN	82
IV. PENUTUP	88

IKHTISAR EKSEKUTIF

Pada dasarnya Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAKIP) merupakan laporan yang memberikan penjelasan mengenai pencapaian kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumenep selama Tahun 2017. Capaian kinerja (performance results) Tahun 2017 tersebut dibandingkan dengan Penetapan Kinerja (performance agreement) Tahun 2017 sebagai tolok ukur keberhasilan Tahunan organisasi. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasinya sejumlah celah kinerja (performance gap) bagi perbaikan kinerja di masa datang. Sistematika penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumenep Tahun 2017 berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri PAN RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan PermenPAN RB nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran dan kegiatan. Pengukuran dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran digunakan untuk menunjukkan secara langsung kaitan antara sasaran dengan indikator kinerjanya, sehingga keberhasilan sasaran berdasarkan rencana kinerja tahunan yang ditetapkan dapat dilihat dengan jelas. Selain itu, untuk memberikan penilaian yang lebih independen melalui indikator-indikator outcome atau minimal output dari kegiatan yang terkait langsung dengan sasaran yang diinginkan.

Berdasarkan Evaluasi Kinerja dan Analisis pencapaian kinerja atas kegiatan yang dilaksanakan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Bupati Sumenep, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumenep, untuk Tahun 2017 ini dapat dikatakan kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumenep telah dilaksanakan dengan hasil capaian yang cukup berhasil dengan total capaian kinerja sasaran sebesar 62,55 %.

Namun demikian, keberhasilan yang dicapai Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumenep tidak terlepas dari hambatan-hambatan

yang dijumpai, baik bersifat internal maupun eksternal. Kondisi ini diantisipasi dengan cara melakukan evaluasi secara berkala atas kendala / hambatan yang dijumpai, sehingga diketahui penyebab timbulnya hambatan-hambatan dalam pencapaian kinerja. Menyadari hal tersebut, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumenep telah mempersiapkan strategi dan cara pemecahannya, sehingga pada tahun mendatang hambatan-hambatan tersebut dapat diminimalisir.

Adapun kendala-kendala yang mungkin dihadapi dalam tercapainya tujuan dan sasaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumenep adalah masih Kurangnya staf pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumenep yang menangani pengelola kegiatan yang mendukung dalam kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumenep, untuk itu perlu ditingkatkannya pengelolaan sumber daya aparatur, keuangan serta sarana dan prasarana demi tercapainya tujuan dan sasaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumenep.

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, keterpaduan pola perencanaan pembangunan daerah menjadi poin yang penting dalam siklus penyelenggaraan pemerintahan. Untuk itu diperlukan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance) yaitu penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien, partisipatif, transparan dan akuntabel.

Kepemerintahan yang akuntabel merupakan sebuah keharusan yang perlu dilaksanakan dalam usaha mewujudkan visi misi pembangunan daerah dan aspirasi serta cita-cita masyarakat dalam mencapai masa depan yang lebih baik. Berkaitan dengan hal itu, diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan terukur, sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna dan berhasil guna.

Salah satu azas penyelenggaraan good governance yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 adalah azas akuntabilitas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Akuntabilitas tersebut salah satunya diwujudkan dalam bentuk penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP).

Pertanggungjawaban dimaksud disampaikan kepada atasan masing-masing, kepada lembaga-lembaga pengawasan dan penilai akuntabilitas yang berkewenangan, dan akhirnya kepada Presiden selaku Kepala Pemerintahan serta

dilakukan melalui sistem akuntabilitas dan media pertanggungjawaban yang harus dilaksanakan secara periodik dan melembaga.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) adalah suatu laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggungjawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/ sasaran strategis instansi. Laporan yang dibuat secara sistematis ini berisi tentang pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama organisasi, penjelasan yang memadai atas pencapaian kinerja dan adanya perbandingan capaian indikator kinerja sampai dengan tahun berjalan dengan target kinerja 5 (lima) tahunan yang direncanakan. LKIP tersebut juga merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

B. KEDUDUKAN

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep nomor 09 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Sumenep Nomor : 58 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Struktur Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Sumenep, maka kedudukan dari pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah sebagai berikut :

1. Dinas merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa; dan
2. Dinas dipimpin oleh kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten

C. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Berdasarkan Peraturan Bupati Sumenep Nomor : 58 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Struktur Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Sumenep mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyelenggaraan urusan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;

Sedangkan fungsinya adalah :

1. Penyusunan dan pengoordinasian program kerja pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat dan desa;
2. Pengumpulan bahan dalam rangka penyusunan program dan perumusan kebijakan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
3. Perumusan dan persiapan petunjuk teknis dalam rangka pelaksanaan bimbingan dan pembinaan serta memfasilitasi bidang pemberdayaan dan pengembangan usaha ekonomi masyarakat ;
4. Pengoordinasian dengan perangkat daerah terkait dalam rangka penyusunan program bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
5. Pelaksanaan evaluasi dan partisipasi program pemberdayaan masyarakat dan desa;
6. Pelaksanaan pembinaan dan bimbingan teknis bersama instansi terkait dalam rangka pembinaan pemberdayaan masyarakat dan desa; dan
7. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

D. STRUKTUR ORGANISASI

Struktur Organisasi terdiri atas Susunan organisasi Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Peraturan Bupati Sumenep Nomor : 58 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Struktur Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Sumenep mempunyai, terdiri atas :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, membawahi :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Program dan Perencanaan; dan
 3. Sub Bagian Keuangan.
- c. Bidang Pengembangan Masyarakat, membawahi :
 1. Seksi Pembinaan Kelembagaan; dan
 2. Seksi Pengembangan Kapasitas.
- d. Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat, membawahi :

1. Seksi Pengembangan Usaha Ekonomi; dan
 2. Seksi Fasilitasi dan Partisipasi Masyarakat Desa.
- e. Bidang Pendayagunaan Teknologi Tepat Guna, membawahi :
1. Seksi Pemasyarakatan dan Pengembangan Teknologi Tepat Guna; dan
 2. Seksi Penerapan Teknologi Tepat Guna.
- f. Bidang Pemerintahan Desa, membawahi :
1. Seksi Perangkat Desa;
 2. Seksi Administrasi Pemerintahan Desa; dan
 3. Seksi Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Desa.
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

E. STANDAR PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI APARATUR :

1. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Tugas : membantu Bupati dalam penyelenggaraan urusan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;

Fungsi :

- a. Penyusunan dan pengoordinasian program kerja pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat dan desa;
- b. Pengumpulan bahan dalam rangka penyusunan program dan perumusan kebijakan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
- c. Perumusan dan persiapan petunjuk teknis dalam rangka pelaksanaan bimbingan dan pembinaan serta memfasilitasi bidang pemberdayaan dan pengembangan usaha ekonomi masyarakat ;
- d. Pengoordinasian dengan perangkat daerah terkait dalam rangka penyusunan program bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
- e. Pelaksanaan evaluasi dan partisipasi program pemberdayaan masyarakat dan desa;
- f. Pelaksanaan pembinaan dan bimbingan teknis bersama instansi terkait dalam rangka pembinaan pemberdayaan masyarakat dan desa; dan
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

2. Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Tugas : menyelenggarakan urusan umum, perlengkapan, kepegawaian, program, perencanaan dan keuangan;

Fungsi :

- a. Penyusunan dan pengoordinasian program kerja pelaksanaan tugas sekretariat;
- b. Penyelenggaraan administrasi surat menyurat, kearsipan serta pembinaan ketatalaksanaan;
- c. Pengolahan, menganalisa dan memformulasikan rencana kebutuhan perlengkapan dan peralatan serta pelaksanaan keamanan dan kebersihan kantor, serta proses kedudukan hukum kegiatan;
- d. Penyelenggaraan tata usaha kepegawaian yang meliputi pengembangan, peningkatan karier pegawai, kesejahteraan dan pemberhentian pegawai dinas;
- e. Penyelenggaraan penyusunan rencana anggaran, pengelolaan keuangan serta pertanggungjawaban pelaksanaannya; dan
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Membawahi :

1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Tugas :

- a. Menyusun program kerja pelaksanaan tugas umum dan kepegawaian;
- b. Melaksanakan urusan surat menyurat, pengetikan, penggandaan, pendistribusian dan tata kearsipan;
- c. Memelihara peralatan, perlengkapan, keamanan dan kebersihan kantor serta melaksanakan kegiatan keprotokolan dan menyiapkan administrasi perjalanan dinas;
- d. Menyiapkan, menyusun dan melaksanakan tata usaha kepegawaian yang meliputi pengembangan, peningkatan karier pegawai, kesejahteraan dan pemberhentian pegawai dinas;
- e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

2) Sub Bagian Program dan Perencanaan**Tugas :**

- a. Menyusun program kerja pelaksanaan tugas program dan perencanaan;
- b. Mengumpulkan dan menyiapkan bahan penyusunan program dan perencanaan;
- c. Menyiapkan bahan untuk analisis dan evaluasi penyusunan laporan pelaksanaan program dan perencanaan;
- d. Menghimpun dan memproses kedudukan hukum program dan kegiatan;
- e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

3) Sub Bagian Keuangan**Tugas :**

- a. Menyusun program kerja pelaksanaan tugas keuangan;
- b. Menghimpun data dan menyusun rencana anggaran, serta melaksanakan tata usaha keuangan;
- c. Menyusun laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan dan meneliti serta mengoreksi kebenaran dokumen keuangan;
- d. Memelihara dan mengamankan dokumen administrasi keuangan;
- e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

3. Bidang Pengembangan Masyarakat**Tugas :**

Melaksanakan pengoordinasian dan fasilitasi pelaksanaan kebijakan dibidang pembinaan kelembagaan dan pengembangan kapasitas masyarakat;

Fungsi:

- a. Penetapan pedoman, norma, standart, prosedur dan kriteria dibidang penguatan kelembagaan dan pengembangan kapasitas masyarakat;
- b. Pemantapan data profil desa dan kelurahan;
- c. Penguatan kelembagaan masyarakat;
- d. Pelatihan masyarakat desa;

- e. Peningkatan peran serta masyarakat dalam penataan dan pendayagunaan ruang kawasan pedesaan;
- f. Peningkatan pemberdayaan kelembagaan pedesaan dalam pembangunan; dan
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

1) Seksi Pembinaan Kelembagaan

Tugas:

- a. Menyusun program kerja pelaksanaan tugas pembinaan kelembagaan desa;
- b. Menyiapkan bahan untuk bimbingan, pengontrolan dan pengolahan data profil desa dan kelurahan;
- c. Melaksanakan pembentukan dan tatakelola lembaga kemasyarakatan desa dan kelurahan;
- d. Mengumpulkan bahan dan menganalisis data penyusunan rencana dan program pembinaan kelembagaan masyarakat desa;
- e. Menyiapkan bahan pembinaan dan bimbingan teknis dalam penguatan lembaga kemasyarakatan desa dan kelurahan;
- f. Peningkatan pemberdayaan kelembagaan perempuan pedesaan dalam pembangunan dan pendayagunaan lembaga kemasyarakatan desa dan kelurahan;
- g. Melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap lembaga kemasyarakatan desa dan kelurahan; dan
- h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

2) Seksi Pengembangan Kapasitas,

Tugas :

- a. Menyusun program kerja pelaksanaan tugas pengembangan kapasitas;
- b. Mengumpulkan bahan dalam rangka penyusunan pedoman dan standarisasi, rencana, program pembinaan dan pengembangan kapasitas masyarakat;
- c. Melaksanakan pembinaan dan bimbingan dalam rangka peningkatan kualitas masyarakat desa;

- d. Melaksanakan koordinasi dalam rangka menyusun konsep pedoman dan petunjuk teknis, serta fasilitas terhadap pengembangan kapasitas masyarakat desa; dan
- e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

4. Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat

Tugas :

Melaksanakan urusan Pemberdayaan dan pengembangan usaha ekonomi masyarakat, fasilitasi pembangunan desa serta partisipasi dan keswadayaan masyarakat;

Fungsi:

- a. Menyusun rencana kegiatan bidang pemberdayaan dan pengembangan usaha ekonomi masyarakat berdasarkan kebijakan di bidang pemberdayaan dan pengembangan usaha ekonomi masyarakat;
- b. Menyusun rencana program pelaksanaan pengembangan usaha ekonomi masyarakat, fasilitasi pembangunan desa, partisipasi dan keswadayaan masyarakat;
- c. Menyusun rencana pelaksanaan pembinaan pengembangan usaha ekonomi masyarakat, fasilitasi pembangunan desa, partisipasi dan keswadayaan masyarakat;
- d. Perumusan rencana monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengembangan usaha ekonomi masyarakat, fasilitasi pembangunan desa, partisipasi dan keswadayaan masyarakat;
- e. Penganalisaan data dalam rangka penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan pengembangan usaha ekonomi masyarakat, fasilitasi pembangunan desa, partisipasi dan keswadayaan masyarakat; dan
- f. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas.

1) Seksi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat

Tugas:

- a. Menyusun rencana kegiatan seksi pengembangan usaha ekonomi masyarakat;

- b. Menghimpun bahan perumusan pedoman pembinaan pengembangan usaha ekonomi masyarakat;
- c. Menyusun pedoman pembinaan pengembangan usaha ekonomi masyarakat;
- d. Melaksanakan pembinaan pengembangan dan penguatan modal lembaga usaha ekonomi masyarakat pedesaan;
- e. Menyiapkan bahan pengembangan badan usaha milik desa dalam rangka memperkuat perekonomian masyarakat desa;
- f. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan pengembangan usaha ekonomi masyarakat pedesaan;
- g. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kegiatan; dan
- h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

2) Seksi Fasilitasi dan Partisipasi Masyarakat Desa,

Tugas :

- a. Menyusun program kerja pelaksanaan tugas fasilitasi dan partisipasi masyarakat desa;
- b. Mengumpulkan bahan penyusunan rencana dan program pembinaan dan bimbingan serta fasilitasi dan partisipasi masyarakat desa;
- c. Melaksanakan koordinasi dalam rangka mempersiapkan penyusunan konsep pedoman dan petunjuk teknis fasilitasi dan partisipasi masyarakat desa;
- d. Melakukan koordinasi penyusunan pedoman dan kebijakan dalam pengelolaan fasilitasi dan partisipasi masyarakat desa;
- e. Melakukan penyusunan konsep pedoman petunjuk teknis pelaksanaan pengelolaan fasilitasi dan partisipasi masyarakat desa;
- f. Melakukan pembinaan dan evaluasi pendampingan fasilitasi dan partisipasi masyarakat desa;
- g. Menyiapkan bahan bimbingan dan pembinaan dalam rangka pengembangan usaha gotong royong masyarakat desa;
- h. Menyiapkan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan fasilitasi dan partisipasi masyarakat desa;
- i. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kegiatan; dan

- j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

5. Bidang Pendayagunaan Teknologi Tepat Guna

Tugas :

melaksanakan urusan pemasyarakatan dan pengembangan dan penerapan teknologi tepat guna;

Fungsi :

- a. Perumusan kebijakan fasilitasi pelaksanaan pemasyarakatan dan pengembangan teknologi tepat guna desa dan kelurahan;
- b. Perumusan kebijakan fasilitasi pelaksanaan penerapan teknologi tepat guna desa dan kelurahan;
- c. Perumusan kebijakan teknis kegiatan dalam rangka pendayagunaan teknologi tepat guna dan pengelolaan sumber daya alam;
- d. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pendayagunaan teknologi tepat guna; dan
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

1) Seksi Pemasyarakatan dan Pengembangan Teknologi Tepat Guna,

Tugas :

- a. Menyusun program kerja pelaksanaan tugas pemasyarakatan dan pengembangan teknologi tepat guna desa dan kelurahan;
- b. Menyiapkan bahan penyusunan pedoman umum dan petunjuk teknis operasional pemasyarakatan dan Pengembangan teknologi tepat guna desa dan kelurahan;
- c. Melaksanakan pembinaan, monitoring dan evaluasi kelembagaan teknologi tepat guna;
- d. Melaksanakan kegiatan pemasyarakatan dan pengembangan teknologi tepat guna melalui gelar/pameran teknologi tepat guna, lokakarya teknologi tepat guna, pelatihan, pendampingan serta hibah teknologi tepat guna;

- e. Melaksanakan pendataan dan pemetaan sumber daya alam perdesaan dan kelurahan;
- f. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pemyarakatan teknologi tepat guna; dan
- g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang..

2) Seksi Penerapan Teknologi Tepat Guna,

Tugas :

- a. Menyusun program kerja pelaksanaan tugas penerapan teknologi tepat guna desa dan kelurahan;
- b. Menyiapkan bahan penyusunan pedoman umum dan petunjuk teknis operasional penerapan teknologi tepat guna desa dan kelurahan;
- c. Menyiapkan konsep naskah kerjasama teknologi tepat guna;
- d. Melaksanakan kegiatan penerapan teknologi tepat guna melalui penelitian, pengkajian, inovasi, ujicoba, fasilitasi dan pemetaan teknologi tepat guna desa dan kelurahan;
- e. Melaksanakan pembinaan pelatihan, pendampingan dan hibah kepada masyarakat dalam penerapan dan pengelolaan sumber daya alam perdesaan dan kelurahan;
- f. Melaksanakan koordinasi pembangunan dan pengembangan energi kelistrikan
- g. Melaksanakan kegiatan kelistrikan, daerah terpencil dan kepulauan
- h. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan penerapan teknologi tepat guna;
- i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang

6. Bidang Pemerintahan Desa

Tugas :

Melaksanakan urusan Pemerintahan Desa;

Fungsi :

- a. Perumusan pedoman kebijakan teknis, perangkat desa;

- b. Perumusan pedoman kebijakan teknis, koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa;
- c. Perumusan pedoman kebijakan teknis pengelolaan keuangan desa dan kekayaan desa; dan
- d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

1) Seksi Perangkat Desa,

Tugas:

- a. Mengumpulkan, mengolah dan menyiapkan bahan penyusunan program kerja pelaksanaan tugas perangkat desa;
- b. Mengumpulkan, mengolah, menyiapkan bahan dan memfasilitasi pengusulan, pencalonan, pengangkatan dan pemberhentian kepala desa dan perangkat desa;
- c. Melaksanakan fasilitasi penyelesaian sengketa pemilihan kepala desa;
- d. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan pengangkatan perangkat desa;
- e. Mengumpulkan, mengolah dan menyiapkan bahan pembinaan perangkat desa;
- f. Mengumpulkan, mengolah dan menyiapkan bahan permasalahan yang berhubungan dengan perangkat dan aparat desa;
- g. Melakukan pembinaan dan fasilitasi peningkatan kemampuan aparatur dan perangkat desa;
- h. Melakukan monitoring dan evaluasi aparatur perangkat desa dan BPD; dan
- i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

2) Seksi Administrasi Pemerintahan Desa,

Tugas :

- a. Melaksanakan fasilitasi penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa;
- b. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa;

- c. Melaksanakan penyusunan data dasar penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa;
- d. Melaksanakan pengawasan penyelenggaraan pemilihan kepala desa;
- e. Melaksanakan pembinaan fasilitasi penyusunan peraturan desa;
- f. Mengumpulkan, mengolah dan menyiapkan bahan proses pembentukan, pemecahan, penggabungan dan penghapusan serta pemekaran dan perubahan nama desa;
- g. Melaksanakan penataan kewenangan desa;
- h. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa; dan
- i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

3) Seksi Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Desa,

Tugas :

- a. Mengumpulkan, mengolah dan menyiapkan bahan penyusunan regulasi pengelolaan keuangan dan aset desa;
- b. Melaksanakan sosialisasi pedoman pengelolaan keuangan dan kekayaan desa;
- c. Melaksanakan fasilitasi dan pembinaan pengelolaan keuangan dan kekayaan desa;
- d. Melaksanakan penyusunan rancangan penghasilan dan tunjangan kepala desa dan perangkat desa;
- e. Melaksanakan pembinaan, pengawasan dan supervisi pengelolaan keuangan dan kekayaan desa;
- f. Melaksanakan fasilitasi penggalan potensi sumber pendapatan asli desa;
- g. Mengumpulkan, mengolah dan menyiapkan bahan pedoman dan petunjuk teknis tentang peningkatan pendapatan dan kerja sama Desa ;
- h. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan keuangan dan kekayaan desa; dan
- i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

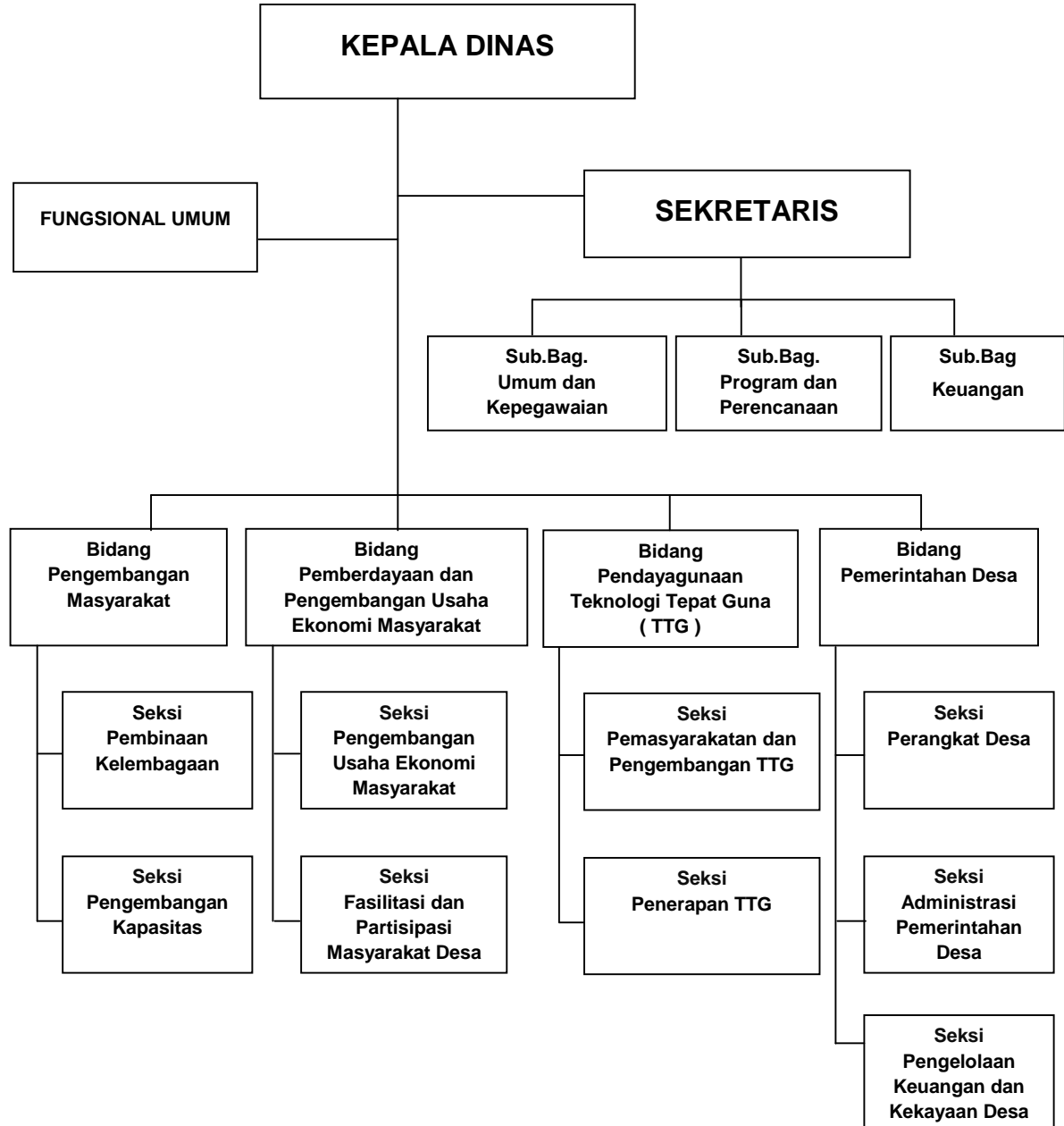
**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN SUMENEP**

Peraturan Daerah Kab. Sumenep Nomor : 09 Tahun 2016

Tentang Organisasi Perangkat Daerah

Peraturan Bupati Sumenep Nomor Nomor : 58 Tahun 2016

tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Struktur Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Sumenep



F. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

Dalam isu-isu strategis Provinsi Jawa Timur yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Tahun 2014-2019, terdapat permasalahan pembangunan dalam urusan pemberdayaan masyarakat.

Permasalahan tersebut antara lain :

- a. Belum optimalnya peran kader pemberdayaan masyarakat yang telah dilatih dan belum terakreditasinya pelatihan pemberdayaan masyarakat;
- b. Belum terintegrasinya program pemberdayaan masyarakat dengan program pertumbuhan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan;
- c. Belum optimalnya penggunaan basis data terpadu dalam upaya penanggulangan kemiskinan yang terintegrasi.

Dalam isu-isu strategis Kabupaten Sumenep yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Tahun 2016-2021, juga terdapat permasalahan pembangunan yang terkait dalam urusan pemberdayaan masyarakat.

Permasalahan tersebut antara lain :

- a. Tingkat kemiskinan di Kabupaten Sumenep relatif tinggi/ tren meningkat;
- b. Pembangunan infrastruktur yang belum optimal;
- c. Tata pemerintahan yang belum efektif;
- d. Akses masyarakat terhadap pendidikan dan kesehatan yang kurang optimal;
- e. Pembangunan desa dan kawasan perdesaan yang belum terpadu ;

Berdasarkan permasalahan di tingkat Provinsi Jawa Timur dan di lingkup Kabupaten Sumenep tersebut mempunyai implikasi terhadap permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumenep dalam menjalankan tupoksinya, antara lain:

- a. Belum optimalnya kinerja lembaga ekonomi perdesaan dalam meningkatkan PADes dan kesejahteraan masyarakat guna menekan angka kemiskinan;
- b. Partisipasi lembaga kemasyarakatan desa dalam proses pembangunan di desa masih rendah;
- c. Kemampuan dan pengetahuan masyarakat desa atas pemanfaatan peralatan TTG dalam rangka pelestarian SDA belum optimal;
- d. Kapasitas aparatur pemerintah desa di dalam tata administrasi pemerintahan masih lemah;

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Selanjutnya dengan memperhatikan perkembangan dan dinamika kehidupan masyarakat serta sesuai dengan arah kebijakan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kabupaten Sumenep 2016 -2021, maka prioritas yang hendak dicapai dalam Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah memantapkan pemberdayaan masyarakat dengan bertumpu pada TRIDAYA (pemberdayaan manusia, pemberdayaan usaha dan pemberdayaan lingkungan).

Sehubungan dengan itu, kompetensi dan kemampuan profesionalisme jajaran perlu untuk dibangun, agar mampu mewujudkan aparatur Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang menerapkan prinsip-prinsip *good governance*, sehingga mampu melaksanakan otonomi daerah dalam menghadapi tantangan pembangunan khususnya di Kabupaten Sumenep.

A. FAKTOR PENENTU KEBERHASILAN (CRITICAL SUCCES FACTORS / CSF)

Faktor Penentu Keberhasilan (CSF) berfungsi untuk lebih memfokuskan strategi organisasi dalam rangka pencapaian Misi, Tujuan dan Sasaran dan sekaligus merupakan prasyarat untuk keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Berikut ini adalah Faktor Penentu Keberhasilan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumenep agar dapat mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan :

1. Pengembangan potensi dan memperkuat kapasitas kelompok masyarakat untuk terlibat aktif dalam pembangunan berdasarkan pada prinsip-prinsip pemberdayaan masyarakat.
2. Pembangunan berperspektif gender, semua kebijakan pembangunan diupayakan berperspektif gender dan harus dapat memberikan kontribusi terhadap terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender.

3. Fasilitasi pemberdayaan perempuan dan anak, merupakan suatu proses kegiatan untuk meyakinkan lembaga pemerintah maupun instansi non pemerintah, dengan bertumpu pada kekuatan dan kemandirian.
4. Terwujudnya penduduk tumbuh seimbang melalui pelembagaan keluarga kecil bahagia sejahtera.
5. Pengendalian laju pertumbuhan penduduk.

B. NILAI – NILAI LUHUR ORGANISASI

Nilai-nilai luhur organisasi merupakan nilai-nilai yang dijadikan pegangan dan dijiwai oleh setiap anggota organisasi dalam melaksanakan program dan kegiatan yang telah ditetapkan agar dapat berhasil dengan baik. Nilai-nilai luhur yang dipedomani Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumenep adalah :

1. Musyawarah
2. Keharmonisan
3. Kerjasama

Musyawarah berarti dalam setiap penanganan atas permasalahan dan pengambilan keputusan diusahakan dengan cara musyawarah dan melibatkan setiap elemen dalam organisasi, sehingga bisa dicapai keputusan yang dapat diterima oleh semua golongan.

Keharmonisan berarti dengan menciptakan suasana yang harmonis, saling menghormati dan koordinasi yang baik di Lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumenep, diharapkan akan dapat mendorong terciptanya suasana yang harmonis di masyarakat.

Kerjasama berarti dalam melaksanakan setiap program dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan, setiap pegawai Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumenep harus mengutamakan kerjasama yang baik agar tercipta koordinasi intern dan ekstern organisasi, sehingga tujuan yang ditetapkan dapat tercapai.

C. PERNYATAAN VISI

Memperhatikan visi Kabupaten Sumenep yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sumenep yaitu :

“Sumenep Makin Sejahtera dengan Pemerintahan yang Mandiri, Agamis, Nasionalis,
Transparan, Adil dan Profesional”

“(SUPER MANTAP)”

Hal ini sangat sejalan dengan tugas dan fungsi yang diemban oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumenep yaitu mewujudkan kemandirian masyarakat.

Kata mandiri disini bermakna suatu kondisi dimana masyarakat memiliki kemampuan dalam :

1. Memenuhi kebutuhan dasar
2. Melakukan usaha produktif
3. Menjangkau dan mengakses sumber daya sosial ekonomi,
4. Menentukan nasib sendiri, tidak tergantung dari pihak lain, dan
5. Terbebas dari mental dan budaya miskin serta mempunyai martabat dan harga diri.

D. PERNYATAAN MISI

Misi merupakan sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh instansi pemerintah sesuai dengan visi yang ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan berhasil dengan baik.

➤ Rumusan Misi

Mengacu pada Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih dan dokumen RPJPD Sumenep tahun 2010 – 2025 menjadi panduan dalam penyusunan RPJMD bagi Kepala Daerah terpilih 2016 – 2021 yang selanjutnya dijabarkan dalam misi dan program prioritas.

Adapun Misi Bupati terpilih adalah sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Melalui Pendidikan, Kesehatan dan Pengentasan Kemiskinan;
 - 2) Mempercepat Pembangunan Infrastruktur Wilayah Kepulauan dan Daratan yang Didukung Pengelolaan SDA serta Lingkungan;
 - 3) Meningkatkan Kemandirian Perekonomian Pedesaan dan Perkotaan dengan Memperhatikan Potensi Ekonomi Lokal yang Unggul Berdaya Saing Tinggi;
 - 4) Meningkatkan Kultur dan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional dan Akuntabel;
 - 5) Meningkatkan Tata Kelola Kehidupan Masyarakat Aman dan Kondusif Melalui Partisipasi Masyarakat serta Stakeholder Dalam Proses Pembangunan;
 - 6) Meningkatkan dan mengembangkan nilai-nilai keagamaan, budaya serta nasionalisme yang didukung kearifan lokal dalam kehidupan masyarakat;
- Dari enam misi tersebut , Dinas Pemberdayan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumenep terdapat pada:

- **Misi kedua yaitu** : “Mempercepat Pembangunan Infrastruktur Wilayah Kepulauan dan Daratan yang Didukung Pengelolaan SDA serta Lingkungan”
- **Misi keempat yaitu** : “Meningkatkan kultur dan tata kelola pemerintahan yang professional dan akuntabel “ dengan tujuan “Meningkatkan peran serta masyarakat dan stakeholder dalam perencanaan pembangunan”.

E. TUJUAN DAN SASARAN

Untuk mencapai Visi dan Misi, ditetapkan suatu tujuan yang akan dicapai dalam kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun. Penetapan tujuan mengacu pada pernyataan visi dan misi yang telah ditetapkan dan dapat mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan dan program dalam rangka merealisasikan misi sebagai berikut :

1. Tujuan Misi 2 :

“Meningkatkan efektifitas pengelolaan SDA dan lingkungan hidup berkelanjutan”

2. Tujuan Misi 4 :

“Persentase Peran Serta Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan Daerah”

Untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, maka diperlukan penjabaran lebih rinci dalam bentuk sasaran-sasaran yang harus dicapai dalam kurun waktu bulanan, triwulan, semesteran dan tahunan.

Sasaran tersebut merupakan rencana tindakan dan alokasi sumber daya dan dana Dinas Pemberdayan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumenep yang harus dilaksanakan agar dapat menjamin keberhasilan pelaksanaan rencana jangka panjang.

Untuk mencapai Misi dan tujuan tersebut sasaran yang mendukung pada **Misi Kedua** adalah **“Meningkatnya kualitas SDA dan lingkungan hidup”** sedangkan untuk **Misi Keempat** adalah **“Terwujudnya tata kelola pemerintahan desa yang baik”**

Mengacu pada Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran RPJM Kabupaten Sumenep tahun 2016-2021 maka telah ditetapkan tujuan dan sasaran pada Dinas Pemberdayan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumenep untuk Tahun 2016 - 2021, sebagai berikut:

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pemberdayan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumenep

➤ **Tujuan**

Dengan memperhatikan perkembangan dan dinamika masyarakat di Kabupaten Sumenep, berdasarkan prioritas perencanaan pembangunan jangka menengah daerah, maka tujuan yang ingin dicapai oleh Dinas Pemberdayan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumenep adalah Bidang Urusan Pemberdayaan Masyarakat yaitu :

⇒ Terwujudnya Peningkatan Keberdayaan Masyarakat dalam Aspek Ekonomi, Sosial dan Budaya

➤ **Sasaran**

Selanjutnya mengenai gambaran sasaran yang ingin diwujudkan Dinas Pemberdayan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumenep, adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Ekonomi, Sarana dan Prasarana Dasar Masyarakat
2. Meningkatnya tatalaksana pemerintahan desa yang baik

No	Tujuan	Sasaran Sasaran	Indikator sasaran	Target Kinerja Sasaran pada tahun				
				2016	2017	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Terwujudnya Peningkatan Keberdayaan Masyarakat dalam Aspek Ekonomi, Sosial dan Budaya	1. Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Ekonomi, Sarana dan Prasarana Dasar Masyarakat	1. Jumlah Posyantek yang berfungsi	8 Posyantek	5 Posyantek	5 Posyantek	5 Posyantek	4 Posyantek
			2. Jumlah LPM (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat) yang aktif	24 Lembaga	34 Lembaga	44 Lembaga	54 Lembaga	64 Lembaga
			3. Jumlah KPM (Kader Pemberdayaan Masyarakat) yang aktif	55,63%	46,64%	42,20%	38,40%	34,25%
			4. Rasio Elektrifikasi	54,47%	56,47%	58,47%	60,47%	62,47%
		2. Meningkatnya tatalaksana pemerintahan desa yang baik	1. Persentase Peningkatan Dana Keswadayaan Masyarakat dalam Pembangunan Desa	0.1 %	0.15 %	0.2%	0.2%	0.2%
			2. % Desa yang tertib Administrasi	100%	100%	100%	100%	100%
			5. Jumlah Desa Sejahtera	27 Desa	54 Desa	81 Desa	108 Desa	135 Desa
			6. Jumlah BUMDes	27 BUMDes	54 BUMDes	81 BUMDes	108 BUMDes	135 BUMDes

F. STRATEGI (CARA MENCAPAI SASARAN)

Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, telah dirumuskan strategi untuk mencapainya selama 5 (lima) tahun ke depan dari tahun 2016 sampai dengan 2021 dengan menetapkan kebijakan dan program.

Selanjutnya strategi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumenep, adalah sebagai berikut :

1. Pemenuhan Kebutuhan Dasar Masyarakat (Basic Need Approach).
2. Pengembangan Partisipasi, Keswadayaan & Kamandirian Masyarakat (Self Reliance Approach).
3. Pengorganisasi & Pelembagaan Masyarakat (Community Based Organizations Approach).
4. Pemberdayaan Masyarakat Pedesaan (Rural Community Approach).
5. Pengelolaan Lintas Sektor dan Program Masyarakat (Cross Sectoral And Programmes Approach).
6. Pengembangan Ekonomi Rakyat (Prosperity Approach).
7. Peningkatan kemampuan keluarga dalam pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak, pembinaan kesehatan ibu, bayi dan anak serta pembinaan kualitas hidup keluarga secara terpadu.
8. Pemberdayaan ketahanan keluarga dalam rangka mewujudkan pembangunan keluarga.

Sedangkan langkah Kebijakan dan Program yang akan di tempuh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumenep, adalah sebagai berikut :

1. Kebijakan

- a. Pengembangan pembangunan ekonomi yang *pro-poor*, *pro-job*, dan *pro-growth*.
- b. Meningkatnya partisipasi masyarakat dan perempuan di dalam setiap pelaksanaan dan pengelolaan pembangunan di segala bidang.
- c. Terwujudnya penduduk tumbuh seimbang melalui pelembagaan keluarga kecil bahagia sejahtera.

2. Program dan Kegiatan

Keberhasilan pelaksanaan Misi, tujuan, sasaran dan kebijakan yang telah ditetapkan di atas, ditentukan oleh kegiatan nyata yang terprogram secara sistematis dan terpadu. Program adalah kumpulan dari berbagai kegiatan nyata, sistematis dan terpadu yang akan dilaksanakan guna mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Untuk mencapai sasaran 2016 sampai dengan tahun 2021 yang telah ditetapkan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumenep telah merumuskan kebijakan dan programnya sebagai berikut :

1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Kegiatan :

- a. Penyediaan jasa surat menyurat
- b. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
- c. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
- d. Penyediaan jasa administrasi keuangan
- e. Penyediaan jasa kebersihan kantor
- f. Penyediaan alat tulis kantor
- g. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
- h. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
- i. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
- j. Penyediaan makanan dan minuman
- k. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
- l. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah
- m. Pameran Pembangunan

2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Kegiatan :

- a. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
- b. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
- c. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

3) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Kegiatan :

- a. Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran
- b. Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
- c. Penyusunan Penetapan Kinerja
- d. Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
- e. Penyusunan Rencana Kerja Dan Anggaran SKPD

4) Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan

Kegiatan :

- a. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan tenaga teknis dan masyarakat
- b. Gelar Teknologi Tepat Guna Tingkat Nasional
- c. Jalin matra
- d. Pengendalian, Pemantauan dan Evaluasi Pengelolaan Keuangan Desa
- e. Pemberdayaan Penyandang Disabilitas
- f. Fasilitasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Desa
- g. Pilot Proyek Desa Membangun
- h. Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga
- i. Pemberdayaan dan Penguatan Kelembagaan Organisasi Wanita
- j. Peningkatan Manajemen Operasional Dharma Wanita
- k. Operasional Pembinaan Kelistrikan Daerah Terpencil dan Kepulauan
- l. Pemberian Penghargaan bagi Tokoh Berprestasi

5) Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Perdesaan

Kegiatan :

- a. Pemberdayaan Badan Usaha Milik Desa (BUM-Desa)

6) Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa

Kegiatan :

- a. Peringatan Gerakan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat
- b. Fasilitasi Pendataan Profil Desa.

7) Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa

Kegiatan :

- a. Pembekalan Kepala Desa
- b. Pelantikan Kepala Desa
- c. Penyusunan Peraturan Perundang-undangan tentang Desa
- d. Perumusan Pedoman dan Perhitungan Alokasi Dana Desa sumber dari APBN
- e. Penanganan Kasus pada Wilayah Pemerintahan Desa

G. PERENCANAAN DAN PERJAJIAN KINERJA TAHUN 2017

Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, perencanaan dan perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan merupakan langkah awal untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh instansi.

Perencanaan dan perjanjian kinerja ini merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai. selama kurun waktu 1 (satu) dengan memperhitungkan lingkungan yang selalu berubah dan pengaruhnya terhadap organisasi.

Sebagai penjabaran lebih lanjut dari Rencana Strategik, disusun suatu Rencana Kinerja (Performance Plan) setiap tahunnya. Perencanaan dan Perjanjian Kinerja ini merupakan penjabaran target kinerja yang harus dicapai dalam satu tahun pelaksanaan. Perjanjian kinerja ini menunjukkan nilai kuantitatif yang melekat pada pada setiap indicator kinerja, baik pada tingkat sasaran strategik maupun tingkat kegiatan, dan merupakan perbandingan bagi proses pengukuran keberhasilan organisasi yang dilakukan setiap akhir periode pelaksanaan.

Perencanaan dan perjanjian kinerja tahun 2017 ini merupakan komitmen seluruh anggota organisasi untuk mencapai kinerja yang sebaik-baiknya dan sebagai bagian dari upaya untuk memenuhi misi organisasi. Dengan demikian, seluruh proses perencanaan dan pengendalian aktivitas operasional Dinas Pemberdayan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumenep sepenuhnya dapat dirujuk pada Rencana Kinerja Tahun 2017 ini.

Sasaran Strategis, Indikator Kinerja dan Perjanjian Kinerja (Penetapan Kinerja tahun 2017, disajikan pada table berikut ini :

Tabel I: Sasaran Strategis, Indikator Kinerja dan Perjanjian Kinerja

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017
DINAS PEMBERDAYAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN SUMENEP

No	Sasaran	Indikator sasaran	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Ekonomi, Sarana dan Prasarana Dasar Masyarakat	1. Jumlah Posyantek yang berfungsi	5 Posyantek
		2. Jumlah LPM (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat) yang aktif	187 Lembaga
		3. Jumlah KPM (Kader Pemberdayaan Masyarakat) yang aktif	46,64%
		4. Rasio Elektrifikasi	56.47%
2.	Meningkatnya tata laksana pemerintahan desa yang baik	1. Persentase Peningkatan Dana Keswadayaan Masyarakat dalam Pembangunan Desa	0.15 %
		2. % Desa yang tertib Administrasi	100%
		3. Jumlah Desa Sejahtera	54 Desa
		4. Jumlah BUMDes	54 BUMDes

H. RENCANA ANGGARAN TAHUN 2017

Rincian kebijakan belanja untuk APBD Tahun Anggaran 2017, sesuai dengan kemampuan keuangan daerah disusun berdasarkan peraturan perundang-undangan dengan prinsip-prinsip umum.

Sumber Dana/Anggaran pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumenep Tahun Anggaran 2017 sebagai berikut :

Sumber Dana APBD Kabupaten Sumenep

Alokasi anggaran yang dikelola pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumenep yang berasal dari sumber dana APBD Kabupaten Sumenep Tahun Anggaran 2017 adalah sebagai berikut :

- Belanja Tak Langsung (Belanja Pegawai)
Anggaran = Rp. 2.947.794.304,00
- Belanja Langsung
Anggaran = Rp. 13.136.869.464,00
- Belanja Bantuan Hibah
Anggaran = Rp. 45.000.000,00
- Belanja Bantuan Sosial
Anggaran = Rp. 105.000.000,00

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG TAHUN 2017

No.	PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)	KET
1	2	3	4
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	506.965.100	
a.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6.300.000	
b.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	126.000.000	
c.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	23.544.850	
d.	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	5.526.000	
e.	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	32.174.000	
f.	Penyediaan Alat Tulis Kantor	43.680.850	
g.	Penyediaan Barang Cetak Dan Penggandaan	12.075.000	
h.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	5.175.000	
i.	Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan	28.800.000	
j.	Penyediaan Makanan Dan Minuman	49.680.000	
k.	Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah	126.169.400	
l.	Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Dalam Daerah	22.390.000	
m.	Pameran Pembangunan	25.450.000	

No.	PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)	KET
1	2	3	4
2	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur	128.323.286	
a.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	53.337.286	
b.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	58.586.000	
c.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	16.400.000	
3	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan	20.905.000	
a.	Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran	4.575.000	
b.	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	2.750.000	
c.	Penyusunan Penetapan Kinerja	3.750.000	
d.	Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	2.530.000	
e.	Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran SKPD	7.300.000	
4	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	11.219.325.078	
a.	Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Teknis dan Masyarakat	120.000.000	
b.	Jalin Matra	98.598.700	
c.	Pengendalian, Pemantauan dan Evaluasi Pengelolaan Keuangan Desa	195.256.000	
d.	Pemasyarakatan Teknologi Tepat Guna melalui Pos Pelayanan Teknologi Tepat Guna	27.000.000	
e.	Pemberdayaan Penyandang Disabilitas	5.000.000	
f.	Pengembangan Inovasi Teknologi Tepat Guna	50.000.000	
g.	Fasilitasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Desa	338.654.500	
h.	Pilot Proyek Desa Membangun	30.000.000	
i.	Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga	2.000.000.000	
j.	Pemberdayaan dan Penguatan Kelembagaan Organisasi Wanita	400.000.000	
k.	Peningkatan Manajemen Operasional Dharma Wanita Persatuan	137.553.500	
l.	Operasional Pembinaan Kelistrikan Daerah Terpencil dan Kepulauan	7.567.262.378	
m.	Pemberian Penghargaan Bagi Tokoh Berprestasi	250.000.000	
5	Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan	250.000.000	
a.	Pemberdayaan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes)	250.000.000	

No.	PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)	KET
1	2	3	4
6	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa	85.000.000	
a.	Peringatan Gerakan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	35.000.000	
b.	Fasilitasi Pendataan Profil Desa	50.000.000	
7	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	926.351.000	
a.	Pembekalan Kepala Desa	285.669.100	
b.	Pelantikan Kepala Desa	161.663.900	
c.	Penyusunan Peraturan Perundang-undangan tentang Desa	170.124.000	
d.	Perumusan Pedoman dan Penghitungan Alokasi Dana Desa sumber dan APBN	129.334.000	
e.	Penanganan Kasus pada Wilayah Pemerintahan Desa	179.560.000	
	JUMLAH	13.136.869.464	

BAB III**AKUNTABILITAS KINERJA**

Dalam Akuntabilitas terkandung kewajiban untuk menyajikan dan melaporkan segala tindak tanduk dan kegiatan terutama dibidang administrasi keuangan kepada pihak yang lebih tinggi/atasannya. Dalam hal ini, terminologi akuntabilitas dilihat dari sudut pandang pengendalian kegiatan pada pencapaian tujuan.

Tolok ukur atau indikator pengukuran kinerja adalah kewajiban individu dan organisasi untuk mempertanggungjawabkan capaian kinerjanya melalui pengukuran yang seobyektif mungkin. Media pertanggungjawaban dalam konsep akuntabilitas tidak terbatas pada laporan pertanggungjawaban saja, akan tetapi mencakup juga praktek-praktek kemudahan sipemberi mandat mendapatkan informasi, baik langsung maupun tidak langsung secara lisan maupun tulisan.

Pengukuran kinerja dipergunakan untuk penilaian atas keberhasilan/kegagalan pelaku kegiatan/program/kebijaksanaan sesuai dengan dana dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi.

Oleh karena itu, bahwa setiap pejabat birokrasi publik wajib untuk menyusun akuntabilitas atas pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangannya dibidang pemerintahan dan pembangunan. Pengukuran kinerja ini sekaligus menjadi pertanggungjawaban kepada publik dalam pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Pengukuran kinerja ini mencakup kinerja kegiatan yang merupakan tingkat pencapaian target (rencana tingkat capaian) dari masing-masing indikator kinerja kegiatan dan tingkat pencapaian sasaran yang merupakan tingkat pencapaian target dari masing-masing indikator sasaran yang telah ditetapkan sebagaimana dituangkan dalam dokumen rencana kinerja. Pengukuran tingkat capaian sasaran didasarkan pada data hasil pengukuran kinerja kegiatan.

Guna menilai keberhasilan pencapaian indikator kinerja sasaran digunakan skala ordilan sebagai berikut ;

NO.	CAPAIAN KINERJA	PREDIKAT
1.	Nilai > 75	Baik
2.	Nilai 65 – 75	Sedang
3.	Nilai 55 – 65	Kurang
4.	Nilai < 55	Sangat Kurang

Pengukuran kinerja tersebut disamping sebagai upaya pengembangan strategi organisasi ke depan, secara teknis wajib dilihat sebagai suatu sistem lacak *performance* masing-masing bidang yang merupakan *entry point* untuk pengendalian fungsi-fungsi managerial secara menyeluruh.

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Capaian kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumenep Tahun 2017 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja sasaran, disamping itu diperbandingkan pula dengan realisasi yang telah dicapai Tahun 2017. Secara rinci capaian kinerja masing-masing indikator kinerja tersebut dapat diuraikan pada lampiran.

Terdapat beberapa tingkat capaian kinerja sasaran tersebut yang sama dengan target atau mencapai target; lebih besar dari target atau melebihi target; sama dengan realisasi Tahun 2017 atau mencapai target; dan lebih besar dari realisasi Tahun 2017 atau melebihi target.

Namun demikian juga terdapat beberapa tingkat capaian kinerja sasaran yang belum berhasil diwujudkan pada Tahun 2017 ini, atau tingkat capaiannya kurang dari target maupun tingkat capaiannya lebih kecil dari realisasi yang telah dicapai Tahun 2017.

Terhadap hal tersebut, kami telah melakukan beberapa analisis dan evaluasi agar terdapat perbaikan penanganan di masa mendatang. Analisis capaian kinerja tersebut selengkapnya tertuang diuraikan pada bagian analisis capaian kinerja berikut ini.

a. Perbandingan antara target Tahun 2017 dan Realisasi Kinerja Tahun 2017.

Untuk mengetahui presentase pencapaian rencana tingkat capaian setiap indikator sasaran, maka telah dilakukan pengukuran pencapaian sasaran melalui indikator-indikator setiap sasaran (output, outcome). Setiap kelompok indikator tersebut telah dibuat indikator masing-masing. Selanjutnya setiap indikator telah ditetapkan rencana tingkat capaian (target) realisasi dan presentase pencapaian rencana tingkat capaian. Secara garis besar dapat kami jelaskan kinerja rata-rata dari semua sasaran yang terdapat pada setiap program selama tahun 2017.

Mengacu pada Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih dan dokumen RPJPD Sumenep tahun 2010 – 2025 menjadi panduan dalam penyusunan RPJMD bagi Kepala Daerah terpilih 2016 – 2021 yang selanjutnya dijabarkan dalam misi dan program prioritas sebagai berikut :

a) Bidang Urusan Energi dan Sumber Alam

Misi 2 : **“Mempercepat Pembangunan Infrastruktur Wilayah Kepulauan dan Daratan yang Didukung Pengelolaan SDA serta Lingkungan”**

Tujuan 2 : **“Meningkatkan efektifitas pengelolaan SDA dan lingkungan hidup berkelanjutan”.**

Sasaran 2 : **“Meningkatnya kualitas SDA dan lingkungan hidup”.**

No	Sasaran Renstra	Indikator Kinerja	TAHUN 2017			
			Satuan	Target	Realisasi	% Capaian
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7
1	Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Ekonomi, Sarana dan Prasarana Dasar Masyarakat	1 Rasio Elektrifikasi	%	56,47	55,49	98,26

b) Bidang Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Misi 4 : **“Meningkatkan kultur dan tata kelola pemerintahan yang professional dan akuntabel”.**

Tujuan 1 : **“Meningkatkan peran serta masyarakat dan stakeholder dalam perencanaan pembangunan”.**

Sasaran 3 : **“Terwujudnya tata kelola pemerintahan desa yang baik”.**

No	Sasaran Renstra	Indikator Kinerja	TAHUN 2017			
			Satuan	Target	Realisasi	% Capaian
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7
1	Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Ekonomi, Sarana dan Prasarana Dasar Masyarakat	1 Jumlah Posyantek yang berfungsi	Posyantek	5	0	0
		2 Jumlah LPM (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat) yang aktif	Lembaga	187	187	100
		3 Jumlah KPM (Kader Pemberdayaan Masyarakat) yang aktif	%	46,64	53,29	114,26

No	Sasaran Renstra	Indikator Kinerja	TAHUN 2017			
			Satuan	Target	Realisasi	% Capaian
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7
2	Meningkatnya tatalaksana pemerintahan desa yang baik	1 Jumlah Desa Sejahtera	Desa	54	-	-
		2 % Desa yang tertib Administrasi	%	100	60	60
		3 Persentase Peningkatan Dana Keswadayaan Masyarakat dalam Pembangunan Desa	%	0,15	0,15	100,00
		4 Jumlah BUMDes	Desa	54	56	103,70

b. Perbandingan antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun ini dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir.

a) Bidang Urusan Energi dan Sumber Alam

Misi 2 : **“Mempercepat Pembangunan Infrastruktur Wilayah Kepulauan dan Daratan yang Didukung Pengelolaan SDA serta Lingkungan”**

Tujuan 2 : **“Meningkatkan efektifitas pengelolaan SDA dan lingkungan hidup berkelanjutan”.**

Sasaran 2 : **“Meningkatnya kualitas SDA dan lingkungan hidup”.**

No	Sasaran Renstra	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	
				Tahun 2016	Tahun 2017
-1	-2	-3	-4	-5	-6
1	Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Ekonomi, Sarana dan Prasarana Dasar Masyarakat	1 Rasio Elektrifikasi	56,47%	54,47	55,49

b) Bidang Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Misi 4 : **“Meningkatkan kultur dan tata kelola pemerintahan yang professional dan akuntabel”.**

Tujuan 1 : **“Meningkatkan peran serta masyarakat dan stakeholder dalam perencanaan pembangunan”.**

Sasaran 3 : **“Terwujudnya tata kelola pemerintahan desa yang baik”.**

No	Sasaran Renstra	Indikator Kinerja	Target	Realisasi		
				Tahun 2016	Tahun 2017	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	
1	Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Ekonomi, Sarana dan Prasarana Dasar Masyarakat	1	Jumlah Posyantek yang berfungsi	5 Posyantek	8	0
		2	Jumlah LPM (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat) yang aktif	187 Lembaga	24	187
		3	Jumlah KPM (Kader Pemberdayaan Masyarakat) yang aktif	46,64%	55,63	53,29
2	Meningkatnya tatalaksana pemerintahan desa yang baik	1	Jumlah Desa Sejahtera	54 Desa	-	-
		2	% Desa yang tertib Administrasi	100 %	100	60
		3	Persentase Peningkatan Dana Keswadayaan Masyarakat dalam Pembangunan Desa	0,15 %	0,1	0,15
		4	Jumlah BUMDes	54 Desa	27	56

c. Perbandingan antara Target Akhir Renstra dengan Realisasi Tahun 2017.

a) Bidang Urusan Energi dan Sumber Alam

Misi 2 : **“Mempercepat Pembangunan Infrastruktur Wilayah Kepulauan dan Daratan yang Didukung Pengelolaan SDA serta Lingkungan”**

Tujuan 2 : **“Meningkatkan efektifitas pengelolaan SDA dan lingkungan hidup berkelanjutan”.**

Sasaran 2 : **“Meningkatnya kualitas SDA dan lingkungan hidup”.**

No.	Indikator	Satuan	Target Akhir Renstra	Realisasi Th. 2017	Tingkat Kemajuan
-1	-2	-3	-4	-5	-6
1	1 Rasio Elektrifikasi	%	62,47	55,49	88,83

b) Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Misi 4 : “Meningkatkan kultur dan tata kelola pemerintahan yang professional dan akuntabel”.

Tujuan 1 : “Meningkatkan peran serta masyarakat dan stakeholder dalam perencanaan pembangunan”.

Sasaran 3 : “Terwujudnya tata kelola pemerintahan desa yang baik”.

No.	Indikator	Satuan	Target Akhir Renstra	Realisasi Th. 2017	Tingkat Kemajuan
-1	-2	-3	-4	-5	-6
1	1 Jumlah Desa Sejahtera	Desa	135	-	-
	2 % Desa yang tertib Administrasi	%	100	60	60
	3 Persentase Peningkatan Dana Keswadayaan Masyarakat dalam Pembangunan Desa	%	0,2	0,15	75
	4 Jumlah BUMDes	Desa	135	56	14,07
	5 Jumlah Posyantek yang berfungsi	Posyan-tek	27	0	0
	6 Jumlah LPM (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat) yang aktif	Lemba-ga	334	187	55,99
	7 Jumlah KPM (Kader Pemberdayaan Masyarakat) yang aktif	%	100	53,29	53,29

d. Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan atau Peningkatan / Penurunan Kinerja serta Alternative Solusi yang telah dilakukan

Sebagai aparat pelaksana dalam melaksanakan tugas dan fungsi harus mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sementara itu sebagaimana dimaklumi bahwa peraturan perundang-undangan seringkali mengalami perubahan yang sangat cepat, yang ada masih belum sepenuhnya dikuasai aparat pelaksana bahkan belum sempat disosialisasikan telah muncul ketentuan lain yang merupakan perubahan dan revisi. Sehingga hal itu berpengaruh sangat signifikan terhadap mekanisme dan alur penyelesaian tugas, belum lagi bayangan kesalahan dari aspek hukum yang akan ditimpakan pada aparat pelaksana.

Proses PAK yang mendekati Akhir anggaran sehingga berpengaruh signifikan terhadap tahapan ketepatan waktu penyelesaian program dan kegiatan.

Sebagai konsekuensi logis dari pelaksanaan anggaran berbasis kinerja, maka hasilnya harus terukur. Namun yang menjadi persoalan hingga saat ini adalah sinkronisasi

terhadap data base, seringkali terjadi perbedaan dan ketidaksamaan data dasar yang dijadikan acuan dalam suatu program/ kegiatan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten.

Keberhasilan pencapaian kinerja dapat dijelaskan melalui pencapaian indikator-indikator sebagai berikut :

1. Bidang Urusan Energi dan Sumber Alam

1) Rasio Elektrifikasi

Program Peningkatan Pendayagunaan Teknologi Tepat Guna dan Kelistrikan ini untuk mencapai indikator diperoleh rata-rata pencapaian sebesar 98,26%, pencapaian ini didasarkan pada target lokasi yang dijadikan sasaran kegiatan untuk mendapatkan listrik diantaranya pembangunan Jaringan Listrik Desa Gelaman Kecamatan Arjasa, Desa Billapora Barat Kecamatan Ganding, Desa Lanjuk Kecamatan Manding, Desa Torjek Kecamatan Kangayan, Desa Sonok Kecamatan Nonggunong dan Pulau Giliraja Kecamatan Gili Genting, sehingga diperoleh hasil tingkat capaian sasaran adalah baik, bertambahnya desa yang mendapatkan listrik didukung kegiatan antara lain Operasional Pembinaan Kelistrikan Daerah Terpencil dan Kepulauan.

2. Bidang urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

1) Jumlah Desa Sejahtera

Untuk mewujudkan desa sejahtera, pemerintah telah mengesahkan UU Nomor 6 tentang Desa atau sering disebut UU Desa. UU ini memberikan kesempatan bagi desa untuk menjalankan dan mengatur pembangunannya sendiri, karena masyarakat desa-lah yang lebih tau apa saja yang dibutuhkan untuk lebih maju dan sejahtera.

Program-program desa harus dimusyawarahkan agar sesuai dengan kebutuhan masyarakat, baik itu dalam peningkatan kualitas pelayanan dasar, sarana dan prasarana dasar, ekonomi desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Semuanya itu menjadi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) yang memuat rencana kegiatan dan penggunaan atau RKP Desa.

Pelaksanaan Desa Sejahtera di Kabupaten Sumenep meliputi 4 aspek utama diantaranya :

- (1) Pemenuhan Kebutuhan Dasar (sandang, pangan, papan, pendidikan dan kesehatan)
- (2) Pemenuhan / pembangunan sarana dan prasarana
- (3) Pengembangan potensi ekonomi lokal
- (4) Pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan.

Tahun 2017 indikator Desa Sejahtera pada 54 Desa belum terlaksana sejalan dengan perubahan RPJM Kabupaten Sumenep sehingga konsep tersebut belum bisa terlaksana, Jika dibandingkan dengan target tahun 2017 yaitu 54 Desa, Capaian Kinerjanya tidak dapat terukur.

2) Persentase Desa yang Tertib Administrasi

Indikator kinerja sasaran Desa yang tertib Administrasi difokuskan kepada desa yang menyampaikan Laporan (RPJMDes, RKPDes, APBDes dan LPD).

Pada tahun 2017 dari desa yang ada di kabupaten Sumenep (330 Desa) hanya 60% desa yang melakukan Administrasi secara tertib dan Akuntabel. Tidak tercapainya capaian kinerja tersebut dikarenakan desa (Aparatur Desa) masih memiliki keterbatasan SDM.

Jika dibandingkan dengan Target Tahun 2017 maka capaian kinerjanya adalah 60% atau dengan predikat **sedang**.

3) Persentase Peningkatan Dana Keswadayaan Masyarakat dalam Pembangunan Desa

Indikator kinerja sasaran Peningkatan dana Keswadayaan Masyarakat dalam Pembangunan Desa difokuskan pada Jumlah Pendapatan Asli Desa.

Pada tahun 2017 dari desa yang ada di kabupaten Sumenep (330 Desa) untuk Pendapatan Asli desa ditargetkan sebesar 0,15% atau rata-rata sebesar Rp. 1.000.000,00 s/d Rp. 15.000.000,00 maka jika dibandingkan dengan realisasi sebesar 0.15% capaian kinerjanya adalah 100% atau dengan predikat **Baik**. Hal ini berdasarkan APBDes yang disampaikan rata-rata desa memiliki PAD sebesar Rp. 1.000.000,00 s/d Rp. 15.000.000,00.

4) Jumlah BUMDes

Salah satu aspek utama dalam Desa Sejahtera adalah pengembangan potensi ekonomi lokal. Hal ini sejalan dengan indikator sasaran terwujudnya tata kelola

pemerintahan desa yang baik yaitu dengan membentuk Badan usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai sarana dalam pengembangan ekonomi lokal di pedesaan.

Pada tahun 2017 Jumlah BUMDes yang terbentuk sebanyak 201 Bumdes akan tetapi yang aktif baru 56 BUMDes. Target yang akan dicapai dalam pembentukan BUMDes dan aktif adalah 54 Desa, dengan realisasi yang dicapai adalah 56 Desa atau Capaian kinerjanya adalah 103,70%. atau dengan predikat **Baik**

DATA BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES)/BUMADES

Periode : Desember 2017

NO	KECAMATAN	DESA	NAMA BUMDES	TANGGAL PENDIRIAN	PERDES/PERDES BERSAMA	STATUS		
						AKTIF	TIDAK	
1	2	3	4	5	6	7		
1	KOTA SUMENEP	1	PARSANGA	MERAK	09/04/2016	5 TAHUN 2016		1
		2	PANDIAN	PANDIAN BRESIH	01/02/2015	NO.188/02/435.401.119/ 2015	1	
		3	PANGARANGAN	SEHATI				1
		4	KOLOR	KURMA AJWA				1
		5	PABERASAN	AJENG RARA			1	
2	MANDING	6	MANDING LAOK	PUTRA HARAPAN	21/12/2015	08 TAHUN 2015		1
		7	GADDING	GADDING	24/06/2009	.04 TAHUN 2009		1
		8	MANDING TIMUR	PUTRI TUNGGAL	28/12/2015	12 TAHUN 2015		1
		9	KASENGAN	KASENGAN MAJU	30/07/2016	03 TAHUN 2016		1
3	KALIANGET	10	MARENGAN LAOK	PERMATA	15 JUNI 2015	04 TAHUN 2015	1	
		11	KARANG ANYAR	MAPAN	27 JULI 2015			1
		12	KERTASADA	KRISNA	19/08/2015	04 TAHUN 2015	1	
		13	PINGGIR PAPAS	MUTIARA BUMI	03/08/2015	05 TAHUN 2015		1
		14	KALIMOOK	KARTIKA		04 TAHUN 2015		1
4	TALANGO	15	POTERAN	TUNAS BANGSA	16/06/2015	NO. 02 TAHUN 2015		1
5	BLUTO	16	GULUK MANJUNG	GULUK MANJUNG	15/04/2010	04 TAHUN 2010		1
		17	SERA TENGAH	MANDIRI	04 PEB 2016	08 TAHUN 2016		1
		18	MASARAN	MASARAN	23/06/2008	470/71/435.406.111/2008		1
		19	GINGGING	GINGGING	28/07/2010	474.4/07/435.406.118/2010		1
		20	ERRABU	SUMBER SURYA	2 FEB. 2016	01 TAHUN 2016	1	
		21	KAPEDI	AL-KHAROMAH	18/08/2017	04 TAHUN 2017	1	

LAKIP DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA – Tahun 2017

BAB III Akuntabilitas Kinerja

NO	KECAMATAN	DESA	NAMA BUMDES	TANGGAL PENDIRIAN	PERDES/PERDES BERSAMA	STATUS	
						AKTIF	TIDAK
1	2	3	4	5	6	7	
		22 LOBUK	PELANGI NUSANTARA	15/12/2017	04 TAHUN 2017	1	
6	SARONGGI	23 KEBUNDADAP TIMUR	PASOPATI	27/05/2015	05 TAHUN 2015		1
		24 JULUK	ANUGERAH JAYA	15/05/2015	02 TAHUN 2015		1
		25 TALANG	NAGA MERAH	13/06/2016	03 TAHUN 2016	1	
		26 PAGARBATU	PUTRA BAHARI		11 TAHUN 2017		1
		27 TANJUNG	MUTIARA TANJUNG		02 TAHUN 2017		1
		28 LANGSAR	BAROKAH JAYA	26 AGUSTUS 2017	02 TAHUN 2017		1
		29 KEBUN DADAP BARAT	RATU	07/07/1905	3 TAHUN 2015		1
		30 TANAH MERAH	RAMPAK NAONG	30 OKTOBER 2017	3 TAHUN 2017	1	
		31 NAMBAKOR	GAJAH MADA	23 AGUSTUS 2017			1
		32 MUANGAN	GRAHA ARTHA MANDIRI		05 TAHUN 2017		1
		33 SARONGGI	KERMATA	30 AGUSTUS 2017	03 TAHUN 2017	1	
		34 AENGTONGTONG	PUSAKA AGUNG		03 TAHUN 2017		1
		35 KAMBINGAN TIMUR	SEJUTA DINAR	08/11/2017	03 TAHUN 2017		1
7	LENTENG	36 LENTENG TIMUR	SURYA	16/07/2015	07 TAHUN 2015		1
		37 LENTENG BARAT	TAREBUNG	20/07/2015	03 TAHUN 2015		1
		38 MONCEK BARAT	BARU MUNCUL	21/07/2015	04 TAHUN 2015		1
		39 MONCEK TENGAH	MANDIRI	22/07/2015	05 TAHUN 2015		1
		40 BANARESSEP BARAT	MAWAR	23/07/2015	04 TAHUN 2015		1
		41 BILLAPORA REBBA	AL KAROMAH	44/08/2015	44 TAHUN 2015		1
		42 LEMBUNG BARAT	ANTARIKSA	06/08/2015	16 TAHUN 2015		1
		43 ELLAK DAYA	AS SALAM	07/08/2015	02 TAHUN 2015		1
		44 JAMBU	JAMBU	09/07/2015	01 TAHUN 2015		1
8	GILIGENTING	45 LOMBANG	CAHAYA LOMBANG	30/11/2015	10 TAHUN 2015	1	
		46 GALIS	GALIS MAKMUR	20/03/2017	06 TAHUN 2017	1	
		47 BRINGSANG	SERUNI JINGGA	22/03/2017	03 TAHUN 2017	1	
		48 JATE	SEJATI SEJAHTERA	15/03/2017	05 TAHUN 2017	1	
		49 BANBARU	SUMBER REJEKI	20/03/2017	04 TAHUN 2017	1	
		50 BANMALENG	SUMBER SEJAHTERA	14/03/2017	09 TAHUN 2017	1	
9	PRAGAAN	51 KADUARA TIMUR	GEMA BANGSA	30/04/2017	03 TAHUN 2017	1	
		52 SENDANG	AMANAHAH	05/05/2017	04 TAHUN 2017	1	

LAKIP DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA – Tahun 2017

BAB III Akuntabilitas Kinerja

NO	KECAMATAN	DESA	NAMA BUMDES	TANGGAL PENDIRIAN	PERDES/PERDES BERSAMA	STATUS	
						AKTIF	TIDAK
1	2	3	4	5	6	7	
		53 ROMBASAN	CAHAYA LESTARI	09/09/2015	04 TAHUN 2015	1	
		54 LARANGAN PERRENG	MITRA UTAMA	01/02/2017	01 TAHUN 2017	1	
		55 SENTOL LAOK	SENTOL MAKMUR	09/06/2017	04 TAHUN 2017	1	
		56 SENTOL DAYA	PERMATA	29/05/2017	04 TAHUN 2017	1	
		57 PAKAMBAN LAOK	BAROKAH	07/07/2017	04 TAHUN 207	1	
		58 PAKAMBAN DAJA	BAROKAH	07/10/2015	04 TAHUN 2015	1	
		59 PRAGAAN LAOK	TARESNAH	12/10/2015	04 TAHUN 2015	1	
		60 PRAGAAN DAYA	PRADA SEJAHTERA	06/08/2015	03 TAHUN 2015	1	
		61 PRENDUAN	MERPATI	02/09/2015	03 TAHUN 2015	1	
		62 AENG PANAS	PERMATA IBU	04/05/2015	04 TAHUN 2015	1	
		63 KARDULUK	KARYA LESTARI	16/05/2015	04 TAHUN 2015	1	
10	GANDING	64 KETAWANG LARANGAN	HARAPAN JAYA	09/06/2015	NOMOR 9 TAHUN 2015	1	
		65 BATAAL BARAT	BATAAL BARAT	15/07/2015	NOMOR 15 TAHUN 2015	1	
		66 ROMBIYA BARAT	KENCANA	5 JUNI 2017	NOMOR 01 TAHUN 2017	1	
		67 GANDING	WANGI	15/06/2015	NOMOR 2 TAHUN 2015	1	
		68 BILAPORA BARAT	HARAPAN	14/03/2017	NOMOR 3 TAHUN 2017		1
		69 TALAGA	BERKAH	08/12/2015	NOMOR 3 TAHUN 2015		1
		70 ROMBIYA TIMUR	PURNAMA	03/02/2016	NOMOR 11 TAHUN 2016		1
		71 GADU TIMUR	AL-MUSLIMIN	11/07/2017	NOMOR 4 TAHUN 2017		1
		72 GADU BARAT	BERKAH	08/09/2016	NOMOR 05 TAHUN 2016		1
		73 KTW PAREBAAN	SETIA JAYA	07/03/2016	NOMOR 2 TAHUN 2016		1
11	GULUK - GULUK	74 KATAWANG LAOK	MAJU JAYA	19/08/2015	02 TAHUN 2015		1
		75 PANANGGUNGAN	PUTRI KENCANA	20/08/2015	02 TAHUN 2015		1
12	GAPURA	76 POJA	NUR HIKMAH	04/11/2015	04 TAHUN 2015	1	
		77 BRAJI	LANCAR JAYA	23/10/2015	10 TAHUN 2015		1
		78 KARANGBUDI	SERBA GUNA	29/08/2015	03 TAHUN 2017		1
		79 BABAN	SUMBER REJEKI	01/09/2015	05 TAHUN 2015	1	
		80 BANJAR BARAT	BUNGA RAMPAI	07/10/2015	3 TAHUN 2015		1
		81 BANJAR TIMUR	BANJAR TIMUR	20/12/2016	4 TAHUN 2016		1
		82 PALOKLOAN	KARYA BHAKTI	07/10/2015	04 TAHUN 2015		1
		83 PANAGAN	MAJU BERSAMA	09/09/2015	02 TAHUN 2015		1
		84 GERSIK PUTIH	ADINDA	15/08/2015	02 TAHUN 2015	1	

LAKIP DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA – Tahun 2017

BAB III Akuntabilitas Kinerja

NO	KECAMATAN	DESA	NAMA BUMDES	TANGGAL PENDIRIAN	PERDES/PERDES BERSAMA	STATUS		
						AKTIF	TIDAK	
1	2	3	4	5	6	7		
		85	GAPURA BARAT	GARUDA	09/09/2015	02 TAHUN 2015		1
		86	MANDALA	MAJU BERSAMA	15/06/2016	02 TAHUN 2016		1
		87	GAPURA TIMUR	YANFAU LINNAS	08/11/2016	06 TAHUN 2016	1	
		88	LONGOS	MERPATI	22/10/2015	02 TAHUN 2015		1
		89	GRUJUGAN	SANGKAR EMAS	10/08/2015	03 TAHUN 2015		1
		90	GAPURA TENGAH	AL - BEROKAH	09/07/1905	04 TAHUN 2017	1	
		91	ANDULANG	BUNGA AGUNG	08/07/1905	04 TAHUN 2016		1
		92	BATUDINDING	SRIKANDI	08/07/1905	04 TAHUN 2016		1
13	BATU PUTIH	93	AENG MERAH	BERKAT SEJATI	10/08/2015	PERDES NO. 03 TAHUN 2015		1
		94	TENGEDAN	AROBY	07/08/2015	PERDES NO. 05 TAHUN 2015	1	
		95	BADUR	CAHAYA BARU	26/08/2015	PERDES NO. 01 TAHUN 2015		1
		96	GEDANG GEDANG	SEKAR TANJUNG	10/08/2015	PERDES NO. 03 TAHUN 2015	1	
		97	BATUPUTIH KENEK	ANTOS	03/08/2015	01 TAHUN 2015		1
		98	JURUAN DAYA	TERATAI	07/08/2015	02 TAHUN 2015	1	
		99	BATUPUTIH LAOK	BERKAH	26/08/2015	05 TAHUN 2015		1
		100	BATUPUTIH DAYA	BADAY JAYA	02/09/2015	05 TAHUN 2015		1
		101	BANTELAN	MOGA BERKAH	02/09/2015	04 TAHUN 2015	1	
		102	LARANGAN KERTA	ARGAPURO	21/05/2015	02 TAHUN 2015		1
		103	LARANGAN BARMA	BARMA AGUNG	11/09/2015	04 TAHUN 2015		1
		104	BULLAAN	MAHKOTA JAYA	10/08/2015	02 TAHUN 2015	1	
		105	SERGANG	AMANAH	06/08/2015	04 TAHUN 2015	1	
		106	JURUANG LAOK	MINAK JINGGO	25/08/2015	01 TAHUN 2015		1
14	BATANG - BATANG	107	BATANG-2 DAYA	AMANAH	17/09/2015	16 TAHUN 2015		1
		108	BATANG-BATANG LAOK	SUKA MAKMUR	10/09/2015	188/03/PERDES/435.417.101/2015		1
		109	LEGUNG BARAT	SIRATUL HUSNA	17/09/2015	4 TAHUN 2015		1
		110	TOTOSAN	TOTOSAN	21/10/2015	4 TAHUN 2015		1
		111	JENANGGER	ALHIDAYAH	08/09/2015	188/15/KEP/435.417.108/2015		1
		112	K O L P O		10/08/2011	188/02/435.417.107/2011		1
		113	BANUAJU TIMUR	KARTIKA JAYA	19/05/2015	KANTOR NOTARIS PPAT SYEH, S.H NOMOR 43	1	
		114	BANUAJU BARAT	BAKTI BANYU AYU	09/09/2015	47 TAHUN 2015		1
		115	TAMIDUNG	TAMIDUNG		06 TAHUN 2016		1
		116	NYABAKAN BARAT	SUMBER REJEKI		06 TAHUN 2015		1

LAKIP DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA – Tahun 2017

BAB III Akuntabilitas Kinerja

NO	KECAMATAN	DESA	NAMA BUMDES	TANGGAL PENDIRIAN	PERDES/PERDES BERSAMA	STATUS	
						AKTIF	TIDAK
1	2	3	4	5	6	7	
		117 LOMBANG	CEMARA UDANG		04 TAHUN 2016		1
		118 BILANGAN	SUMBER MAKMUR		29 TAHUN 2016		1
		119 DAPENDA	CEMARA UDANG		01 TAHUN 2017		1
		120 LEGUNG TIMUR	LEGUNG JAYA		01 TAHUN 2017		1
		121 JANGKONG	MAGIYU		04 TAHUN 2016		1
		122 NYABAKAN TIMUR	FAJAR HARAPAN		04 TAHUN 2016		1
15	DUNGKEK	123 ROMBEN BARAT	GAJAH MADA	15/12/2017			1
		124 DUNGKEK	ANUGERAH	11/01/2016	02 TAHUN 2016	1	
		125 LAPA TAMAN	TAMAN JOKO TOLE	27/01/2016	03 TAHUN 2016	1	
		126 ROMBEN RANA	RANA WIJAYA	09/07/1905	188/06/435.319.105/2017		1
		127 BUNGIN-BUNGIN	CAHAYA CETIR	10/08/2017		1	
		128 BANRAAS	BERSATU	13 JULI 2016		1	
16	AMBUNTEN	129 AMBUNTEN BARAT	PEMUDA HARAPAN	03/09/2015	188/05/435.413/2015		1
		130 AMBUNTEN TENGAH	CANDRA KIRANA	21/08/2015	900/04/435.313.102/2015		1
		131 AMBUNTEN TIMUR	PUTRA BAHARI	09/08/2015	900/04/435.313.103/2015		1
		132 TAMBAAGUNG BARAT	SUMBER KEMIRI	03/06/2015	02 TAHUN 2015		1
		133 TAMBAAGUNG TENGAH	MAHKOTA RAJA	24/08/2015	188/12/435.413/2015		1
		134 TAMBAAGUNG ARES	SUMBER PAYUNG	20/08/2015	900/04/435.313.106/2015		1
		135 SOGIAN	MITRA TANI	19/08/2015	188/01/435.413/2015		1
		136 KELES	SERDADU	11/04/2016	01 TAHUN 2016		1
		137 CAMPOR BARAT	AL BAROKAH	10/08/2015	188/09/435.413.112/2015		1
		138 CAMPOR TIMUR	NUSA INDAH	10/08/2015	900/04/435.313.112/2015		1
		139 BELLUK ARES	SAKINAH	20/08/2015	900/04/435.313.113/2015		1
		140 BELLUK KENEK	BUNGA TERATAI	24/08/2015	900/04/435.313.114/2015		1
		141 BELLUK RAJA	RIZQUNA	26/08/2015	188/04/435.413/2015		1
		142 TAMBAAGUNG TIMUR	JUNJUNG DERAJAT	07/07/1905	900/04/435.313.108/2015		1
		143 BUKABU	BUKABU JAYA	07/07/1905	900/04/435.313.109/2015		1
17	PASONGSONGAN	144 PASONGSONGAN	JAYA SAMUDRA	21/03/2016	02 TAHUN 2016		1
		145 PANAONGAN	BENTENG JAYA	19/03/2016	03 TAHUN 2016		1
		146 PADANGDANGAN	SUPER MANTAP	26/03/2016	05 TAHUN 2016		1

LAKIP DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA – Tahun 2017

BAB III Akuntabilitas Kinerja

NO	KECAMATAN	DESA	NAMA BUMDES	TANGGAL PENDIRIAN	PERDES/PERDES BERSAMA	STATUS	
						AKTIF	TIDAK
1	2	3	4	5	6	7	
		147 SODDARA	SODDARA PERMAI	26/03/2016	11 TAHUN 2016		1
		148 LEBBENG BARAT	KONROKON	25 JULI 2016	10 TAHUN 2016		1
		149 LEBBENG TIMUR	WAHANA SEJAHTERA	30/03/2016	06 TAHUN 2016		1
		150 R A J U N	BUNGA DAHLIA	31/03/2016	05 TAHUN 2016		1
		151 CAMPAKA	BUNGA DESA	28/03/2016	08 TAHUN 2016		1
		152 PRANCAK	PRANCAK MAKMUR	23/03/2016	05 TAHUN 2016		1
		153 MONTORNA	MONTORNA HADI	30/03/2016	08 TAHUN 2016		1
18	DASUK	154 DASUK BARAT	SUMBER REJEKI	12/08/2015	NOMOR 10 2015		1
		155 DASUK TIMUR	AL- FARA	12/08/2015	NOMOR 10 2015		1
		156 DASUK LAOK	PUTA MADURA	12/08/2015	NOMOR 10 2015		1
		157 SLOPENG	LEBAH MADU	11/08/2015	NOMOR 11 2015		1
		158 SEMAAN	MAJU JAYA	11/08/2015	NOMOR 11 2015		1
		159 BATU BELAH BARAT	GARUDA EMAS	10/08/2015	NOMOR 10 2015		1
		160 BATU BELAH TIMUR	MOGO JOYO	11/08/2015	NOMOR 10 2015		1
		161 KECER	SEJAHTERA	10/08/2015	NOMOR 10 2015		1
		162 BATES	PUTRA MAHKOTA	10/08/2015	NOMOR 10 2015		1
		163 BERINGIN	BERINGIN ANOM	13/08/2015	NOMOR 10 2015		1
		164 JELBUDEN	MEGA REMMENG	13/08/2015	NOMOR 10 2015		1
		165 KERTA BARAT	KERTAJAYA MAKMUR	15/08/2015	NOMOR 10 2015		1
		166 KERTA TIMUR	KERTA JAYA	15/08/2015	NOMOR 10 2015		1
		167 NYAPAR	NYAPAR JAYA	15/08/2015	NOMOR 10 2015		1
		168 MANTAJUN	SEJAHTERA	13/08/2015	NOMOR 10 2015		1
19	RUBARU	169 BUN BARAT	BUNGA ARUM	27/08/2015	03 TAHUN 2015		1
		170 KALEBENGAN	BERHASIL	31/08/2015	03 TAHUN 2015		1
		171 TAMBAK SARI	MEKAR SARI	24/08/2015	04 TAHUN 2015		1
		172 RUBARU	HARAPAN BARU	17/08/2015	03 TAHUN 2015		1
		173 BASOKA	JAYA ABADI	26/08/2015	04 TAHUN 2015		1
		174 DUKO	AIR TERJUN	27/08/2015	05 TAHUN 2015		1
		175 KARANG NANGKA	BUNGA SEROJA	26/08/2015	05 TAHUN 2015		1
		176 BANASARE	POTRE KONING	25/08/2015	03 TAHUN 2015		1
		177 MANDALA	AL MUBAROKAH	28/08/2015	04 TAHUN 2015		1
		178 MATANAIR	MAKMUR JAYA	25/08/2015	05 TAHUN 2015		1
		179 PAKONDANG	POJUR JAYA	16/05/2015	05 TAHUN 2015	1	

LAKIP DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA – Tahun 2017

BAB III Akuntabilitas Kinerja

NO	KECAMATAN	DESA	NAMA BUMDES	TANGGAL PENDIRIAN	PERDES/PERDES BERSAMA	STATUS	
						AKTIF	TIDAK
1	2	3	4	5	6	7	
20	GAYAM	180 NYAMPLONG	MAWAR	22/06/2015	2 TAHUN 2015		1
		181 GENDANG TIMUR	BUNGA TERATAI	19/06/2015	3 TAHUN 2015		1
		182 GENDANG BARAT	HARAPAN JAYA	04/02/2016	04 TAHUN 2016		1
21	NONGGUNONG	183 S O N O K	TIGA SAUDARA	05/02/2017	PERDES NO. 05 TH 2017		1
22	RAAS	184 GUWA-GUWA	KARAENG MANDIRI	31/01/2017	PERDES NO. 12 TAHUN 2017	1	
23	SAPEKEN						
24	MASALEMBU	185 KRAMIAN	CAHAYA BARU	31/12/2016	NO : 03 TAHUN 2017	1	
		186 SUKA JERUK	LENTERA RAKYAT	01/10/2017	NO : 01 TAHUN 2017	1	
		187 MASAKAMBING	AL AMIEN	31/12/2016	NO : 03 TAHUN 2017	1	
25	ARJASA	188 KALIKATAK	MARIMBUNA JAYA		01 TAHUN 2016		1
		189 ARJASA	PKK		02 TAHUN 2015		1
		190 LAOK JANG JANG	AZZAHRA		01 TAHUN 2016		1
		191 KALISANGKA	PKK		01 TAHUN 2016		1
		192 ANGKATAN	BUNGA TANJUNG		03 TAHUN 2015		1
		193 PAJENANGGER	CINTA RASA	10/11/2015	02 TAHUN 2015		1
		194 SAWAH SUMUR	MUSLIMAH	01/02/2015	01 TAHUN 2015		1
26	BATUAN	195 BATUAN	BATU PERMATA	27/07/2015	07 TAHUN 2016	1	
		196 GEDUNGAN	SUMBER MAKMUR	31/07/2015	03 TAHUN 2015		1
		197 BABBALAN	SRI REJEKI	30/07/2015	10 TAHUN 2015		1
		198 PATEAN	AL-BAROKA	28/07/2015	02 TAHUN 2015		1
		199 GUNGGUNG	AGUNG PUTRA	10/07/2015	03 TAHUN 2016	1	
27	KANGAYAN	200 DAANDUNG	PANTURA JAYA	17/12/2016	NOMOR 03 TAHUN 2016		1
		201 TIMUR JANG JANG	TARBIYATUS SHOLAH	26/12/2016	NOMOR 03 TAHUN 2016		1
JUMLAH						56	145

Sumber Data : Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Tahun 2017

5) Jumlah Posyantek yang berfungsi

Indikator ini menunjukkan Jumlah Posyantek yang dibentuk dan berfungsi pada tahun 2017. Pada tahun 2017 ditargetkan bahwa pembentukan posyantek dan berfungsinya posyantek sebanyak 5 Kecamatan, pada tahun 2017 Posyantek yang berfungsi masih belum terealisasi sehingga capaian kinerjanya tidak bisa diukur. Tidak tercapainya capaian kinerja tersebut dikarenakan kurang maksimalnya dalam melaksanakan kegiatan khususnya dalam melakukan rencana tindaklanjut terhadap kegiatan yang dilakukan.

6) Jumlah LPM (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat) yang aktif

Jumlah desa yang sudah mengikuti sosialisasi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat pada tahun 2015 sebanyak 248 Desa di 18 Kecamatan wilayah daratan dan untuk kepulauan sebanyak 86 Desa, dari total 248 Desa yang sudah membentuk dan tertuang dalam Peraturan Desa sebanyak 170 Desa untuk wilayah Daratan dan untuk wilayah kepulauan sebanyak 8 Desa, pada tahun 2017 ditargetkan untuk 34 Desa, namun seiring dengan berjalannya sosialisasi yang berhasil pada Tahun 2017, target yang semula hanya untuk 34 Desa dinaikkan menjadi 187 Desa. Dengan Target tersebut terealisasi sebanyak 187 Desa sehingga capaian kinerja pada tahun 2017 sebesar 100 % dari target.

Pada Tahun 2017 LPM yang terbentuk sebanyak 187 Desa, apabila dibandingkan dengan Target akhir Renstra bahwa untuk LPM yang terbentuk 55,99 % dari target yang akan dicapai sebesar 334 Desa.

DATA LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA**Periode Tahun 2017**

NO.	KECAMATAN	DESA	NOMOR SK	TANGGAL
1	2	3	4	5
1	BATANG BATANG	1. Totosan	188/02/KEP/435.417.105/2015	15/02/2015
		2. Banuaju Barat	188/03/KEP/435.417.106/2015	09/02/2015
		3. Banuaju Timur	188/01/KEP/435.417.107/2015	23/02/2015
		4. Jenangger	188/02/KEP/435.417.108/2015	27/02/2015
		5. Nyabakan Timur	188/02/KEP/435.417.109/2015	27/02/2015
		6. Nyabakan Barat	188/03/KEP/435.417.110/2015	26/02/2015
		7. Lombang	188/02/KEP/435.417.116/2015	10/02/2015
		8. Bilangan	188/03/KEP/435.417.115/2015	27/02/2015
		9. Dapenda	188/04/KEP/435.417.114/2015	28/02/2015
		10. Legung Timur	188/03/KEP/435.417.113/2015	18/02/2015
		11. Batang Batang Laok	188/02/KEP/435.417.101/2015	27/02/2015

LAKIP DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA – Tahun 2017

BAB III Akuntabilitas Kinerja

NO.	KECAMATAN	DESA	NOMOR SK	TANGGAL
1	2	3	4	5
		12. Batang Batang Daya	188/02/KEP/435.417.102/2015	27/02/2015
		13. Kolpo	188/03/KEP/435.417.103/2015	10/02/2015
		14. Tamidung	188/03/KEP/435.417.104/2015	09/03/2015
		15. Jangkong	188/02/KEP/435.417.111/2015	27/02/2015
		16. Legung Barat	188/02/KEP/435.417.112/2015	23/02/2015
2	BATUPUTIH	1. Batuputih Kenek	188/01/KEP/435.418.101/2015	29/04/2015
		2. Batuputih Laok	188/01/KEP/435.418.102/2015	21/04/2015
		3. Batuputih Daya	188/02/KEP/435.418.103/2015	21/04/2015
		5. Tenedan	188/01/KEP/435.418.105/2015	21/04/2015
		6. Juruan Laok	188/16/KEP/435.418.106/2015	23/04/2015
		8. Badur	188/04/KEP/435.418.107/2015	21/04/2015
		9. Gedang Gedang	188/01/KEP/435.418.109/2015	16/04/2015
		10. Bantelan	188/03/KEP/435.418.110/2015	21/04/2015
		11. Larangan Barma	188/01/KEP/435.418.111/2015	21/04/2015
		12. Larangan Kerta	188/01/KEP/435.418.112/2015	21/04/2015
		13. Bullaan	188/01/KEP/435.418.113/2015	21/04/2015
		14. Sergang	188/01/KEP/435.418.114/2015	03/03/2015
3	GANDING	1. Ganding	188/159/KEP/435.411.101/2015	MEI 2015
		2. Billapora Barat	188/03/KEP/435.411.101/2015	04/05/2015
		3. Ketawang Daleman	188/05/KEP/435.411.113/2015	01/06/2015
		4. Ketawang Larangan	188/03/KEP/435.411.111/2015	01/06/2015
		5. Ketawang Karay	188/03/KEP/435.411.114/2015	09/04/2015
		6. Gadu Timur	188//KEP/435.411.109/2015	02/06/2015
		7. Rombiya Timur	188/02/KEP/435.411.105/2015	18/05/2015
		8. Billapora Timur	188/08/KEP/435.411.108/2015	04/05/2015
		9. Rombiya Barat	188/04/KEP/435.411.104/2015	19/04/2015
		10. Gadu Barat	188/27/KEP/435.411.110/2015	
		11. Talaga	188/08/KEP/435.411.106/2015	04/05/2015
		12. Bataal Timur	188/5/KEP/435.411.103/2015	07/05/2015
		13. Bataal Barat	188/24/KEP/435.411.102/2015	23/04/2015
		14. Ketawang Parebaan	188/04/KEP/435.411.112/2015	11/04/2015
4	GULUK GULUK	1. Bragung	188/07/KEP/435.416.107/2015	20/04/2015
		2. Guluk Guluk	188/07/KEP/435.410.101/2015	20/04/2015
		3. Bakeong	188/07/KEP/435.410.102/2015	20/04/2015
		4. Payudan Dundang	188/04/KEP/435.410.103/2015	20/04/2015
		5. Pordapor	188/05/KEP/435.410.104/2015	20/04/2015
		6. Ketawang Laok	188/04/KEP/435.410.105/2015	20/04/2015
		7. Pananggungan	188/06/KEP/435.410.106/2015	20/04/2015
		8. Tambuko	188/07/KEP/435.410.109/2015	20/04/2015
		9. Payudan Nangger	188/07/KEP/435.410.109/2015	20/04/2015
		10. Payudan Daleman	188/05/KEP/435.410.110/2015	20/04/2015
		11. Payudan Karangsokon	188/07/KEP/435.410.111/2015	20/04/2015
		12. Batuampar	188/07/KEP/435.410.112/2015	20/04/2015
5	RUBARU	1. Rubaru	188/02/KEP/435.406.101/2015	22/04/2015
		2. Mandala	188/02/KEP/435.406.102/2015	27/04/2015

LAKIP DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA – Tahun 2017

BAB III Akuntabilitas Kinerja

NO.	KECAMATAN	DESA	NOMOR SK	TANGGAL
1	2	3	4	5
		3. Pakondang	188/01/KEP/435.406.103/2015	22/04/2015
		4. Matanair	188/02/KEP/435.416.401/2015	18/04/2015
		5. Tambaksari	188/02/KEP/435.416.105/2015	21/04/2015
		6. Banasare	188/02/KEP/435.416.106/2015	23/04/2015
		7. Bunbarat	188/02/KEP/435.416.107/2015	28/04/2015
		8. Karangnangka	188/02/KEP/435.416.108/2015	29/04/2015
		9. Basoka	188/02/KEP/435.416.109/2015	30/04/2015
		10. Duko	188/02/KEP/435.416.110/2015	24/04/2015
		11. Kalebengan	188/02/KEP/435.416.111/2015	20/04/2015
6	BLUTO	1. Sera Barat	188/05/KEP/435.406.115/2015	15/04/2015
		2. Pakandangan Tengah	188/05/KEP/435.406.105/2015	15/04/2015
		3. Kapedi	188/05/KEP/435.406.103/2015	15/04/2015
		4. Cempaka	188/06/KEP/435.406.114/2015	15/04/2015
		5. Errabu	188/03/KEP/435.406.119/2015	15/04/2015
		6. Palongan	188/03/KEP/435.406.112/2015	15/04/2015
		7. Sera Tengah	188/04/KEP/435.406.116/2015	15/04/2015
		8. Ging Ging	188/05/KEP/435.406.118/2015	15/04/2015
		9. Guluk Manjung	188/04/KEP/435.406.102/2015	15/04/2015
		10. Aengbaja Kenek	188/06/KEP/435.406.108/2015	15/04/2015
		11. Masaran	188/04/KEP/435.406.111/2015	15/04/2015
		12. Pakandangan Barat	188/04/KEP/435.406.104/2015	15/04/2015
		13. Aengbaja Raja	188/09/KEP/435.406.113/2015	15/04/2015
		14. Pakandangan Sangra	188/08/KEP/435.406.106/2015	15/04/2015
		15. Sera Timur	188/04/KEP/435.406.117/2015	15/04/2015
		16. Gilang	188/04/KEP/435.406.120/2015	15/04/2015
		17. Lobuk	188/04/KEP/435.406.109/2015	15/04/2015
		18. Bluto	188/10/KEP/435.406.101/2015	15/04/2015
		19. Bluto	188/15/KEP/435.406.110/2015	15/04/2015
		20. Aengdake	188/04/KEP/435.406.107/2015	15/04/2015
7	PASONGSONGAN	1. Montoma	188/03/435.414.102.2015	22/04/2015
		2. Lebeng Timur	188/04/435.414.106/2015	23/04/2015
		3. Rajun	188/06/435.414.105/2015	20/04/2015
		4. Prancak	188/04/435.414.103/2015	22/04/2015
		5. Campaka	188/04/435.414.104/2015	20/04/2015
		6. Padangdangan	188/02/435.414.109/2015	21/04/2015
		7. Soddara	188/03/435.414.108/2015	21/04/2015
		8. Lebeng Barat	188/02/435.414.107/2015	22/04/2015
		9. Panaongan	188/04/435.414.110/2015	22/04/2015
		10. Pasongsongan	188/02/435.414.101/2015	22/04/2015
8	GILIGENTING	1. Galis	188/01/KEP/435.409.101/2015	
		2. Gedugan	188/03/KEP/435.409.102/2015	
		3. Bringsang	188/05/KEP/435.409.103/2015	
		4. Aeng Anyar	188/24/KEP/435.409.104/2015	
		5. Lombang	188/04/KEP/435.409.105/2015	
		6. Jate	188/46/KEP/435.409.106/2015	

LAKIP DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA – Tahun 2017

BAB III Akuntabilitas Kinerja

NO.	KECAMATAN	DESA	NOMOR SK	TANGGAL
1	2	3	4	5
		7. Ban Baru	188/03/KEP/435.409.107/2015	
		8. Ban Maleng	188/01/KEP/435.409.108/2015	
9	PRAGAAN	1. Pragaan Laok	188/05/KEP/435.412.101/2015	
		2. Pragaan Daya	188/23/KEP/435.412.102/2015	
		3. Kaduara Timur	188/02/KEP/435.412.103/2015	
		4. Sendang	188/04/KEP/435.412.104/2015	
		5. Rombasa	188/04/KEP/435.412.105/2015	
		6. Sentol Laok	188/02/KEP/435.412.106/2015	
		7. Larangan Perreng	188/04/KEP/435.412.107/2015	
		8. Sentol Daya	188/03/KEP/435.412.108/2015	
		9. Pakamban Daya	188/03/KEP/435.412.109/2015	
		10. Pakamban Laok	188/06/KEP/435.412.110/2015	
		11. Jaddung	188/01/KEP/435.412.111/2015	
		12. Prenduan	188/04/KEP/435.412.112/2015	
		13. Aeng Panas	188/06/KEP/435.412.113/2015	
		14. Karduluk	188/03/KEP/435.412.114/2015	
10	MANDING	1. Gunung Gembar	188/04/KEP/435.404.110/2015	12/01/2015
		2. Tenonan	188/05/KEP/435.404.106/2015	
		3. Manding Laok	188/09/KEP/435.404.101/2015	12/01/2015
		4. Manding Daya	188/01/KEP/435.404.103/2015	12/01/2015
		5. Kasengan	188/01/KEP/435.404.104/2015	12/01/2015
		6. Ganding	188/02/KEP/435.404.108/2015	12/01/2015
		7. Jabaan	188/05/KEP/435.404.111/2015	12/01/2015
		8. Giring	188/03/KEP/435.404.109/2015	
		9. Lanjuk	188/05/KEP/435.404.103/2015	12/01/2015
		10. Manding Timur	188/02/KEP/435.404.102/2015	03/04/2105
		11. Lalangon	188/03/KEP/435.404.105/2015	12/01/2015
11	GAPURA	1. Gersik Putih	188/01/KEP/435.420.108/2015	22/04/2015
		2. Karang Budi	188/07/KEP/435.420.108/2015	27/04/2015
		3. Mandala	188/02/KEP/435.420.107/2015	20/04/2015
		4. Gapura Barat	188/02/KEP/435.420.103/2015	20/04/2015
		5. Banjar Timur	188/02/KEP/435.420.111/2015	28/04/2015
		6. Panagan	188/06/KEP/435.420.109/2015	28/04/2015
		7. Longos	188/02/KEP/435.420.105/2015	28/04/2015
		8. Gapura Tengah	188/03/KEP/435.420.112/2015	06/05/2015
		9. Batudinding	188/42/KEP/435.420.113/2015	28/04/2015
		10. Palokloan	188/03/KEP/435.420.110/2015	05/05/2015
		11. Poja	188/04/KEP/435.420.117/2015	
		12. Baban	188/72/KEP/435.420.114/2015	07/05/2015
		13. Gapura Timur	188/03/KEP/435.420.101/2015	12/05/2015
		14. Banjar Barat	188/03/KEP/435.420.112/2015	27/04/2015
		15. Braji	188/04/KEP/435.420.116/2015	15/04/2015
		16. Grujugan	188/03/KEP/435.420.104/2015	
		17. Andulang	188/04/KEP/435.420.106/2015	10/05/2015
12	LENTENG	1. Moncek Tengah		

LAKIP DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA – Tahun 2017

BAB III Akuntabilitas Kinerja

NO.	KECAMATAN	DESA	NOMOR SK	TANGGAL
1	2	3	4	5
		2. Lembung Barat		
		3. Lembung Timur		
		4. Moncek Barat		
		5. Lenteng Timur		
		6. Sendir		
		7. Banaresep Timur		
		8. Jambu		
		9. Meddelan		
		10. Billapora Rebba		
		11. Ellak Daya		
		12. Lenteng Barat		
		13. Kambangan Barat		
		14. Cangkreng		
		15. Daramista		
		16. Ellak Laok		
		17. Moncek Timur		
		18. Tarogan		
		19. Poreh		
		20. Banaresep Barat		
13	BATUAN	1. Gung-Gung	188/06/435.402.106/2013	
		2. Gung-Gung		
		3. Patean		
		4. Gedungan		
		5. Torbang	188/18/VII/435.402.102/2013	
		6. Gelugur		
		7. Batuan	188/17/KEP/435.402.101/2015	
		8. Babbalan		
14	DUNGKEK	1. Bungin-Bungin	188/16/KEP/435.419.110/2015	29/04/2015
		2. Romben Rana	188/03/KEP/435.419.105/2015	21/04/2015
		3. Roben Barat	188/05/KEP/435.419.104/2015	20/04/2015
		4. Candi	188/30/KEP/435.419.102/2015	15/04/2015
		5. Bunpenang	188/12/KEP/435.419.109/2015	28/04/2015
		6. Lapa Laok	188/06/KEP/435.419.112/2015	04/05/2015
		7. Romben Guna	188/02/KEP/435.419.106/2015	22/04/2015
		8. Dungkek	188/15/KEP/435.419.101/2015	14/04/2015
		9. Bicabbi	188/02/KEP/435.419.108/2015	27/04/2015
		10. Tamansare	188/21/KEP/435.419.107/2015	23/04/2015
		11. Bancamara	188/03/KEP/435.419.114/2015	06/05/2015
		12. Jadung	188/04/KEP/435.419.103/2015	16/04/2015

Sumber Data : Bidang Pengembangan Masyarakat Tahun 2017

7) Persentase Jumlah KPM (Kader Pemberdayaan Masyarakat) yang aktif

Sampai dengan Tahun 2017 telah terbentuk Kader Pemberdayaan Masyarakat (KPM) sebanyak 5 Orang Perdesa dengan jumlah 890 Kader yang sudah tertuang masing-masing dalam Surat Keputusan Kepala Desa.

Target pada Tahun 2017 Jumlah Kader Pemberdayaan Masyarakat sebesar 46,64% atau sebanyak 778 Kader, akan tetapi sampai dengan tahun 2017 jumlah kader sebesar 870 Kader atau 53,29 %. Sehingga capaian realisasinya adalah sebesar 114,26 %. Apabila dibandingkan dengan target akhir renstra Realisasi Capaian sampai dengan Tahun 2017 sebesar 53,29%. Keberhasilan ini ditunjang adanya kesadaran dari pemerintah desa khususnya Kepala Desa bahwa Kader Pemberdayaan Masyarakat yang merupakan mitra dalam melaksanakan proses perencanaan pembangunan didesa dan diharapkan untuk tahun yang akan datang akan semakin meningkat.

**DATA KADER PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA (KPM)
TAHUN 2017**

NO.	KECAMATAN	DESA	NOMOR SK	TANGGAL
1	2	3	4	5
1.	BATANG BATANG	1. Totosan	188/03/KEP/435.417.105/2015	15 PEBRUARI 2015
		2. Banuaju Barat	188/05/KEP/435.417.106/2015	9 PEBRUARI 2015
		3. Banuaju Timur	188/03/KEP/435.417.107/2015	23 PEBRUARI 2015
		4. Jenangger	188/03/KEP/435.417.108/2015	27 PEBRUARI 2015
		5. Nyabakan Timur	188/03/KEP/435.417.109/2015	27 PEBRUARI 2015
		6. Nyabakan Barat	188/04/KEP/435.417.110/2015	26 PEBRUARI 2015
		7. Lombang	188/03/KEP/435.417.116/2015	10 PEBRUARI 2015
		8. Bilangan	188/03/KEP/435.417.115/2015	27 PEBRUARI 2015
		9. Dapenda	188/05/KEP/435.417.114/2015	28 PEBRUARI 2015
		10. Legung Timur	188/04/KEP/435.417.113/2015	18 PEBRUARI 2015
		11. Batang Batang Laok	188/03/KEP/435.417.101/2015	27 PEBRUARI 2015
		12. Batang Batang Daya	188/03/KEP/435.417.102/2015	27 PEBRUARI 2015
		13. Kolpo	188/03/KEP/435.417.103/2015	10 PEBRUARI 2015
		14. Tamidung	188/04/KEP/435.417.104/2015	9 MARET 2015
		15. Jangkong	188/03/KEP/435.417.111/2015	27 PEBRUARI 2015
		16. Legung Barat	188/03/KEP/435.417.112/2015	23 PEBRUARI 2015
2	BATUPUTIH	1. Batuputih Kenek	188/02/KEP/435.418.101/2015	21 APRIL 2015
		2. Batuputih Laok	188/02/KEP/435.418.102/2015	21 APRIL 2015
		3. Batuputih Daya	188/03/KEP/435.418.103/2015	21 APRIL 2015
		4. Aengmerah	188/02/KEP/435.418.104/2015	21 APRIL 2015
		5. Tengedan	188/02/KEP/435.418.105/2015	21 APRIL 2015

LAKIP DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA – Tahun 2017

BAB III Akuntabilitas Kinerja

NO.	KECAMATAN	DESA	NOMOR SK	TANGGAL
1	2	3	4	5
		6. Juruan Laok	188/17/KEP/435.418.106/2015	21 APRIL 2015
		7. Juruan Daya	188/05/KEP/435.418.107/2015	21 APRIL 2015
		8. Badur	188/07/KEP/435.418.108/2015	21 APRIL 2015
		9. Gedang Gedang	188/02/KEP/435.418.109/2015	16 MARET 2015
		10. Bantelan	188/04/KEP/435.418.110/2015	21 APRIL 2015
		11. Larangan Barma	188/02/KEP/435.418.111/2015	21 APRIL 2015
		12. Larangan Kerta	188/02/KEP/435.418.112/2015	21 APRIL 2015
		13. Bulla'an	188/02/KEP/435.418.113/2015	21 APRIL 2015
		14. Sergang	188/02/KEP/435.418.114/2015	16 MARET 2015
3	GANDING	1. Ganding	188/159/KEP/435.411.101/2015	MEI 2015
		2. Billapora Barat	188/03/KEP/435.411.101/2015	4 MEI 2015
		3. Ketawang Daleman	188//KEP/435.411.114/2015	1 JUNI 2015
		4. Ketawang Larangan	188/02/KEP/435.411.111/2015	1 JUNI 2015
		5. Gadu Timur	188//KEP/435.411.109/2015	2 JUNI 2015
		6. Rombiya Timur	188/03/KEP/435.411.105/2015	18 MEI 2015
		7. Billapora Timur	188/07/KEP/435.411.108/2015	4 MEI 2015
		8. Ketawang Karay	188/04/KEP/435.411.114/2015	13 APRIL 2015
		9. Rombiya Barat	188/03/KEP/435.411.104/2015	13 APRIL 2015
		10. Gadu Barat	188/26/KEP/435.411.110/2015	
		11. Talaga	188/07/KEP/435.411.106/2015	4 MEI 2015
		12. Bataal Timur	188/4/KEP/435.411.103/2015	7 MEI 2015
		13. Bataal Barat	188/24/KEP/435.411.102/2015	23 APRIL 2015
		14. Ketawang Parebaan	188/05/KEP/435.411.112/2015	11 APRIL 2015
4	GULUK GULUK	1. Bragung	188/07/KEP/435.416.107/2015	20 APRIL 2015
		2. Guluk Guluk	188/06/KEP/435.410.101/2015	20 APRIL 2015
		3. Bakeong	188/06/KEP/435.410.102/2015	20 APRIL 2015
		4. Payudan Dundang	188/04/KEP/435.410.103/2015	20 APRIL 2015
		5. Pordapor	188/04/KEP/435.410.104/2015	20 APRIL 2015
		6. Ketawang Laok	188/03/KEP/435.410.105/2015	20 APRIL 2015
		7. Pananggungan	188/05/KEP/435.410.106/2015	20 APRIL 2015
		8. Tambuko	188/06/KEP/435.410.109/2015	20 APRIL 2015
		9. Payudan Nangger	188/06/KEP/435.410.109/2015	20 APRIL 2015
		10. Payudan Daleman	188/04/KEP/435.410.110/2015	20 APRIL 2015
		11. Payudan Karangson	188/06/KEP/435.410.111/2015	20 APRIL 2015
		12. Batuampar	188/06/KEP/435.410.111/2015	20 APRIL 2015
5	RUBARU	1. Rubaru	188/03/KEP/435.406.101/2015	22 APRIL 2015
		2. Mandala	188/03/KEP/435.406.102/2015	27 APRIL 2015
		3. Pakondang	188/02/KEP/435.406.103/2015	22 APRIL 2015
		4. Matanair	188/01/KEP/435.416.104/2015	18 APRIL 2015
		5. Tambaksari	188/03/KEP/435.416.105/2015	21 APRIL 2015
		6. Banasare	188/03/KEP/435.416.106/2015	23 APRIL 2015
		7. Bunbarat	188/02/KEP/435.416.107/2015	28 APRIL 2015
		8. Karangangka	188/03/KEP/435.416.108/2015	29 APRIL 2015
		9. Basoka	188/03/KEP/435.416.109/2015	30 APRIL 2015
		10. Duko	188/03/KEP/435.416.110/2015	24 APRIL 2015

LAKIP DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA – Tahun 2017

BAB III Akuntabilitas Kinerja

NO.	KECAMATAN	DESA	NOMOR SK	TANGGAL
1	2	3	4	5
		11. Kalebengan	188/02/KEP/435.416.111/2015	20 APRIL 2015
6	BLUTO	1. Sera Barat	188/04/KEP/435.406.115/2015	15 APRIL 2015
		2. Pakandangan Tengah	188/06/KEP/435.406.105/2015	15 APRIL 2015
		3. Kapedi	188/04/KEP/435.406.103/2015	15 APRIL 2015
		4. Cempaka	188/07/KEP/435.406.114/2015	15 APRIL 2015
		5. Errabu	188/04/KEP/435.406.119/2015	15 APRIL 2015
		6. Palongan	188/04/KEP/435.406.112/2015	15 APRIL 2015
		7. Sera Tengah	188/05/KEP/435.406.116/2015	15 APRIL 2015
		8. Ging Ging	188/06/KEP/435.406.118/2015	15 APRIL 2015
		9. Guluk Manjung	188/05/KEP/435.406.102/2015	15 APRIL 2015
		10. Aengbaja Kenek	188/07/KEP/435.406.108/2015	15 APRIL 2015
		11. Masaran	188/05/KEP/435.406.111/2015	15 APRIL 2015
		12. Pakandangan Barat	188/05/KEP/435.406.104/2015	15 APRIL 2015
		13. Aengbaja Raja	188/10/KEP/435.406.113/2015	15 APRIL 2015
		14. Pakandangan Sangra	188/09/KEP/435.406.106/2015	15 APRIL 2015
		15. Sera Timur	188/05/KEP/435.406.117/2015	15 APRIL 2015
		16. Gilang	188/04/KEP/435.406.120/2015	15 APRIL 2015
		17. Lobuk	188/05/KEP/435.406.109/2015	15 APRIL 2015
		18. Bluto	188/11/KEP/435.406.101/2015	15 APRIL 2015
		19. Bluto	188/16/KEP/435.406.110/2015	15 APRIL 2015
		20. Aengdake	188/05/KEP/435.406.107/2015	15 APRIL 2015
6	PASONGSONGAN	1. Lebeng Timur	188/03/435.414.106/2015	23 APRIL 2015
		2. Rajun	188/05/435.414.105/2015	20 APRIL 2015
		3. Prancak	188/03/435.414.103/2015	22 APRIL 2015
		4. Campaka	188/03/435.414.104/2015	20 APRIL 2015
		5. Padangdangan	188/01/435.414.109/2015	21 APRIL 2015
		6. Soddara	188/02/435.414.108/2015	21 APRIL 2015
		7. Lebang Barat	188/03/435.414.107/2015	21 APRIL 2015
		8. Panaongan	188/03/KEP/435.414.110/2015	22 APRIL 2015
		9. Pasongsongan	188/01/KEP/435.414.101/2015	22 APRIL 2015
		10. Montorna	188/02/KEP/435.414.102/2015	22 APRIL 2015
7	GILIGENTING	1. Galis	188/03/KEP/435.409.101/2015	
		2. Gedugan	188/04/KEP/435.409.102/2015	
		3. Bringsang	188/06/KEP/435.409.103/2015	
		4. Aeng Anyar	188/09/KEP/435.409.104/2015	
		5. Lombang	188/05/KEP/435.409.105/2015	
		6. Ban Baru	188/06/KEP/435.409.106/2015	
		7. Jate	188/48/KEP/435.409.106/2015	
		8. Ban Maleng	188/48/KEP/435.409.108/2015	
8	PRAGAAN	1. Pragaan Laok	188/06/KEP/435.412.101/2015	
		2. Pragaan Daya	188/24/KEP/435.412.102/2015	
		3. Kaduara Timur	188/03/KEP/435.412.103/2015	
		4. Sendang	188/05/KEP/435.412.104/2015	
		5. Rombasan	188/05/KEP/435.412.105/2015	
		6. Sentol Laok	188/03/KEP/435.412.106/2015	

LAKIP DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA – Tahun 2017

BAB III Akuntabilitas Kinerja

NO.	KECAMATAN	DESA	NOMOR SK	TANGGAL
1	2	3	4	5
		7. Larangan Perreng	188/05/KEP/435.412/107/2015	
		8. Sentol Daya	188/04/KEP/435.412.108/2015	
		9. Pakamban Daya	188/04/KEP/435.412.109/2015	
		10. Pakamban Laok	188/05/KEP/435.412.110/2015	
		11. Jaddung	188/02/KEP/435.412.111/2015	
		12. Prenduan	188/05/KEP/435.412.112/2015	
		13. Aeng Panas	188/07/KEP/435.412.113/2015	
		14. Karduluk	18802/KEP/435.412.114/2015	
9	MANDING	1. Gunung Gembar	188/04/ KEP/435.404.110/2015	
		2. Tenonen	188/01/KEP/435.404.106/2015	
		3. Manding Laok	188/10/KEP/435.404.101/2015	
		4. Manding Daya	188/01/KEP/435.404.103/2015	
		5. Kasengan	188/03/KEP/435.404.102/2015	
		6. Ganding	188/01/KEP/435.404.108/2015	
		7. Jaba'an	188/05/KEP/435.404.111/2015	
		8. Giring	188/03/KEP/435.404.109/2015	
		9. Lanjuk	188/05/KEP/435.404.103/2015	
		10. Manding Timur	188/03/KEP/435.404.102/2015	
		11. Lalangon	188/03/KEP/435.404.105/2015	
10	DUNGKEK	1. Candi	188/29/KEP/435.419.102/2015	15 APRIL 2015
		2. Romben Guna	188/03/KEP/435.419.106/2015	23 APRIL 2015
		3. Romben Rana	188/02/KEP/435.419.105/2015	21 APRIL 2015
		4. Romben Barat	188/04/KEP/435.419.104/2015	20 APRIL 2015
11	LENTENG	1. Moncek Tengah		
		2. Lembung Barat		
		3. Lembung Timur		
		4. Moncek Barat		
		5. Lenteng Timur		
		6. Sendir		
		7. Banaresep Timur		
		8. Jambu		
		9. Meddelan		
		10. Billapora Rebba		
		11. Ellak Daya		
		12. Lenteng Barat		
		13. Kambingan Barat		
		14. Cangkreng		
		15. Daramista		
		16. Ellak Laok		
		17. Moncek Timur		
		18. Tarogan		
		19. Poreh		
		20. Banaresep Barat		
12	BATUAN	1. Gung Gung		
		2. Patean		

NO.	KECAMATAN	DESA	NOMOR SK	TANGGAL
1	2	3	4	5
		3. Gedungan		
		4. Torbang	188/19/KEP/435.402.102/2013	
		5. Gelugur		
		6. Batuan		
		7. Babbalan		
13	GAPURA	1. Gersik Putih	188/01/KEP/435.420.108/2015	22 APRIL 2015
		2. Karang Budi	188/06/KEP/435.420.115/2015	27 APRIL 2015
		3. Mandala	188/01/KEP/435.420.107/2015	20 APRIL 2015
		4. Gapura Barat	188/01/KEP/435.420.103/2015	20 APRIL 2015
		5. Banjar Timur	188/03/KEP/435.420.111/2015	28 APRIL 2015
		6. Panagan	188/05/KEP/435.420.109/2015	28 APRIL 2015
		7. Longos	188/01/KEP/435.420.105/2015	28 APRIL 2015
		8. Gapura Tengah	188/02/KEP/435.420.112/2015	06 MEI 2015
		9. Batudinding	188/45/KEP/435.420.113/2015	28 APRIL 2015
		10. Palokloan	188/02/KEP/435.420.110/2015	05 MEI 2015
		11. Poja	188/03/KEP/435.420.117/2015	
		12. Baban	188/71/KEP/435.420.114/2015	07 MEI 2015
		13. Gapura Timur	188/03/KEP/435.420.101/2015	12 MEI 2015
		14. Banjar Barat	188/04/KEP/435.420.112/2015	27 APRIL 2015
		15. Braji	188/08/KEP/435.420.116/2015	15 APRIL 2015
		16. Grujugan	188/02/KEP/435.420.104/2015	
		17. Andulang	188/03/KEP/435.420.106/2015	10 MEI 2015

Sumber Data : Bidang Pengembangan Masyarakat Tahun 2017

e. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Dalam mengukur Analisis Atas Efisiensi penggunaan Sumber Daya dilakukan evaluasi lanjutan dalam bentuk tabel sebagai berikut :

COST PER OUTCOME

Alokasi Per Sasaran Pembangunan

	Sasaran Strategis	Indikator	Anggaran	% Anggaran
I.	Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Ekonomi, Sarana dan Prasarana Dasar Masyarakat	Rasio Elektrifikasi	7.567.262.378	60,63
		Jumlah Posyanteg yang berfungsi	197.000.000	1,58
		Jumlah LPM (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat) yang Aktif	2.671.152.200	21,40

Sasaran Strategis		Indikator	Anggaran	% Anggaran
		Jumlah KPM (Kader Pemberdayaan Masyarakat yang Aktif		
II.	Meningkatnya Tata Laksana Pemerintahan Desa yang Baik	Jumlah BUMDes	250.000.000	2,00
		% Peningkatan Dana Keswadayaan Masyarakat dalam Pembangunan Desa	335.000.000	2,68
		% Desa yang tertib Administrasi	1.460.261.500	11,70

Tabel Pencapaian Kinerja dan Anggaran

Sasaran / Program	Indikator	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	% Capaian	Alokasi	Realisasi	% Capaian
I. Bertambahnya Sarana Kelistrikan Pemukiman Daerah Terpencil dan Kepulauan	% RT yang menggunakan Energi Listrik	61,97	61,97	100	7.567.262.378	7.057.646.250	93,27
1. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan							
II. Terlaksananya Pendayagunaan TTG bagi Usaha Kecil dan Menengah (UKM)	Prosentase UKM yang dibina dalam pendayagunaan TTG	13 Pokmas	13 Pokmas	100	197.000.000	160.192.270	81,32
1. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan							
III. Terlaksananya Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Masyarakat	Jumlah Desa yang difasilitasi dalam Penataan dan Pengembangan Lembaga kemasyarakatan	330 Desa	330 Desa	100	2.671.152.200	1.877.560.030	70,29
1. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan							
IV. Terlaksananya Pemberdayaan Lembaga Ekonomi Masyarakat	Jumlah BUMDes yang berkembang	19 Desa	19 Desa	100	250.000.000	230.604.000	92,24
1. Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan							

Sasaran / Program	Indikator	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	% Capaian	Alokasi	Realisasi	% Capaian
V. Terlaksananya Peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan	3 Kegiatan	3 Kegiatan	100	335.000.000	267.119.500	79,74
1. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa							
VI. Terlaksananya Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Desa yang Baik	Jumlah Desa yang dibina dalam Tata Kelola Pemerintahan Desa yang Baik	330 Desa	330 Desa	100	1.460.261.500	1.087.656.800	74,48
1. Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa							

Tabel Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Sasaran Program	Indikator	Kinerja	Anggaran	Efisiensi
		% Capaian	% Capaian	%
I. Bertambahnya Sarana Kelistrikan Pemukiman Daerah Terpencil dan Kepulauan	% RT yang menggunakan Energi Listrik	100	93,27	6,73
II. Terlaksananya Pendayagunaan TGT bagi Usaha Kecil dan Menengah (UKM)	Prosentase UKM yang dibina dalam pendayagunaan TGT	100	81,32	18,68
III. Terlaksananya Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Kelenbagaan Masyarakat	Jumlah Desa yang difasilitasi dalam Penataan dan Pengembangan Lembaga kemasyarakatan	100	70,29	29,71
IV. Terlaksananya Pemberdayaan Lembaga Ekonomi Masyarakat	BUMDes yang berkembang	100	92,24	7,76
V. Terlaksananya Peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan	100	79,74	20,26
VI. Terlaksananya Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Desa yang Baik	Jumlah Desa yang dibina dalam Tata Kelola Pemerintahan Desa yang Baik	100	74,48	25,52

f. Analisis Program / Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Program dan kegiatan penunjang keberhasilan capaian target kinerja tidak terlepas dari sistem perencanaan yang membreakdown dari target kinerja sasaran yang ingin dicapai, adapun program dan kegiatan dimaksud adalah :

1. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan

- 1) Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Teknis dan Masyarakat
 - ✓ Output / Keluaran :

Meningkatnya keterampilan UKM dalam pengelolaan rumput laut menjadi produk non konsumsi (sabun dan shampoo) untuk 35 peserta dari 7 UKM dan pengelolaan design produk dan kemasan dengan sentuhan teknologi untuk 25 orang peserta dari 5 UKM
 - ✓ Outcome / Hasil :

Hasil Usaha Yang Bisa Diterima Dunia Pasar Lokal Dan Regional serta Nasional.
 - ✓ Dampak :

Cakupan pemasaran produk unggulan lebih luas sehingga diharapkan dapat meningkatkan nilai jual produk
- 2) Jalin Matra
 - ✓ Output / Keluaran :

Tersedianya dukungan anggaran sebagai upaya untuk penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Sumenep demi membantu meringankan beban secara moral, sosial ekonomi dan peningkatan kesejahteraan hidupnya
 - ✓ Outcome / Hasil :

Mendorong masyarakat rentan agar mampu mengatasi kerentanannya sendiri berdasarkan pada potensi ekonomi lokal di desanya dalam kegiatan ekonomi produktif
- 3) Pengendalian, Pemantauan dan Evaluasi Pengelolaan Keuangan Desa
 - ✓ Output / Keluaran :
 - Tersedianya dukungan biaya Kegiatan Pengendalian, Pemantauan dan Evaluasi Keuangan Desa Tahun Anggaran 2017
 - Peningkatan pengetahuan PTPKD dalam pengelolaan keuangan Desa berdasarkan tugas dan fungsinya
 - Peningkatan pemahaman PTPKD terhadap pengelolaan keuangan yang bersifat swakelola, yang berkenaan dengan realisasi harga belanja.
 - ✓ Outcome / Hasil :
 - Terbinanya PTPKD dalam Pengelolaan Keuangan Desa
 - Tertib manajemen administrasi Pengelolaan dan pelaporan Keuangan Desa
 - Efisiensi anggaran APBDes dengan menerapkan esensi swakelola dimana harga RAB hanya sebagai dasar perencanaan satuan harga sedangkan realisasi belanja berdasarkan harga toko/pasar setempat.

- ✓ Dampak :
 - Pengetahuan PTPKD dalam manajemen administrasi Pengelolaan Keuangan Desa bertambah/mulai memahami
 - Keterlibatan/keberdayaan PTPKD dalam manajemen dan penataan administrasi Pengelolaan Keuangan Desa mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai, pembuatan laporan lebih optimal
 - Pemahaman terhadap setiap Musdes yang harus melibatkan unsur unsur masyarakat semakin di pahami.
 - Kesadaran PTPKD terhadap esensi swakelola yang akan berdampak kepada efisiensi anggaran yang ditunjukkan dengan Silpa di masing masing desa.
- ✓ Lain-Lain :

Pemantapan Pengelolaan Keuangan Desa dilakukan ke 23 Kecamatan, sementara ke kecamatan Arjasa, Kangayan, Sapeken dan Masalembu tidak dilakukan yang disebabkan oleh padatnya kegiatan di bulan nopember dan desember 2017 dan faktor cuaca.
- 4) Pemasarakatan Teknologi Tepat Guna Melalui Pos Pelayanan Teknologi Tepat Guna
 - ✓ Output / Keluaran :

Terampilnya Pengurus Posyantek Tentang Tugas Dan Fungsinya berjumlah 30 orang dari 5 kecamatan yaitu Kec. Kalianget, Kec. Dasuk, Kec. Ambunten, Kec. Rubaru dan Kec. Ambunten, masing – masing kecamatan terdiri dari 6 (enam) orang tokoh pemuda dari kecamatan.
 - ✓ Outcome / Hasil :

Peningkatan pengetahuan dan pola pikir 30 orang pengurus posyantek tentang pentingnya keberadaan kelembagaan Posyantek di kecamatan dalam rangka pemasarakatan TTG.
 - ✓ Dampak :

Program kegiatan pemasarakatan TTG di masyarakat dapat berjalan sesuai rencana
- 5) Pemberdayaan Penyandang Disabilitas
 - ✓ Output / Keluaran :

Membantu meringankan beban secara sosial ekonomi demi membantu peningkatan kesejahteraan hidup
 - ✓ Outcome / Hasil :

Membantu mendorong ketahanan sosial ekonomi dalam memenuhi kebutuhan hidup dasarnya serta memberikan motivasi berusaha serta kemampuan dalam meningkatkan kesejahteraannya.

✓ Lain-Lain :

Belanja Bantuan Sosial berupa uang untuk Penyandang Disabilitas sebesar Rp. 30.000.000,- yang diterima oleh penerima sebanyak 15 orang dengan rincian masing-masing menerima bantuan sebesar Rp. 2.000.000,- digunakan untuk membantu mendorong ketahanan sosial ekonomi dalam memenuhi kebutuhan hidup dasarnya serta memberikan motivasi berusaha serta kemampuan dalam meningkatkan kesejahteraannya. Misalnya, (modal usaha potong rambut, modal usaha menjahit, modal usaha beternak ayam maupun kambing, dan lain-lain).

Penerima Bantuan Sosial Penyandang Disabilitas 2017, yaitu :

Kecamatan	Nama	Nama	Alamat
Bluto	Pakandangan Barat	Aswari	Dusun Jeruk RT. 09 RW. 04
		Moh. Faisal	Dsn Sumber Nangka RT.06 RW.03
		Nurul Qomariyah	Dusun Pesisir RT. 02 RW. 01
		Radiyah	Dusun Tegal RT. 05 RW. 02
		Aini	Dusun Jeruk RT.09 RW.04
		Mas'uda	Dusun Jeruk RT.09 RW. 04
Lobuk		Toyati N	Dusun Tarogan RT.03 RW. 01
		Sono	Dusun Tarogan RT. 03 Rw. 01
Sera Tengah		Azhar Efendi	Dsn Sumber Lagun RT.08 RW.04
		Rusidyana	Dusun Mandaya RT. 10 RW. 05
Gilang	Kapedi	Emyani	Dusun Dua' Kerrep RT.03 RW.02
		Sri Wahyuni	Dsun Barat Sungai RT. 01 RW. 03
		Nurlaila	Dsun Barat Sungai RT. 04 RW. 03
		M. Indra Irozani	Dusun Biyan RT.03 RW.01
		Moh. Zaini	Dusun Jurgang RT. 04 RW.02
Pakandangan Tengah			

6) Pengembangan Inovasi Teknologi Tepat Guna

✓ Output / Keluaran :

Tersedianya 1 Alat Teknologi Tepat Guna Sederhana dan Inovatif (Penetas Telur Otomatis dengan Kontrol HP)

✓ Outcome / Hasil :

- Meningkatnya peluang keberhasilan proses penetasan telur.
- Terfasilitasinya hasil kreatifitas masyarakat tentang penciptaan peralatan yang lebih tepat guna

✓ Dampak :

- Peningkatan hasil usaha pemanfaatan teknologi tepat guna.
- Munculnya inovator – inovator alat TTG dari masyarakat

7) Fasilitasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Desa

✓ Output / Keluaran :

Terlaksananya Pelatihan Siskeudes bagi Aparat kecamatan, Pendamping dan operator desa

✓ Outcome / Hasil :

- Terlatihnya 56 orang dari unsur kecamatan DPMD, dan Inspektorat dari 57 orang yang ditargetkan (1 orang tidak hadir), yang dilaksanakan pada tanggal 3-5 April 2017
- Terlatihnya 330 operator desa dan 27 pendamping desa yang dilaksanakan pada tanggal 13 Nopember sampai dengan 20 Desember 2017
- Terlaksananya penginputan (Entry Data) 330 APBDes ke dalam aplikasi Sistem Informasi Keuangan Desa (Siskeudes)

8) Pilot Proyek Desa Membangun

✓ Output / Keluaran :

Terlaksananya Penataan Pemerintah Desa dan Lembaga Kemasyarakatan Desa

✓ Outcome / Hasil :

Terciptanya Kemitraan Pemerintah Desa dan Masyarakat Desa

✓ Lain-Lain :

Khusus belanja Hibah berupa uang kepada Pemerintah Desa diberikan untuk 3 Desa yang digunakan untuk peningkatan peyanan masyarakat pada Pemerintah Desa, misalnya, diperuntukkan belanja sarana prasarana administrasi perkantoran (belanja komputer, printer, meja kursi pelayanan, dll) dengan masing-masing alokasi menerima bantuan sebesar Rp. 15.000.000, yaitu :

- Pemerintah Desa Manding Laok Kecamatan Manding
- Pemerintah Desa Kalianget Timur Kecamatan Kalianget
- Pemerintah Desa Gapura Barat Kecamatan Gapura

9) Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga

✓ Output / Keluaran :

Membangun dan mengembangkan PKK Kabupaten sebagai mitra kerja pemerintah dan organisasi kemasyarakatan dalam pengembangan pemberdayaan kesejahteraan keluarga masyarakat.

✓ Outcome / Hasil :

Memandirikan PKK secara profesional dan mandiri

✓ Penerima Sembako untuk Kaum Dhuafa dan Anak Yatim Kegiatan BBGRM dan HKG PKK

Barang yang diserahkan berupa Paket Sembako terdiri dari : 5 Kg Beras, 1 Liter Minyak Goreng, 1 Kg Gula Pasir, 10 Buah Mie Instan

No.	Nama Penerima dan Alamat
1	Rahmatun, Dsn Kauman RT. 01 RW. 01 Desa Pinggirpapas
2	Hawa Bellas, Dsn Kauman RT. 01 RW. 01 Desa Pinggirpapas
3	Busati, Dsn Kauman RT. 01 RW. 01 Desa PinggirPapas
4	Masripa, Dsn Kauman RT. 01 RW. 01 Desa Pinggirpapas

No.	Nama Penerima dan Alamat
5	Saria, Dsn Kauman RT.01 RW. 01 Desa Pinggirpapas
6	Musriyah, Dsn. Kauman RT.01 RW. 01 Pinggir papas
7	Dinami, Dsn Kauman RT. 02 RW. 01 Pinggirpapas
8	Sotrani, Dsn Kauman RT. 02 RW. 01 Pinggirpapas
9	Busati, Dsn Kauman RT.02 RW. 01 Desa Pinggirpapas
10	Sanabi, Dsn Kauman RT. 03 RW. 01 Pinggirpapas
11	Talipa, Dsn. Kauman RT. 03 RW. 01 Pinggirpapas
12	Sarmi, Dsn. Kauman RT. 04 RW. 01 Pinggirpapas
13	Masripa, Dsn Kauman RT. 04 RW. 01 Desa Pinggirpapas
14	Sari, Dsn. Kauman RT. 05 RW. 02 Pinggirpapas
15	Halima, Dsn Kauman RT. 05 RW. 02 Pinggirpapas
16	Munaiyah, Dsn. Kauman RT. 05 RW. 02 Pinggirpapas
17	Sotrani B Sari'atun, Dsn. Kauman RT. 06 RW. 02 Pinggirpapas
18	Marwani, Dsn. Kauman RT. 06 RW. 02 Pinggirpapas
19	Salami, Dsn. Kauman RT. 06 RW. 02 Pinggirpapas
20	Sa'diya, Dsn. Kauman RT. 06 RW. 02 Pinggirpapas
21	Suparmi, Dsn. Kauman RT. 07 RW. 02 Pinggirpapas
22	Emmo, Dsn. Kauman RT. 07 RW. 02 Pinggirpapas
23	Surtina, Dsn. Kauman RT. 07 RW. 02 Pinggirpapas
24	Sa'eh, Dsn. Kauman RT. 07 RW. 02 Pinggirpapas
25	Buami, Dsn. Ageng RT. 01 RW. 03 Pinggirpapas
26	Suddiya, Dsn. Ageng RT. 01 RW. 03 Pinggirpapas
27	Rahma B Mohyar, Dsn. Ageng RT. 01 RW. 03 Pinggirpapas
28	Ma'lya, Dsn. Ageng RT. 02 RW. 03 Pinggirpapas
29	Busasi, Dsn. Ageng RT. 02 RW. 03 Pinggirpapas
30	Ami, Dsn. Ageng RT. 02 RW. 03 Pinggirpapas
31	Juma' B Ahmad, Dsn. Ageng RT. 03 RW. 03 Pinggirpapas
32	Zaini, Dsn. Ageng RT. 03 RW. 03 Pinggirpapas
33	Sabina, Dsn. Ageng RT. 03 RW. 03 Pinggirpapas
34	Burjan, Dsn. Ageng RT. 04 RW. 03 Pinggirpapas
35	Essu, Dsn. Ageng RT. 05 RW. 03 Pinggirpapas
36	Ejjum, Dsn. Ageng RT. 05 RW. 03 Pinggirpapas
37	Hadiya, Dsn. Ageng RT. 05 RW. 03 Pinggirpapas
38	Sari'a, Dsn. Ageng RT. 05 RW. 03 Pinggirpapas
39	Subati, Dsn. Ageng RT. 05 RW. 03 Pinggirpapas
40	Sa'ati, Dsn. Ageng RT. 05 RW. 03 Pinggirpapas
41	Almina, Dsn. Ageng RT. 06 RW. 04 Pinggirpapas
42	Kalong, Dsn. Ageng RT. 06 RW. 04 Pinggirpapas
43	Sitty, Dsn. Ageng RT. 06 RW. 04 Pinggirpapas
44	Maisa, Dsn. Ageng RT. 07 RW. 04 Pinggirpapas
45	Sipa B Sitti, Dsn. Ageng RT. 07 RW. 04 Pinggirpapas
46	Halima, Dsn Ageng RT. 07 RW. 04 Pinggirpapas
47	Muhyat, Dsn. Ageng RT. 07 RW. 04 Pinggirpapas
48	Kalong, Dsn. Ageng RT. 07 RW. 04 Pinggirpapas
49	surya, Dsn. Ageng RT. 08 RW. 04 Pinggirpapas
50	Sai'a, Dsn. Ageng RT. 08 RW. 04 Pinggirpapas
51	Essu, Dsn. Ageng RT. 08 RW. 04 Pinggirpapas
52	Siya, Dsn. Ageng RT. 08 RW. 04 Pinggirpapas
53	Saniya, Dsn. Ageng RT. 08 RW. 04 Pinggirpapas
54	Attiya, Dsn. Ageng RT. 008 RW. 004 Pinggirpapas
55	Amina, Dsn. Ageng RT. 008 RW. 004 Pinggirpapas
56	Suna'lya, Dsn. Ageng RT. 008 RW. 004 Pinggirpapas
57	B. Aritati, Dsn. Dhalem RT. 001 RW. 005 Pinggirpapas
58	Sahu, Dsn. Dhalem RT.002 RW. 005 Pinggirpapas
59	Sattiyani, Dsn. Dhalem RT. 002 RW. 005 Pinggirpapas
60	Sa'diya, Dsn, Dhalem RT. 002 RW. 005 Pinggirpapas
61	Ma'ani, Dsn, Dhalem RT. 002 RW. 005 Pinggirpapas

No.	Nama Penerima dan Alamat
62	Gembar, Dsn, Dhalem RT.003 RW. 005 Pinggirpapas
63	B. Sarwati, Dsn, Dhalem RT. 003 RW. 005 Pinggirpapas
64	Sumaba, Dsn, Dhalem RT. 003 RW. 005 Pinggirpapas
65	Misnali, Dsn, Dhalem RT. 004 RW. 006 Pinggirpapas
66	Si'a, Dsn, Dhalem RT. 004 RW. 006 Pinggirpapas
67	Biha, Dsn, Dhalem RT. 005 RW. 006 Pinggirpapas
68	Bani, Dsn, Dhalem RT. 005 RT. 006 Pinggirpapas
69	Sittiyani, Dsn, Dhalem RT. 005 RW. 006 Pinggirpapas
70	Sitti, Dsn, Dhalem RT. 005 RW. 006 Pinggirpapas
71	Sirinanti, Dsn, Dhalem RT.005 RW. 006 Pinggirpapas
72	Safina, Dsn, Dhalem RT. 005 RW. 006 Pinggirpapas
73	Buniya, Dsn, Dhalem RT. RW. 006 Pinggirpapas
74	Misasi, Dsn, Dhalem RT. 005 RW. 006 Pinggirpapas
75	Ebbu, Dsn, Dhalem RT. 006 RW. 006 Pinggirpapas
76	Busati, Dsn, Dhalem RT. 006 RW. 006 Pinggirpapas
77	Mahmo, Dsn, Ageng RT. 007 RW. 003 Pinggirpapas
78	Askiya, Dsn, Ageng RT. 007 RW. 004 Pinggirpapas
79	Nisa, Dsn, Palebunan RT. 001 RW. 001 Karanganyar
80	Wahedi, Dsn, Palebunan RT. 004 RW. 001 Karanganyar
81	Sugyanto, Dsn, Dungmudung RT. 002 RW. 002 Karanganyar
82	Subaida, Dsn, Dungmudung RT. 002 RW. 002 Karanganyar
83	Fikril Ramandani, Dungmudung RT. 003 RT. 002 Karanganyar
84	Moh. Zid Nuril Iman, Dsn, Dungmudung RT. 003 RW. 002 Karanganyar
85	Apriyanto, Dsn, Dungmudung RT. 003 RW. 002 Karanganyar
86	Siti Soleha, Dsn, Dungmudung RT. 004 RW. 002 Karanganyar
87	Rahwani, Dsn, Panggung RT. 001 RW. 003 Karanganyar
88	Aminatus, Dsn, Panggung RT. 001 RW.003 Karanganyar
89	Busana, Dsn, Panggung RT. 04 RW. 03 Karanganyar
90	Siti Rahmawati, Dsn, Panggung RT. 04 RW. 03 Karanganyar
91	Nur Asizah Agus Triana, Dsn, Panggung RT. 04 RW. 03 Karanganyar
92	Zainal Arifin, Dsn, Panggung RT. 01 RW. 03 Karanganyar
93	Adi Sucipto, Dsn, Panggung RT. 01 RW. 03 Karanganyar
94	Saniya, Dsn, Panggung RT. 01 RW. 03 Karanganyar
95	Abbror, Dsn, Gedung RT. 01 RW. 04 Karanganyar
96	Aji, Dsn, Gedung RT. 02 RW. 04 Karanganyar
97	Uul, Dsn, Gedung RT. 02 RW. 04 Karanganyar
98	Asmoni, Dsn, Gedung RT. 03 RW. 04 Karanganyar
99	Wahdan, Dsn, Gedung RT. 05 RW. 04 Karanganyar
100	Fardan, Dsn, Gedung RT. 05 RW. 04 Karanganyar

- ✓ Penerima Pin Emas PKK Keg. BBGRM dan HKG-PKK
Masing masing menerima PIN Emas dengan Berat 5 gram/23 karat

No.	Nama Penerima dan Alamat
1	Ny. Hj. Lely Hendarti Pengurus TP PKK Kec. Kota
2	Ny. Endang Susilawati Pengurus TP PKK Kec. Talango
3	Ny. Hj. Maryamah Anggota Pokja II TP PKK Kec. Guluk-Guluk
4	Ny. Monawaroh Ketua Pokja II TP PKK Kec. Ambunten

- ✓ Penerima Etalase Kegiatan Pembinaan Sekolah Sehat

No.	Nama Penerima dan Alamat
1	Taman Kanak-Kanak Pertiwi Kec. Kota
2	Taman Kanak-Kanak Pembina Kec. Kota
3	SDNI Kapedi Kec. Bluto
4	SD Pandian I Kec. Kota
5	SMPN I Kec. Kota
6	SMPN II Kec. Saronggi
7	SMA Muhammadiyah Kec. Kota

No.	Nama Penerima dan Alamat
8	SMAN Kec. Gapura

- ✓ Penerima Alat Pembuat Pupuk Kegiatan Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL)

No.	Nama Penerima dan Alamat
1	Rismawati, Dsn. Panggulan RT. 06 RW. 02 Desa Kebundadap Timur
2	Herlina, Dsn. Temor Leke RT. 04 RW. 01 Desa Saroka
3	Supeni, RT. 06 RW. 02 Desa Batuan
4	Nurlina Safitri, Jl. Mutiara 3 Bangselok
5	Endang Sri Rahaju, Jl. Matahari 57 RT. 01 RW. 04 Desa Pabian
6	Mufrihatun, Dsn. Glugur Tengah RT. 02 RW. 02 Desa Batuan Kec. Batuan
7	Naini, Dsn. Pangbunokok RT. 03 RW. 03 Desa Batuan Kec. Batuan

- ✓ Penerima Sembako Untuk Kaum Dhuafa dan Anak Yatim Kegiatan Peningkatan Keberdayaan Masyarakat dan Kader PKK Dalam Ketaqwaan Kepada Tuhan YME

Barang yang diserahkan berupa Paket Sembako terdiri dari : 5 Kg Beras, 1 Liter Minyak Goreng, 1 Kg Gula Pasir, 10 Buah Mie Instan

No.	Nama Penerima dan Alamat
1	Moh. Farhan, RT. 05 RW. 03 Dusun Eresan Desa Bungbungan Kec. Bluto
2	Zayani, RT. 05 RW. 03 Dusun Eresan Desa Bungbungan Kec. Bluto
3	Andre, RT. 05 RW. 03 Dusun Eresan Desa Bungbungan Kec. Bluto
4	Moh. Taufiq Rahman, RT. 02 RW. 03 Dusun Tajjan Desa Bungbungan Kec. Bluto
5	Finatus Sholihah, RT. 05 RW. 03 Dusun Eresan Desa Bungbungan Kec. Bluto
6	Isbat Ramadani, RT. 02 RW. 03 Dusun Tajjan Desa Bungbungan Kec. Bluto
7	M. Agung Widodo, RT. 012 RW. 05 Dusun Tajjan Desa Bluto Kec. Bluto
8	Qanita Izza Tina, RT. 05 RW. 03 Dusun Barat Lorong Desa Bluto Kec. Bluto
9	Farhan, RT. 05 RW. 03 Dusun Tajjan Desa Bluto Kec. Bluto
10	Dwi Ayyinatul Azzizah, RT. 011 RW. 05 Dusun Tajjan Desa Bluto Kec. Bluto
11	Rupani, RT. 05 RW. 03 Dusun Eresan Desa Bungbungan Kec. Bluto
12	Kalsum, RT. 05 RW. 03 Dusun Eresan Desa Bungbungan Kec. Bluto
13	Erru, RT. 05 RW. 03 Dusun Eresan Desa Bungbungan Kec. Bluto
14	Siti Aisyah, RT. 05 RW. 03 Dusun Eresan Desa Bungbungan Kec. Bluto
15	Sintya, RT. 02 RW. 03 Dusun Tajjan Desa Bungbungan Kec. Bluto
16	Rusna, RT. 02 RW. 03 Dusun Tajjan Desa Bungbungan Kec. Bluto
17	Rusni, RT. 02 RW. 03 Dusun Tajjan Desa Bungbungan Kec. Bluto
18	Sumina, RT. 02 RW. 03 Dusun Tajjan Desa Bungbungan Kec. Bluto
19	Bu Syafii, RT. 02 RW. 03 Dusun Tajjan Desa Bungbungan Kec. Bluto
20	Imran, RT. 017 RW. 08 Dusun Temor Lorong Desa Bluto Kec. Bluto
21	Sudiya, RT. 017 RW. 08 Dusun Temor Lorong Desa Bluto Kec. Bluto
22	Saniya, RT. 02 RW. 03 Dusun Tajjan Desa Bungbungan Kec. Bluto
23	Rasmi, RT. 017 RW. 08 Dusun Temor Lorong Desa Bluto Kec. Bluto
24	Najma, RT. 03 RW. 06 Dusun Panalangan Desa Karduluk Kec. Bluto
25	Mar'atus Sholehah, RT. 03 RW. 06 Dusun Panalangan Desa Karduluk Kec. Bluto
26	Saminah, RT. 05 RW. 03 Dusun Laok Lorong Desa Pekandangan Tengah Kec. Bluto
27	Hermin, RT. 01 RW. 01 Dusun Congka Desa Gilang Kec. Bluto
28	Sanen, RT. 017 RW. 08 Dusun Temor Lorong Desa Bluto Kec. Bluto
29	Erru, RT. 017 RW. 08 Dusun Temor Lorong Desa Bluto Kec. Bluto
30	Misnati, RT. 017 RW. 08 Dusun Temor Lorong Desa Bluto Kec. Bluto
31	Bastani, RT. 017 RW. 08 Dusun Temor Lorong Desa Bluto Kec. Bluto
32	Suiye, RT. 017 RW. 08 Dusun Temor Lorong Desa Bluto Kec. Bluto
33	Surami, RT. 017 RW. 08 Dusun Temor Lorong Desa Bluto Kec. Bluto

No.	Nama Penerima dan Alamat
34	Misnawi, RT. 017 RW. 08 Dusun Temor Lorong Desa Bluto Kec. Bluto
35	Maryam, RT. 017 RW. 08 Dusun Temor Lorong Desa Bluto Kec. Bluto
36	Jumaati, RT. 02 RW. 03 Jl. Gersik Putih Dusun Padurekso Desa Kalianget Timur Kec. Kalianget
37	Siti Aminatus Zahro, RT. 03 RW. 03 Jl. Gersik Putih Dusun Padurekso Desa Kalianget Timur Kec. Kalianget
38	Lestari Puspa Dewi, RT. 03 RW. 011 Jl. Masalembu No.34 Perummas. Giling Desa Pamolokan Kec. Kota
39	Dwi Nur Karimah, RT. 15 RW. 02 Perum. Batuan Blok J No.45 Desa Batuan Kec. Kota
40	Aulia Rahmawati, RT. 15 RW. 02 Perum. Batuan Blok J No.45 Desa Batuan Kec. Kota
41	Meilani Nuri Maulidah, RT. 15 RW. 02 Perum. Batuan Blok J No.45 Desa Batuan Kec. Kota
42	Azzizah Halimatus Suhra, RT. 04 RW. 07 Sultan Abdurrahman Desa BSA Kolor Kec. Kota
43	Junaida, RT. 02 RW. 05 Dusun Sema Desa Gapura Tengah Kec. Gapura
44	Jamila, RT. 02 RW. 05 Dusun Sema Desa Gapura Tengah Kec. Gapura
45	Rohanni, RT. 03 RW. 01 Dusun Ahadan Desa Banjar Timur Tengah Kec. Gapura
46	Niwati, RT. 04 RW. 02 Jl. Dusun Tarebungan Desa Kalianget Timur Kec. Kalianget
47	Subaidah, RT. 04 RW. 05 Jl. Trunjooyo Gg.08 No.2 Desa Kolor Kec. Kota
48	Sumardiya, RT. 04 RW. 04 Jl. Trunjooyo Gg.10 Desa Kolor Kec. Kota
49	Amraturun, RT. 04 RW. 04 Jl. Trunjooyo Gg.10 No.6 Desa Kolor Kec. Kota
50	Kartini, RT. 04 RW. 04 Jl. Trunjooyo Gg.10 Desa Kolor Kec. Kota
51	Nariyah, Jl. Trunjooyo Gg.10 No.6 Desa Kolor Kec. Kota
52	Sa'diyah, RT. 04 RW. 04 Jl. Trunjooyo Gg.10 No.12 Desa Kolor Kec. Kota
53	Ifan Maulana, RT. 04 RW. 02 Jl. Slamet Riadi Desa Pabian Kec. Kota
54	Moh. Nur Hasby, Jl. Dr. Cipto No.12 Desa Kolor Kec. Kota
55	Ines, Perum. Batuan Blok F No.17 Desa Batuan Kec. Kota
56	Sahrani, RT. 03 RW. 02 Dusun Pakajuen Desa Mandala Kec. Gapura
57	Satria, RT. 09 RW. 03 Dusun Parambangan Desa Kalimok Kec. Kalianget
58	Aisyah, RT. 02 RW. 01 Dusun Cemara Desa Nambakor Kec. Saronggi
59	Danil Firmansyah, RT. 04 RW. 02 Dusun Cemara Desa Nambakor Kec. Saronggi
60	Riskiyah Dwi Wulandari, RT. 01 RW. 01 Dusun Cemara Desa Nambakor Kec. Saronggi
61	Irwan Fals, RT. 01 RW. 01 Dusun Beddi Desa Marengan Laok Kec. Kalianget
62	Nofia Indah Sari, RT. 01 RW. 02 Dusun Beddi Desa Marengan Laok Kec. Kalianget
63	Khoirullah, RT. 02 RW. 03 Dusun Karang Komis Marengan Laok Kec. Kalianget
64	Moh. Hidar Ritansah, RT. 03 Dusun Masjid Desa Marengan Laok Kec. Kalianget
65	Anggi Sari Dewi, RT. 01 RW. 05 Dusun Jenengan Desa Marengan Laok Kec. Kalianget
66	Nurul Aprilia, RT. 01 RW. 03 Dusun Karang Komis Desa Marengan Laok Kec. Kalianget
67	Ayu, RT. 05 RW. 01 Dusun Beddi Desa Marengan Laok Kec. Kalianget
68	Seril Andrea Tsabita Anisa, RT. 01 RW. 01 Jl. Trunjooyo Gg.1 No.39 Desa Pajagalan Kec. Kota
69	Mohammad Hasan, RT. 02 RW. 01 Dusun Beddi Desa Marengan Laok Kec. Kalianget
70	Sukmadyarta, RT. 01 RW. 02 Dusun Beddi Desa Marengan Laok Kec. Kalianget
71	Ahmad Gheseli, RT. 01 RW. 02 Dusun Beddi Desa Marengan Laok Kec. Kalianget
72	Kunia Yatima, RT. 01 RW. 01 Dusun Beddi Desa Marengan Laok Kec. Kalianget
73	Tiara Nurmalasari, RT. 01 RW. 01 Dusun Beddi Desa Marengan Laok Kec. Kalianget
74	Mohammad Dani Rohman, RT. 02 RW. 03 Dusun Karang Komis Desa Marengan Laok Kec. Kalianget
75	Amrati, RT. 01 RW. 01 Dusun Beddi Desa Marengan Laok Kec. Kalianget
76	Putri Ayu Ashari, RT. 01 RW. 04 Dusun Masjid Desa Marengan Laok Kec. Kalianget
77	Moh. Fati Farhat, RT. 01 RW. 04 Dusun Masjid Desa Marengan Laok Kec. Kalianget
78	Moh. Effendi AS, RT. 02 RW. 03 Dusun Karang Komis Desa Marengan Laok Kec. Kalianget
79	Awelia Rahmadani, RT. 02 RW. 03 Dusun Karang Komis Desa Marengan Laok Kec. Kalianget
80	Eka Pratiwi, RT. 01 RW. 04 Dusun Masjid Desa Marengan Laok Kec. Kalianget
81	Hairul Rahman, RT. 03 RW. 02 Dusun Beddi Desa Marengan Laok Kec. Kalianget
82	Putri, RT. 04 RW. 03 Dusun Karang Komis Desa Marengan Laok Kec. Kalianget
83	Fajriyatus H, RT. 06 RW. 04 Dusun Masjid Desa Marengan Laok Kec. Kalianget
84	Fahri, RT. 01 RW. 04 Dusun Masjid Desa Marengan Laok Kec. Kalianget
85	Lusi Septiani, RT. 02 RW. 01 Dusun Beddi Desa Marengan Laok Kec. Kalianget
86	Alika Naila Putry, RT. 02 RW. 01 Dusun Beddi Desa Marengan Laok Kec. Kalianget
87	Wahyudi, RT. 02 RW. 02 Dusun Beddi Desa Marengan Laok Kec. Kalianget

No.	Nama Penerima dan Alamat
88	Angga Irawan, RT. 02 RW. 02 Dusun Beddi Desa Marengan Laok Kec. Kalianget
89	Iritan, RT. 01 RW. 03 Dusun Karang Komis Desa Marengan Laok Kec. Kalianget
90	Amaliyah, RT. 04 RW. 04 Dusun Masjid Desa Marengan Laok Kec. Kalianget
91	Vivi, RT. 03 RW. 05 Dusun Jenengan Desa Marengan Laok Kec. Kalianget
92	Safa Malaikafen, RT. 01 RW. 02 Perum. Batuan Blok C No.20 Desa Batuan Kec. Batuan
93	Fadhilah Indri Cahyani, RT. 02 RW. 02 Perum. Batuan Blok D No.5 Desa Batuan Kec. Batuan
94	Lauzuadi Imam Akbar, RT. 07 RW. 02 Perum. Batuan Blok I No.13 Desa Batuan Kec. Batuan
95	Ahmad Junaidi Syukron Fatah, Batuan Barat Desa Batuan Kec. Batuan
96	Kayla Tyias Aunilla, RT. 10 RW. 02 Perum. Batuan Blok M No.4 Desa Batuan Kec. Batuan
97	Lailatul Nafisah, Jl. Zainal Arifin No.7 D Desa Bangselok Kec. Kota
98	Saris Alqamar, RT. 04 RW. 01 Jl. Slamet Riyadi Desa Pabian Kec. Kota
99	Asrori, RT. 03 RW. 06 Kampung Batuan Desa Batuan Kec. Kota
100	Umri Nur Fadilah, RT. 01 RW. 03 Jl. Slamet Riyadi No.22 Desa Pabian Kec. Kota

✓ Penerima Bantuan Sarpras Kegiatan Pembinaan Pos Lansia

No.	Nama Penerima dan Alamat
1	Posyandu Lansia Desa Marengan Laok Kec. Kalianget 1 buah Lemari arsip, 1 buah tensi darah, 1 buah stateskop
2	Posyandu Lansia Desa Bancemara Kec. Dungkek 2 buah meja kerja, 2 buah kursi kerja, 1 buah timbangan berat badan, 1 buah alat tinggi badan, 1 buah tensi darah, 1 buah stateskop

10) Pemberdayaan dan Penguatan Lembaga Organisasi Wanita

✓ Output / Keluaran :

Membangun dan mengembangkan organisasi wanita

✓ Outcome / Hasil :

Peningkatan kinerja organisasi wanita di sumenep

✓ Bansos Berupa Sembako untuk Lansia

Barang yang diserahkan berupa Paket Sembako terdiri dari : 5 Kg Beras, 1 Liter Minyak Goreng, 1 Kg Gula Pasir, 10 Buah Mie Instan

No.	Nama Penerima dan Alamat
1	Runabiya, Dusun Assem RT. 02 RW. 03 Desa Banraas Kecamatan Dungkek
2	Sumabi, Dusun Assem RT. 09 RW. 05 Desa Banraas Kecamatan Dungkek
3	Mariyam, Dusun Assem RT. 01 RW. 06 Desa Banraas Kecamatan Dungkek
4	Mahriya, Dusun Assem RT. 02 RW. 03 Desa Banraas Kecamatan Dungkek
5	Rukiyat, Dusun Assem RT. 06 RW. 03 Desa Banraas Kecamatan Dungkek
6	Runa', Dusun Assem RT. 06 RW. 03 Desa Banraas Kecamatan Dungkek
7	Essur, Dusun Assem RT. 06 RW. 02 Desa Banraas Kecamatan Dungkek
8	Sahbabi, Dusun Assem RT. 03 RW. 05 Desa Banraas Kecamatan Dungkek
9	Umar, Dusun Assem RT. 03 RW. 06 Desa Banraas Kecamatan Dungkek
10	Sinala, Dusun Assem RT. 03 RW. 06 Desa Banraas Kecamatan Dungkek
11	Sahabardiya, Dusun Assem RT. 02 RW. 03 Desa Banraas Kecamatan Dungkek

No.	Nama Penerima dan Alamat
12	Sahruti, Dusun Assem RT. 03 RW. 05 Desa Banraas Kecamatan Dungkek
13	Suhadiya, Dusun Assem RT. 02 RW. 05 Desa Banraas Kecamatan Dungkek
14	Armuna, Dusun Baru RT. 02 RW. 06 Desa Banraas Kecamatan Dungkek
15	Suliyah, Dusun Baru RT. 02 RW. 04 Desa Banraas Kecamatan Dungkek
16	Habi, Dusun Baru RT. 02 RW. 06 Desa Banraas Kecamatan Dungkek
17	Marduya, Dusun Baru RT. 03 RW. 05 Desa Banraas Kecamatan Dungkek
18	Sunabiya, Dusun Baru RT. 02 RW. 04 Desa Banraas Kecamatan Dungkek
19	Rubak, Dusun Baru RT. 04 RW. 03 Desa Banraas Kecamatan Dungkek
20	Siddik, Dusun Baru RT. 03 RW. 06 Desa Banraas Kecamatan Dungkek
21	Mubahrib, Dusun Baru RT. 04 RW. 04 Desa Banraas Kecamatan Dungkek
22	Birati, Dusun Baru RT. 02 RW. 06 Desa Banraas Kecamatan Dungkek
23	Mudiya, Dusun Kalompang RT. 06 RW. 02 Desa Banraas Kecamatan Dungkek
24	Saiya, Dusun Bungkok RT. 08 RW. 02 Desa Banraas Kecamatan Dungkek
25	Mathan, Dusun Kalompang RT. 06 RW. 02 Desa Banraas Kecamatan Dungkek
26	Pusadin, Dusun Bungkok RT. 05 RW. 02 Desa Banraas Kecamatan Dungkek
27	Ahriti, Dusun Kalompang RT. 06 RW. 02 Desa Banraas Kecamatan Dungkek
28	Suwarni, Dusun Kalompang RT. 01 RW. 04 Desa Banraas Kecamatan Dungkek
29	Sunahbiya, Dusun Ra'as RT. 08 RW. 01 Desa Banraas Kecamatan Dungkek
30	Sumaina, Dusun Ra'as RT. 07 RW. 01 Desa Banraas Kecamatan Dungkek
31	Rombia, Dusun Ra'as Timur RT. 05 RW. 02 Desa Banraas Kecamatan Dungkek
32	Riwani, Dusun Ra'as RT. 010 RW. 01 Desa Banraas Kecamatan Dungkek
33	Saida, Dusun Ra'as Timur RT. 09 RW. 01 Desa Banraas Kecamatan Dungkek
34	Muarma, Dusun Ra'as RT. 06 RW. 01 Desa Banraas Kecamatan Dungkek
35	Biamo, Dusun Raas Timor RT. 010 RW. 01 Desa Banraas Kecamatan Dungkek
36	Junati, Dusun Raas RT. 06 RW. 01 Desa Banraas Kecamatan Dungkek
37	Sunik, Dusun Bungkok RT. 03 RW. 02 Desa Banraas Kecamatan Dungkek
38	Mahyun, Dusun Bungkok RT. 06 RW. 02 Desa Banraas Kecamatan Dungkek
39	Munati, Dusun Bungkok RT. - RW. 02 Desa Banraas Kecamatan Dungkek
40	Hadiyati, Dusun Bungkok RT. 03 RW. 02 Desa Banraas Kecamatan Dungkek
41	Munati, Dusun Bungkok RT. 04 RW. 02 Desa Banraas Kecamatan Dungkek
42	Sahraniya, Dusun Bungko RT. 02 RW. 01 Desa Banraas Kecamatan Dungkek
43	Misnaban, Dusun Bungkok RT. 03 RW. 03 Desa Banraas Kecamatan Dungkek
44	Sutija, Dusun Bungkok RT. 02 RW. 01 Desa Banraas Kecamatan Dungkek
45	Munawara, Dusun Ra'as Barat RT. 06 RW. 01 Desa Banraas Kecamatan Dungkek

No.	Nama Penerima dan Alamat
46	Puhami, Dusun Raas RT. 08 RW. 03 Desa Banraas Kecamatan Dungek
47	Sitti Ramda, Dusun Ra'as Barat RT. 06 RW. 01 Desa Banraas Kecamatan Dungek
48	Senatun, Dusun Raas RT. 09 RW. 01 Desa Banraas Kecamatan Dungek
49	Suwarma, Dusun Raas RT. 06 RW. 02 Desa Banraas Kecamatan Dungek
50	Mastija, Dusun Ra'as RT. 04 RW. 01 Desa Banraas Kecamatan Dungek

- ✓ Bansos Berupa Sembako untuk Pemulung
Barang yang diserahkan berupa Paket Sembako terdiri dari : 5 Kg Beras, 1 Liter Minyak Goreng, 1 Kg Gula Pasir, 10 Buah Mie Instan

No.	Nama Penerima dan Alamat
1	Hamida, Jl. Dr. Cipto Rt.02 Rw.05 Pabian Kec. Kota Sumenep
2	Moh. Zaini, Jl. Raya Gapura Rt.01 Rw.02 Bangkal Kec. Kota Sumenep
3	Moh. Ridwan, Dusun Kebun Kelapa Rt.02 Rw.03 Kalianget Barat Kec. Kalianget
4	Artimin, Jl. Sartika Rt.07 Rw.04 Kalianget Barat Kec. Kalianget
5	Rusdiyanto, Jl. Mahoni Rt. 10 Rw.03 Pangarangan Kec. Kota Sumenep
6	Sahawi, Jl. Trunjojoyo Gg.Ix Rt.03 Rw.03 Kolor Kec. Kota Sumenep
7	Sutihap, Jl. Menari 3-132 Rt.11 Rw.03 Kepanjin Kec. Kota Sumenep
8	Sudarsono, Jl. Slamet Riyadi No.68 Rt.04 Rw.01 Pabian Kec. Kota Sumenep
9	Haerah, Jl. Slamet Riyadi Gg Kelud Rt.02 Rw.02 Pabian Kec. Kota Sumenep
10	Suryani, Dusun Tarebungan Rt.08 Rw.02 Kalianget Timur Kec. Kalianget
11	Amina, Dusun Tarebungan Rt.08 Rw.02 Kalianget Timur Kec. Kalianget
12	Suriye, Pandian Selatan Rt.01 Rw.05 Desa Pandian
13	Surahmad, Dusun Kaleleng Rt.02 Rw.02 Desa Matanair Kec. Rubaru
14	Tuna, Jl. Kh. Sajad 47 Rt.01 Rw.01 Bangselok Kec. Kota Sumenep
15	Sadimin, Dusun Patenongan Rt. 02. Rw. 03 Parsanga Kec. Kota Sumenep
16	Allama, Dusun Battangan Rt.05 Rw.05 Gapura Timur Kec. Kota Sumenep
17	Rizky Prayoga, Dusun Battangan Rt.06 Rw.05 Gapura Timur Kec. Kota Sumenep
18	Hakimah, Dusun Klampok Timur Rt.15 Rw.07 Rombiya Timur Kec. Ganding
19	Rahema, Dusun Klampok Timur Rt.04 Rw.07 Rombiya Timur Kec. Ganding
20	Tahai, Dusun Tonggal Rt.07 Rw.02 Meddelen Kec.Lenteng
21	Rawiyatun, Dusun Tonggal Rt.08 Rw.02 Meddelen Kec.Lenteng
22	Rahmani, Dusun Tonggal Rt.06 Rw.02 Meddelen Kec. Lenteng
23	Mu'ina, Dusun Tonggal Rt.08 Rw.02 Meddelen Kec. Lenteng
24	Mudiya, Dusun Tonggal Rt.08 Rw.02 Meddelen Kec. Lenteng
25	Moh. Saleh, Dusun Paddusan Rt.02 Rw.02 Bangkal Kec. Kota Sumenep

No.	Nama Penerima dan Alamat
26	Ramlah, Dusun Paddusan Rt.02 Rw.02 Bangkal Kec. Kota Sumenep
27	Hozaima, Dusun Paddusan Rt.02 Rw.02 Bangkal Kec. Kota Sumenep
28	Muhammad, Dusun Kaleleng Rt.04 Rw.02 Matanair Kec. Rubaru
29	Matlawi, Dusun Temor Lorong Rt.06 Rw.01 Kalimo'ok Kec. Kalianget
30	Sahari, Dusun Temor Lorong Rt.06 Rw.01 Kalimo'ok Kec. Kalianget
31	Emmat, Jl. Kh. Zainal Arifin Rt.03 Rw.05 Pandian Kec. Kota Sumenep
32	Haerah, Jl. Slamet Riyadi Rt.02 Rw.02 Pabian Kec. Kota Sumenep
33	Essak, Jl. Kh. Zainal Arifin Rt.03 Rw.05 Pandian Kec. Kota Sumenep
34	Suyono, Dusun Tobato Manding Daya Kec. Manding
35	Moh. Ali I, Dusun Duko Desa Nyabakan Barat Kec. Batang-Batang
36	Nihayati, Dusun Duko Desa Nyabakan Barat Kec. Batang-Batang
37	Barwati, Dusun Duko Desa Nyabakan Barat Kec. Batang-Batang
38	Mumi, Dusun Duko Desa Nyabakan Barat Kec. Batang-Batang
39	Muhareyadusun Duko Desa Nyabakan Barat Kec. Batang-Batang
40	Arnama, Dusun Duko Desa Nyabakan Barat Kec. Batang-Batang
41	Halima, Dusun Duko Desa Nyabakan Barat Kec. Batang-Batang
42	Tija, Dusun Duko Desa Nyabakan Barat Kec. Batang-Batang
43	Duhan, Dusun Duko Desa Nyabakan Barat Kec. Batang-Batang
44	Rina, Dusun Duko Desa Nyabakan Barat Kec. Batang-Batang
45	Nariya, Dusun Duko Desa Nyabakan Barat Kec. Batang-Batang
46	Nia, Jalan Raya Kebunan Kec. Kota Sumenep
47	Mariyani, Jalan Raya Kebunan Kec. Kota Sumenep
48	Juma'ah, Jalan Raya Kebunan Kec. Kota Sumenep
49	Suhrawiya, Dusun Tobato Manding Daya Kec. Manding
50	Ahmadi, Dusun Tobato Manding Daya Kec. Manding

- ✓ Bansos Berupa Sembako untuk Dhuafa
Barang yang diserahkan berupa Paket Sembako terdiri dari : 5 Kg Beras, 1 Liter Minyak Goreng, 1 Kg Gula Pasir, 10 Buah Mie Instan

No.	Nama Penerima dan Alamat
1	Yasmini, Jl. Belimbing 56 RT.05 RW.02 Karangduak Kec. Kota Sumenep
2	Sabiye, Jl. Dr Cipto RT.02 RW.05 Pabian Kec. Kota Sumenep
3	Fatima, Jl. Urip Sumoharjo RT.02 RW.05 Pabian Kec. Kota Sumenep
4	Rukmini, Dusun Podak T.02 RW.03 Kacongkan Kec. Kota Sumenep
5	Fatimatun, Jl. Kh. Mansyur RT.02 rw.06 Pabian Kec. Kota Sumenep

No.	Nama Penerima dan Alamat
6	Nasiya, Jl. Adirasa Gg. Jeruk Kolor Kec. Kota Sumenep
7	Noer Hidayatullah, Jl. Diponegoro RT.03 RW.03 Karangduak Kec. Kota Sumenep
8	Suhartono, Jl. Utara Jembatan RT.09 RW.04 Kebunagung Kec. Kota Sumenep
9	Maimonah, Jl. Pendekar RT.05 RW.05 Kepanjin Kec. Kota Sumenep
10	Rustiani, Jl. Slamet Riyadi RT.04 RW.02 Pabian Kec. Kota Sumenep
11	Sumaiya, Jl. Yos Sudarso RT.01 RW.01 Pabian Kec. Kota Sumenep
12	Darus, Dusun Tarebungan RT.06 RW.02 Kalianget Timur Kec. Kota Sumenep
13	Patma, Dusun Lisun Rt.04 RW.01 Kalianget Timur Kec. Kalianget
14	Nikmah, Jl. Urip Sumoharjo RT.02 RW.01 Pangarangan Kec. Kota Sumenep
15	Roheni, Dusun Tanjung Alang RT.01 RW.01 Padike Kec. Kota Sumenep
16	Sa'diyah, Pandian Tengah RT.02 RW.04 Pandian Kec. Kota Sumenep
17	Haniya, Jl. Kh Zainal Arifin RT.03 RW.05 Pandian Kec. Kota Sumenep
18	Matun, Dusun Kaleleng RT.02 RW.02 Matanair Kec. Rubaru
19	Iya, Dusun Kaleleng RT.06 RW.02 Matanair Kec. Rubaru
20	Saniti, Jl. Merpati RT.02 RW.08 Pamlokkan Kec. Kota Sumenep
21	Subyati, Jl. Merpati RT.04 RW.05 Pamlokkan Kec. Kota Sumenep
22	Saripa, Dusun Battangan RT.05 RW.05 Gapura Timur Kec. Gapura
23	Aisah, Dusun Battangan RT.05 RW.05 Gapura Timur Kec. Gapura
24	Mariyah, Dusun Tanodung RT.02 RW.04 Rombiya Barat Kec. Ganding
25	Liyani, Dusun Klampok Timur RT.16 RW.05 Rombiya Timur Kec. Ganding
26	Saniyeh, Dusun Tonggel RT.08 RW.02 Medelen Kec. Lenteng
27	Ida, Dusun Tonggel RT.08 RW.02 Medelen Kec. Lenteng
28	Kisnawati, Dusun Tonggel RT.08 RW.02 Medelen Kec. Lenteng
29	Nafisah, Dusun Tonggel RT.08 RW.02 Medelen Kec. Lenteng
30	Rahma, Dusun Tonggel RT.08 RW.02 Medelen Kec. Lenteng
31	Agustini, Dusun Paddusan RT.02 R.02 Bangkal Kec. Kota Sumenep
32	Alfiya, Dusun Paddusan RT.02 R.02 Bangkal Kec. Kota Sumenep
33	Siti Novita Sari, Dusun Lalangon RT.05 RW.02 Lalangon Kec. Manding
34	Jumaiyah, Dusun Paddusan RT.02 R.02 Bangkal Kec. Kota Sumenep
35	Djuma'atun, Jl. Pendekar RT.08 RW.03 Kepanjin Kec. Kota Sumenep
36	Maswati, Dusun Kaleleng RT.04 RW.02 Matanair Kec. Rubaru
37	Sulaimah, Dusun Gaber RT.04 RW.05 Soddara Kec. Pasongsongan
38	Mutammimah, Jl. Dr. Wahidin 38 RT.03 RW.02 Pajagalan Kec. Kota Sumenep
39	Tomina, Dusun Jabaran RT.01 RW.03 Batuan Kec. Batuan

No.	Nama Penerima dan Alamat
40	Maisura, Dusun Jabaran RT.01 RW.03 Batuan Kec. Batuan
41	Enni, Jl. Kh Zainal Arifin RT.03 RW.05 Pandian Kec. Kota Sumenep
42	Masfiah, Desa Kaongan Kec. Kota Sumenep
43	Fatmiyatu, Desa Kaongan Kec. Kota Sumenep
44	Siti Fadilah, Desa Kaongan Kec. Kota Sumenep
45	Nur Ainiyah, Desa Kaongan Kec. Kota Sumenep
46	Fatimatun, Dusun Laok RT.04 RW.05 Kec. Dasuk
47	Fatimah, Dusun Laok RT.04 RW.05 Kec. Dasuk
48	Patma, Dusun Laok RT.04 RW.05 Kec. Dasuk
49	Sa'ena, Dusun Laok RT.04 RW.05 Kec. Dasuk
50	Awanon, Dusun Kebun Kelapa RT.07 RW.03 Kalianget Barat Kec. Kalianget

- ✓ Bansos Berupa Sembako untuk Kegiatan Khitanan Masal
Barang yang diserahkan berupa Paket Sembako terdiri dari : 5 Kg Beras, 1 Liter Minyak Goreng, 1 Kg Gula Pasir, 10 Buah Mie Instan

No.	Nama Penerima dan Alamat
1	Generi Putra Zindorf, Dusun Tarebungan RT.04 RW.02 Kalianget Timur Kec. Kalianget
2	Moh. Ziyah Mahayin R, Jl. Dr. Cipto RT.02 RW.05 Pabian Kec. Kota Sumenep
3	Mohammad Vian Aprilogi, Jl. Dr. Wahidin no.10 Pajagalan Kec. Kota Sumenep
4	Mitogi Okta Aldianova, Jl. Bertian RT.03 RW.03 Bangselok Kec. Kota Sumenep
5	Moh. Rio Aksainil Hayat, Jl. Pendekar II/04 RT.08 RW.03 Kepanjin Kec. Kota Sumenep
6	Bima Pramana Pangistu, Jl. Merpati 3A RT.02 RW.05 Pamolokan Kec. Kota Sumenep
7	Ach. Rafli Pratama Putra, Jl. Raya Manding RT.03 RW.04 Pamolokan Kec. Kota Sumenep
8	Raden Rahmat Syarifullah, Jl. Kurma Gg.1 RT.12 RW.04 Pangarangan Kec. Kota Sumenep
9	Rafy Ramadan, Jl. Setia Budi No.1 RT.03 RW.02 Pajagalan Kec. Kota Sumeneo
10	Moh. Ansori, Dusun Barat Gunung RT.08 RW.03 Matanair Kec. Rubaru
11	Ach. Ilham Rabbani, Dusun Barat Gunung RT.08 RW.03 Matanair Kec. Rubaru
12	Aqsyal Bisma Al Jibril N.A, Dusun Tarebungan RT.08 RW.02 Kalianget Timur Kec. Kalianget
13	Wahyu Nurul Hidayah P.S, Dusun Tarebungan RT.08 RW.02 Kalianget Timur Kec. Kalianget
14	Muhammad Alfin Nazil Anwar, Dusun Karajan RT.06 RW.02 Kebunan Kec. Kota Sumenep
15	Fawwas Rakan, Jl. Pahlawan No.29 Karangduak Kec. Kota Sumenep
16	Abdullah Al Mubassyr, Dusun Kalamp Rombiya Timur Kec. Ganding
17	Ahmad Jailani, Dusun Kalamp Rombiya Timur Kec. Ganding
18	Moh. Febri Andriansyah, Dusun Tonggel Desa Meddelan Kec. Lenteng

No.	Nama Penerima dan Alamat
19	Muhammad Firman, Dusun Tonggel Desa Meddelan Kec Lenteng
20	Candra Adinata Djatmiko, Dusun Tonggel Desa Meddelan Kec Lenteng
21	Ahmad Zaki Robbani, Dusun Tonggel Desa Meddelan Kec Lenteng
22	Ja'far Shodiq Asrori, Dusun Tonggel Desa Meddelan Kec Lenteng
23	Moh. Danis Danial, Dusun Tonggel Desa Meddelan Kec Lenteng
24	Aizul Kironi, Dusun Tonggel Desa Meddelan Kec Lenteng
25	Muhammad Rifqi Farhany, Jl. Kh. Zainal Arifin RT.03 RW.02 Bangselok Kec. Kota Sumenep
26	Muhammad Salman Al-Farisi, Jl. Kh. Zainal Arifin RT.03 RW.02 Bangselok Kec. Kota Sumenep
27	Pumama Risky Al-Gibran, Jl. Kh. Zainal Arifin RT.03 RW.02 Bangselok Kec. Kota Sumenep
28	Abdillah Sabilur Ridha, Dusun Bates Barat RT.15 RW.03 Ellak Daya Kec. Lenteng
29	Agil Kanzun Atif Khabrillah, Dusun Kambung Timur RT.10 RW.05 Ellak Daya Kec. Lenteng
30	Ezi Nur Shafa Ababil, Dusun Kambung Timur RT.10 RW.05 Ellak Daya Kec. Lenteng
31	Rafi, Dusun Kambung Timur RT.10 RW.05 Ellak Daya Kec. Lenteng
32	Ahmad Jailani, Dusun Kambung Timur RT.10 RW.05 Ellak Daya Kec. Lenteng
33	Fadil, Dusun Kalompang RT.01 RW.03 Desa Ganding Kec. Manding
34	Moh. Fajar, Dusun Kalompang RT.01 RW.03 Desa Ganding Kec. Manding
35	Hamdan Maskuri A, Dusun Kalompang RT.01 RW.03 Desa Ganding Kec. Manding
36	Robbani, Dusun Kalompang RT.01 RW.03 Desa Ganding Kec. Manding
37	Moh. Fairuz, Dusun Kalompang RT.01 RW.03 Desa Ganding Kec. Manding
38	Abizar Al Ghiifari, Dusun Kalompang RT.01 RW.03 Desa Ganding Kec. Manding
39	Moh. Ali Fikri, Dusun Kalompang RT.01 RW.03 Desa Ganding Kec. Manding
40	Rendi, Dusun Kalompang RT.01 RW.03 Desa Ganding Kec. Manding
41	Ilyas Sugianto, Dusun Duko Desa Nyabakan Barat Kec. Batang-batang
42	Fawaizur Robbani, Dusun Duko Desa Nyabakan Barat Kec. Batang-batang
43	Badriyani, Dusun Duko Desa Nyabakan Barat Kec. Batang-batang
44	Ilzam, Dusun Duko Desa Nyabakan Barat Kec. Batang-batang
45	Moh. Rizel Rifani, Dusun Duko Desa Nyabakan Barat Kec. Batang-batang
46	Moh Noril Fahmi, Dusun Kalompang RT.01 RW.03 Desa Ganding Kec. Manding
47	Moh. Zamroni A, Dusun Kalompang RT.01 RW.03 Desa Ganding Kec. Manding
48	Moh. Hanafi, Dusun Bates Barat RT.15 RW.03 Ellak Daya Kec. Lenteng
49	Alief Ridwan, Dusun Bates Barat RT.15 RW.03 Ellak Daya Kec. Lenteng
50	Wildan Rizky, Dusun Bates Barat RT.15 RW.03 Ellak Daya Kec. Lenteng

- 11) Peningkatan Manajemen Operasional Dharma Wanita Persatuan
 - ✓ Output / Keluaran :
Pengembangan dan keberdayaan dharma wanita kabupaten Sumenep
 - ✓ Outcome / Hasil :
Peningkatan kinerja organisasi wanita di sumenep
- 12) Operasional Pembinaan Kelistrikan Daerah Terpencil dan Kepulauan
 - ✓ Output / Keluaran :
Terbangunnya sarana dan jaringan kelistrikan daerah terpencil dan kepulauan pada Kec. Giligenteng, Kec. Manding, Kec. Arjasa, Kec. Kangayan, Kec. Nonggunong, Kec. Saronggi, Kec. Bluto
 - ✓ Outcome / Hasil :
Terpenuhinya kebutuhan energi listrik untuk daerah terpencil dan kepulauan di Kabupaten Sumenep
 - ✓ Dampak :
Meningkatnya ratio elektrifikasi kelistrikan di Kabupaten Sumenep
- 13) Pemberian Penghargaan Bagi Tokoh Berprestasi
 - ✓ Output / Keluaran :
Terlaksananya pemberian penghargaan bagi tokoh yang berprestasi
 - ✓ Outcome / Hasil :
 - Termotivasinya masyarakat dalam pola pikir, sikap dan tingkah laku positif dengan memberikan tauladan kepada orang lain dari sisi moral, intelektual dan profesionalisme.
 - Terlaksananya pemberian penghargaan kepada 18 orang tokoh yang dianggap berprestasi

2. Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan

- 1) Pemberdayaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)
 - ✓ Output / Keluaran :
Terlaksananya Pemberdayaan BumDes bagi Kepala Desa dan Ketua dan Bendahara BumDes
 - ✓ Outcome / Hasil :
 - Terlatihnya 19 orang Kepala Desa, 19 orang Keua BumDes, 19 orang Bendahara BumDes pada 19 Kecamatan, yang dilaksanakan pada tanggal 3-5 April 2017
 - Terlaksananya study banding ke desa ponggok kecamatan polanharjo kabupaten klaten jawa tengah pada tanggal 5-7April 2017.
 - Meningkatnya tata kelola administrasi dan pengembangan usaha Badan Usaha Milik Desa

3. Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa

- 1) Peringatan Gerakan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat

- ✓ Output / Keluaran :
 - Terlaksananya peringatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat dan Hari Kesatuan Gerak PKK di Tingkat Kabupaten.
 - Meningkatkan kepedulian dan peran aktif masyarakat berdasarkan semangat kebersamaan, kekeluargaan dan kegotong royongan dalam penguatan integritas sosial melalui kegiatan-kegiatan gotong royong untuk mencapai masyarakat menuju keluarga sehat sejahtera.
- ✓ Outcome / Hasil :
 - Bidang Kemasyarakatan yaitu dengan menggerakkan masyarakat sebagai pelaksana dalam kegiatan di Desa dengan bergotong royong seperti kegiatan Renovasi Rumah Tidak Layak Huni
 - Bidang Ekonomi dengan kegiatan pasar murah bagi masyarakat Desa yang diikuti oleh seluruh OPD, BUMN/D di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumenep.
 - Bidang sosial yaitu dengan pemberian bantuan sembako kepada anak yatim dan kaum duafa serta penyandang disabilitas, budaya dengan penampilan kesenian tradisional desa setempat dalam acara pencahangan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat dan agama
 - Bidang Lingkungan dengan adanya kegiatan kerja bhakti masyarakat Desa dengan lokasi sepanjang jalan Desa, pengecatan di area Pemakaman umum, pembersihan sarana ibadah
- ✓ Dampak :

Peningkatan persatuan dan kesatuan serta peran aktif masyarakat dan pemerintah dalam pelaksanaan pembangunan serta meningkatkan rasa memiliki dan rasa tanggung jawab terhadap hasil-hasil pembangunan khususnya di Kabupaten Sumenep dan Meningkatkan semangat kesatuan integritas dan kepedulian peran aktif serta partisipasi masyarakat untuk menuju masyarakat mandiri dan sejahtera

Penerima Belanja Barang yang diserahkan kepada Masyarakat (Untuk Kaum Dhuafa dan Anak Yatim) berupa bantuan sembako.

Barang yang diserahkan berupa Paket Sembako terdiri dari : 5 Kg Beras, 1 Liter Minyak Goreng, 2 Kg Gula Pasir, 15 Buah Mie Instan

No.	Nama dan Alamat
1	Widanto, RT. 02 RW. 01 Dusun Kauman Desa Pinggir Papas Kec. Kalianget
2	Nurhasanah, RT. 02 RW. 01 Dusun Kauman Desa Pinggir Papas Kec. Kalianget
3	Ahmad Riyadi, RT. 02 RW. 01 Dusun Kauman Desa Pinggir Papas Kec. Kalianget

No.	Nama dan Alamat
4	Nada Putri Sulayani, RT. 02 RW. 01 Dusun Kauman Desa Pinggir Papas Kec. Kaliangget
5	Rizal Kurniawan, RT. 02 RW. 01 Dusun Kauman Desa Pinggir Papas Kec. Kaliangget
6	Fajriyatul Masrifah, RT. 04 RW. 01 Dusun Kauman Desa Pinggir Papas Kec. Kaliangget
7	Moh. Gazali, RT. 04 RW. 01 Dusun Kauman Desa Pinggir Papas Kec. Kaliangget
8	Selvianan Dianan Putri, RT. 04 RW. 01 Dusun Kauman Desa Pinggir Papas Kec. Kaliangget
9	M. Kiki Farel, RT. 04 RW. 01 Dusun Kauman Desa Pinggir Papas Kec. Kaliangget
10	Andi Saputra, RT. 04 RW. 01 Dusun Kauman Desa Pinggir Papas Kec. Kaliangget
11	Rofik Ichsan, RT. 05 RW. 02 Dusun Kauman Desa Pinggir Papas Kec. Kaliangget
12	Dinda Sri Wahyuningsih, RT.05 RW.02 Dusun Kauman Desa Pinggir Papas Kec. Kaliangget
13	Kholifatul Jannah, RT. 07 RW. 01 Dusun Kauman Desa Pinggir Papas Kec. Kaliangget
14	Sri Suci Wulandari, RT. 07 RW. 01 Dusun Kauman Desa Pinggir Papas Kec. Kaliangget
15	Melly Rohani Filjannah, RT. 01 RW. 03 Dusun Ageng Desa Pinggir Papas Kec. Kaliangget
16	Yanto, RT. 03 RW. 03 Dusun Ageng Desa Pinggir Papas Kec. Kaliangget
17	Triyana Dewi, RT. 03 RW. 03 Dusun Ageng Desa Pinggir Papas Kec. Kaliangget
18	Yolanda Robbianti, RT. 04 RW. 03 Dusun Ageng Desa Pinggir Papas Kec. Kaliangget
19	Zidny Ilma Rabbani, RT. 04 RW. 03 Dusun Ageng Desa Pinggir Papas Kec. Kaliangget
20	Massuri, RT. 05 RW. 03 Dusun Ageng Desa Pinggir Papas Kec. Kaliangget
21	Mas'odiyah, RT. 05 RW. 03 Dusun Ageng Desa Pinggir Papas Kec. Kaliangget
22	Siti Nur Kamila, RT. 05 RW. 03 Dusun Ageng Desa Pinggir Papas Kec. Kaliangget
23	Safitria Ningsih, RT. 05 RW. 03 Dusun Ageng Desa Pinggir Papas Kec. Kaliangget
24	Anita, RT. 06 RW. 03 Dusun Ageng Desa Pinggir Papas Kec. Kaliangget
25	Ach. Yasmin Roihan, RT. 07 RW. 04 Dusun Ageng Desa Pinggir Papas Kec. Kaliangget
26	Moh. Faruq Anas, RT. 07 RW. 04 Dusun Ageng Desa Pinggir Papas Kec. Kaliangget
27	Auliyaturrohma, RT. 07 RW. 04 Dusun Ageng Desa Pinggir Papas Kec. Kaliangget
28	Sulastri, RT. 07 RW. 04 Dusun Ageng Desa Pinggir Papas Kec. Kaliangget
29	Achmad Febri Tri W, RT. 08 RW. 04 Dusun Ageng Desa Pinggir Papas Kec. Kaliangget
30	Fatlika Hendriyani, RT. 08 RW. 04 Dusun Ageng Desa Pinggir Papas Kec. Kaliangget
31	Riki Hidayatullah, RT. 08 RW. 04 Dusun Ageng Desa Pinggir Papas Kec. Kaliangget
32	Moh. Wahyu Cahyadi, RT. 08 RW. 04 Dusun Ageng Desa Pinggir Papas Kec. Kaliangget

No.	Nama dan Alamat
33	Ach. Ainur Fuad, RT. 08 RW. 04 Dusun Ageng Desa Pinggir Papas Kec. Kalianget
34	M. Ainurrahman, RT. 08 RW. 04 Dusun Ageng Desa Pinggir Papas Kec. Kalianget
35	Littysia Arini, RT. 01 RW. 05 Dusun Dhalem Desa Pinggir Papas Kec. Kalianget
36	Putri Ayuni, RT. 01 RW. 05 Dusun Dhalem Desa Pinggir Papas Kec. Kalianget
37	Windy Herawati, RT. 01 RW. 05 Dusun Dhalem Desa Pinggir Papas Kec. Kalianget
38	Moh. Kutsi, RT. 01 RW. 05 Dusun Dhalem Desa Pinggir Papas Kec. Kalianget
39	Syaiful Rahmatullah, RT. 01 RW. 05 Dusun Dhalem Desa Pinggir Papas Kec. Kalianget
40	Moh. Farhan Azis, RT. 01 RW. 05 Dusun Dhalem Desa Pinggir Papas Kec. Kalianget
41	Jamaluddin, RT. 04 RW. 06 Dusun Dhalem Desa Pinggir Papas Kec. Kalianget
42	Holifaturrahmah, RT. 04 RW. 06 Dusun Dhalem Desa Pinggir Papas Kec. Kalianget
43	Mastiyana, RT. 04 RW. 06 Dusun Dhalem Desa Pinggir Papas Kec. Kalianget
44	Yayuk Rosita, RT. 04 RW. 06 Dusun Dhalem Desa Pinggir Papas Kec. Kalianget
45	Rodf Farhani, RT. 04 RW. 06 Dusun Dhalem Desa Pinggir Papas Kec. Kalianget
46	Putri Cika Andriyani, RT. 05 RW. 06 Dusun Dhalem Desa Pinggir Papas Kec. Kalianget
47	Moh. Rijalullah, RT. 05 RW. 06 Dusun Dhalem Desa Pinggir Papas Kec. Kalianget
48	Siti Fatima, RT. 05 RW. 06 Dusun Dhalem Desa Pinggir Papas Kec. Kalianget
49	Adit Sucipto, RT. 06 RW. 06 Dusun Dhalem Desa Pinggir Papas Kec. Kalianget
50	Ibnu Hannan Jailani, RT. 06 RW. 06 Dusun Dhalem Desa Pinggir Papas Kec. Kalianget

2) Fasilitasi Pendataan Profil Desa

- ✓ Output / Keluaran :
Mengetahui Tingkat potensi dan perkembangan desa
- ✓ Outcome / Hasil :
Sebagai acuan perencanaan program yang berbasis data profil

4. Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa

1) Pembekalan Kepala Desa

- ✓ Output / Keluaran :
Terlaksananya Kegiatan Pembekalan Kepala Desa
- ✓ Outcome / Hasil :
 - Terlaksananya Kegiatan Pembekalan Kepala Desa pada tanggal 19 s/d 25 Maret 2017 yang diikuti diikuti oleh 35 kepala desayang dilaksanakan di Hotel Utami Sumenep

- Peningkatan kualitas SDM Kepala Desa tentang :
 - Peraturan Perundang- Undangan tentang pemerintahan desa
 - Pengelolaan keuangan desa
 - Peningkatan wawasan kebangsaan dan disiplin
 - Peningkatan pemahaman tentang pengawasan di desa
 - ✓ Dampak :
Peningkatan kualitas SDM Kepala Desa dalam mewujudkan desa yang maju mandiri dan taat hukum.
- 2) Pelantikan Kepala Desa
- ✓ Output / Keluaran :
Terlantiknya 28 kepala desa terpilih oleh Bupati Sumenep
 - ✓ Outcome / Hasil :
Kepala Desa yang dilantik dapat menjalankan roda pemerintahan di Desa
 - ✓ Dampak :
Desa memiliki sosok pimpinan dalam penyelenggaraan pemerintahan sehingga tidak terjadi kekosongan jabatan.
- 3) Penyusunan Peraturan Perundang-undangan tentang Desa
- ✓ Output / Keluaran :
Penyusunan Peraturan Perundang undangan tentang Desa tahun anggaran 2017 adalah Terbitnya peraturan tentang Desa di tahun 2017 antara lain :
 - Peraturan Bupati Sumenep Nomor 33 tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan SOTK Pemerintah Desa
 - Peraturan Bupati Sumenep Nomor 34 tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa
 - Peraturan Bupati Sumenep Nomor 71 tahun 2017 tentang Perubahan Perbup Nomor 14 tahun 2016 tentang Pedoman Pencalonan Pemilihan Pengangkatan Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa Antar Waktu melalui Musyawarah Desa (PAW)
 - Peraturan Bupati Sumenep Nomor 72 tahun 2017 tentang Perubahan Perbup Nomor 34 tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa
 - Peraturan Bupati Sumenep tentang Tata Cara Pengelolaan Aset Desa
 - ✓ Outcome / Hasil :
 - Terselenggaranya Pemerintahan Desa yang sesuai dengan peraturan Perundang- undangan berlaku.
 - Desa memiliki dasar hokum dalam penyelenggaraan pemerintahan yaitu Peraturan Bupati.
 - Penurunan tingkat penyimpangan penyelenggaraan pemerintahan desa
- 4) Perumusan Pedoman dan Penghitungan Alokasi Dana Desa Sumber Dana APBN

- ✓ Output / Keluaran :
 - Penyusunan Peraturan Desa terkait dengan pengelolaan Keuangan Desa, menyusun Draft Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Keuangan Desa
 - Penyusunan Peraturan Desa terkait dengan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Pembagian dan Penetapan Dana Desa
 - Penyusunan Peraturan Desa terkait dengan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Alokasi Dana Desa
 - ✓ Outcome / Hasil :
 - Penyelenggaraan Pengelolaan Keuangan Desa yang sesuai dengan peraturan Perundang- undangan berlaku.
 - Desa memiliki dasar hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan terkait pengelolaan keuangan yaitu Peraturan Bupati
 - Penurunan tingkat penyimpangan tentang pengelolaan keuangan desa baik ADD maupun DD
- 5) Penanganan Kasus pada Wilayah Pemerintahan Desa
- ✓ Output / Keluaran :
Penyelesaian Kasus di desa yang difasilitasi oleh tim tingkat kabupaten.
 - ✓ Outcome / Hasil :
Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang Kondusif, adapun jenis kasus yang terjadi di desa antara lain :
 - Pengelolaan Keuangan
 - Pemilihan Kepala Desa
 - Aset Desa
 - Aparat Pemerintah Desa
 - KKN tingkat Desa
 - ✓ Dampak :
Terwujudnya pemerintahan desa yang aman dan penurunan tingkat penyimpangan penyelenggaraan pemerintahan desa
 - ✓ Daftar Penanganan Kasus Tahun 2017 :

No	Desa / Kecamatan	Masalah	Hasil Penyelesaian	Dasar	Keterangan
1	2	3	4	5	6
1	Kecamatan Masalembu	Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa	memfasilitasi pihak kec. melakukan pergantian perangkat desa berdasarkan Peraturan Bupati No 34 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Surat Kepala Desa	Selesai
2	Desa Padike Kecamatan Talango	bebasnya Kepala Desa Padike setelah menjani hukuman kurungan	memberikan sosialisasi dan pemahaman kepada Tokoh Masyarakat sesuai Peraturan	Laporan Masyarakat	selesai

No	Desa / Kecamatan	Masalah	Hasil Penyelesaian	Dasar	Keterangan
1	2	3	4	5	6
		penjara atas kasus penyalahgunaan NARKOBA a.n Syafa'atun Nuriyah	Perundang-undangan yang berlaku.		
3	Desa Pandian Kecamatan Kota Sumenep	Ketua BPD tidak aktif dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sehingga mengganggu penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Fasilitasi pemilihan Ketua BPD di Desa Pandian	Laporan LSM	Selesai
4	Desa Guluk- Guluk Kecamatan Guluk- Guluk	Kepala Desa Guluk- Guluk terjerat kasus Hukum dalam masalah Raskin	Fasilitasi Bidang Pemdes ke Pengadilan untuk men dapatkan Putusan Tetap dari Pengadilan sebagai dasar pemberhentian kepala desa	Laporan Masyarakat	Pemberhentian tetap Kepala Desa
5	Desa Guluk- Guluk Kecamatan Guluk- Guluk	Kekosongan kepala desa setelah pemberhentian tetap Kades Guluk- Guluk	Diterbitkannya Surat Perintah Bupati Sumenep Nomor : 821.4/177/435. 203.3/2017 terkait Pe ngangkatan Pelaksana Tugas (Pit.) Sekdes Guluk-Guluk Kec. Guluk-Guluk dari unsur PNS.	Laporan Masyarakat	Pengangkatan Pit Sekdes
6	Desa Lombang Kecamatan Giligenting	Pengelolaan Tanah Kas Desa (TKD) Desa Lombang Kecamatan Giligenting yang dikuasai salah satu masyarakat	rapat koordinasi mengha dirkan Perangkat Desa dengan Masyarakat (Pe ngelolaan Tanah Kas Desa Desa Lombang) dengan penunjukan berkas berkas pendukung dan selanjutnya Tim melakukan cek ke lokasi permasalahan	Laporan Kepala Desa	Proses di BPN
7	Desa Kalim'o'ok Kecamatan Kalianget	Pemberhentian Kepala Desa Kalim'o'ok Kec. Kalianget & Pengisian Pelaksana Tugas (Pit) Sekretaris Desa Kalim'o'ok Kecamatan Kalianget	Diterbitkannya Surat Perintah Bupati Sumenep Nomor : 821.4/238/435. 203.3/2017 terkait Pengangkatan Pelaksana Tugas (Pit.) Sekdes Kalim'o'ok Kecamatan Kalianget dari unsur PNS	Laporan Kecamatan	Pengangkatan Pit Sekdes
8	Desa Lapa Laok Kecamatan Dungkek	kasus hukum Kepala Desa Lapa Laok Kec. Dungkek Surat Kepu tusan Bupati Nomor : 188/482/KEP/435.013/2016 tentang Pember hentian Sementara Kepala Desa Lapa Laok Kecamatan Dungkek dan	tim melalui Camat mengangkat Pit. Sekretaris Desa dari Perangkat Desa yang ada selanjutnya diusulkan pengajuan Pelaksana Tugas (Pit.) Sekretaris Desa dari unsur PNS dalam proses pengusulan	Laporan Kecamatan	Pengangkatan Pit Sekdes

No	Desa / Kecamatan	Masalah	Hasil Penyelesaian	Dasar	Keterangan
1	2	3	4	5	6
		pemunduran diri Sekretaris Desa dari Jabatannya			
9	Desa Nyabakan Timur Kecamatan Batang Batang	Pemilihan Kepala Desa Nyabakan Timur Kec. Batang Batang sebagai mana gugatan Tata Usaha Negara dari Mery Andriani Purnomo Putri kepada Bupati Sumenep dengan register perkara Nomor 23/G/2017/PTUN.SBY	Bidang Pemdes dalam hal ini Kasi Perangkat Desa menjadi saksi ahli dalam sidang kasus tersebut	Surat Register Perkara dari PTUN Nomor 23/G/2017/PTU N.SBY	Banding
10	Desa Montoma Kecamatan Pasongsongan	Laporan LSM atas Desa Montoma Kecamatan Pasongsongan atas penyalahgunaan Dana Desa	Mendampingi Satgas DD dari Kementerian Pembangunan Desa Tertinggal monitoring Pelaksanaan Dana Desa	Laporan dari LSM	Revisi SPJ disesuaikan dengan Kegiatan Berdasarkan APBDesa
11	Desa Sekecamatan Gayam	Laporan LSM atas penyalahgunaan Dana Desa	Mendampingi Satgas DD dari Kementerian Pembangunan Desa Tertinggal monitoring Pelaksanaan Dana Desa	Laporan dari LSM	Revisi SPJ disesuaikan dengan Kegiatan Berdasarkan APBDesa
12	Desa Sekecamatan Nunggunong	Laporan LSM atas penyalahgunaan Dana Desa	Mendampingi Satgas DD dari Kementerian Pembangunan Desa Tertinggal monitoring Pelaksanaan Dana Desa	Laporan dari LSM	Revisi SPJ disesuaikan dengan Kegiatan Berdasarkan APBDesa
13	Desa Brakas Kecamatan Raas	Pemberhentian Sekretaris Desa dan Pengangkatan Sekretaris Desa Baru	Fasilitasi penyelesaian berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Surat Camat	Selesai
14	Desa Angon- Angon Kecamatan Raas	SILTAP perangkat Desa dan BPD tidak diberikan oleh Kepala Desa	Memfasilitasi ke Pihak Kecamatan agar menindaklanjuti laporan tersebut agar memberikan teguran ke Kades	Laporan Perangkat Desa	Dalam Proses Menunggu Petunjuk Lebih Lanjut
15	Desa Ambunten Barat Kecamatan Ambunten Barat	Perangkat Desa berumur lebih dari 60 tahun tidak sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku	Memfasilitasi ke pihak Kecamatan dan Desa agar menindaklanjuti laporan tersebut dan segera melakukan penggantian perangkat desa berdasarkan Perbub Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan	Laporan Masyarakat	Dalam Proses di Pemerintahan Desa

No	Desa / Kecamatan	Masalah	Hasil Penyelesaian	Dasar	Keterangan
1	2	3	4	5	6
			Pemberhentian Perangkat Desa		
16	Desa Kertabarat Kecamatan Dasuk	Terdapat kegiatan Pembangunan Musholla menggunakan ADD tidak sesuai dengan juknis ADD	Pengembalian Anggaran Ke Kas Desa	Konsultasi Pendamping Desa	Selesai
17	Desa Tenonan, Desa Manding Laok, Desa Jabaan Desa Gunung Kembar Kecamatan Manding	Pemberhentian dan Pengangkatan Sekretaris Desa Baru dampak dari Terpilihnya Kepala desa Baru	memfasilitasi pihak kecamatan melakukan pergantian perangkat desa berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Surat Camat	selesai
18	Desa Banjar Barat Kecamatan Gapura	Tukar Guling Tanah Kas Desa yang pemanfaatannya untuk Balai Desa	memfasilitasi dalam proses sertifikasi Tanah Kas Desa tersebut	Laporan Kepala Desa	Proses Penerbitan Peta Bidang dari BPN
19	Desa Sendir Kecamatan Lenteng	Laporan terkait Pembangunan Jembatan Desa melalui Dana Desa yang tidak sesuai dengan RAB	Monitoring dan Evaluasi Tim Kabupaten Ke Lokasi	Laporan LSM	Sesuai dengan RAB (selesai)
20	Desa Batuan Kecamatan Batuan	Kegiatan Jambanisasi tidak terlaksana	Memfasilitasi desa melalui kecamatan memberikan solusi berdasarkan peraturan yang berlaku	Laporan LSM	anggaran di kembalikan ke kas desa dan menjadi SILPA
21	Desa Tanjung Kecamatan Saronggi	Pungutan Desa di Pelabuhan Desa dikarenakan Perdes tidak dievaluasi Oleh Kabupaten	Fasilitasi Pemerintahan Desa Tanjung dengan Bagian Hukum terkait Perdes Pungutan Tersebut	Laporan Masyarakat	
22	Desa Saroka dan Desa Saronggi Kecamatan Saronggi	Sengketa Tanah Kas Desa antara Desa Saronggi dan Desa Saroka yang terletak di Desa Muangan	Permutakhiran data Tanah Kas Desa Berdasarkan Data Aset Desa yang ada Di Kabupaten	Laporan Kepala Desa Muangan	Berdasarkan inventarisasi data merupakan Tanah Kas Desa Saroka
23	Desa Kapedi Kecamatan Bluto	Pemberhentian dan Pengangkatan Sekretaris Desa Baru dampak dari Terpilihnya Kepala desa Baru	memfasilitasi pihak kecamatan melakukan pergantian perangkat desa berdasarkan Perbub Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Surat Kepala Desa	Selesai
24	Desa Sendang Kecamatan Pragaan	Pemberhentian dan Pengangkatan Sekretaris Desa Baru dampak dari Terpilihnya Kepala desa	memfasilitasi pihak kecamatan melakukan pergantian perangkat desa berdasarkan Perbub Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan	Surat Camat	selesai

No	Desa / Kecamatan	Masalah	Hasil Penyelesaian	Dasar	Keterangan
1	2	3	4	5	6
		Baru	Pemberhentian Perangkat Desa		
25	Desa Jukong- Jukong Kepala Desa Kangayan	APBDesa tidak disetujui oleh Kepala Desa	Memfasilitasi Desa Melalui Kecamatan Melaksanakan Musrenbang kembali	Laporan Kepala Desa	Selesai
26	Desa Pangarangan Kecamatan Kota	Pemanfaatan Tanah Kas Desa Pasar Semi Modern	Memfasilitasi mengada kan rapat dengan tim kabupaten dengan menerbitkan surat ijin Bupati terkait pemanfatan Tanah Kas Desa	Surat Kepala Desa	Dalam Proses Penerbitan Izin Bupati
27	Desa Pamolokan Kecamatan Kota	Pemanfaatan Tanah Kas Desa Pasar Hewan	Memfasilitasi mengada kan rapat dengan tim kabupaten dengan menerbitkan surat ijin Bupati terkait pemanfatan Tanah Kas Desa	Surat Kepala Desa	Dalam Proses Penerbitan Izin Bupati
28	Desa Sekabupaten Sumenep	Terdapat Kesalahan Penulisan Nama Desa Dalam Permendagri 56 tahun 2015 sehingga menghambat pencairan DD tahap II	Koordinasi Ke Kemendagri dan Kementrian Desa Terkait penerbitan surat Keterangan Kesalahan tersebut	Laporan KPPN Pamekasan	Selesai
29	Desa Pajenangger Kecamatan Arjasa	Usulan Pemekaran / Pemecahan Desa Pajenangger Kecamatan Arjasa	Memeriksa Data dan Berkas Persyaratan Pembentukan Desa Baru	Surat Kecamatan Arjasa	Tidak memenuhi syarat karena jumlah penduduk tidak mencukupi
30	Desa Marengan Daya	Tidak dilaksanakan Bantuan Keuangan Provinsi berupa mobil sehat	Memberikan teguran desa melalui Kecamatan agar segera menyelesaikan dan menindaklanjuti pembelian Mobil Sehat	Surat Teguran dari Biro Adpurn Provinsi	Selesai

Dari program dan kegiatan tersebut diatas telah mendukung terhadap terwujudnya Pemenuhan Kebutuhan Dasar (sandang, pangan, papan, pendidikan dan kesehatan), Pemenuhan / pembangunan sarana dan prasarana, Pengembangan potensi ekonomi lokal serta Pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan.

Adapun langkah-langkah yang dilakukan untuk mewujudkan pencapaian Peryataan Kinerja dalam pemberdayaan masyarakat dan desa adalah:

- a. Meningkatkan kemampuan masyarakat melalui intervensi berbagai program pembangunan, agar masyarakat dapat mencapai tingkat kemandirian yang di harapkan.

- b. Memberikan wewenang secara profesional kepada masyarakat dalam pengambilan keputusan dalam rangka membangun diri dan lingkungannya secara mandiri.
- c. Meningkatkan kemampuan masyarakat memenuhi kebutuhannya dengan memanfaatkan fasilitas pemerintah melalui 4 (empat) akses, yakni :
- Akses terhadap sumber daya;
 - Akses terhadap teknologi, yakni suatu metode dan teknik pelaksanaan kegiatan dengan cara lebih baik dan lebih efisien, termasuk akses mendayagunakan prasarana dan sarana produksi, dan peningkatan keterampilan berusaha;
 - Akses terhadap informasi pasar dan kemudahan pemasaran hasil usaha; Akses terhadap sumber pembiayaan melalui bantuan dan skim kredit untuk modal usaha ekonomi produktif.
- d. Mengembangkan kemampuan, kemandirian, dan peran aktif masyarakat melalui :
- Keberpihakan dan mendasarkan diri pada kebutuhan dasar masyarakat;
 - Mengembangkan inspirasi, aspirasi, dan partisipasi masyarakat;
 - Menggerakkan dan menghidupkan aktivitas ekonomi rakyat;
 - Pengorganisasian dan penguatan kelembagaan masyarakat yang dikelola dan menjadi penanggung jawab masyarakat sendiri;
 - Bantuan, bimbingan dan pembinaan pemerintah merupakan tanggung jawab dari semua instansi melalui koordinasi dan keterpaduan;
 - Pemberdayaan masyarakat desa dilaksanakan di perdesaan dan perkotaan;
 - Pengembangan teknologi tepat guna dengan mengutamakan jenis teknologi padat karya.

B. REALISASI ANGGARAN

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Rekapitulasi Realisasi Anggaran Program Kegiatan APBD Kabupaten Sumenep Tahun Anggaran 2017

No.	Program / Kegiatan	Uraian Indikator	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Sisa Anggaran (Rp.)	Realisasi Anggaran (%)	Capaian (%)
I	BELANJA TIDAK LANGSUNG		<u>2.947.794.304</u>	<u>2.613.346.370</u>	<u>334.447.934</u>	<u>88,65%</u>	<u>100,00%</u>
1	Gaji Dan Tunjangan	Tercapainya Kesejahteraan 45 orang Pegawai	2.606.634.304	2.333.046.370	273.587.934	89,50%	100,00%
2	Tambahan Penghasilan PNS	Tercapainya Kesejahteraan 45 orang Pegawai	341.160.000	280.300.000	60.860.000	82,16%	100,00%

LAKIP DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA – Tahun 2017

BAB III Akuntabilitas Kinerja

No.	Program / Kegiatan	Uraian Indikator	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Sisa Anggaran (Rp.)	Realisasi Anggaran (%)	Capaian (%)
II	BELANJA LANGSUNG		<u>13.136.869.464</u>	<u>11.224.484.540</u>	<u>.912.384.924</u>	<u>85,44%</u>	<u>100,00%</u>
1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		<u>506.965.100</u>	<u>433.255.193</u>	<u>3.709.907</u>	<u>85,46%</u>	<u>100,00%</u>
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Peningkatan administrasi surat keluar masuk secara tertib	6.300.000	4.189.025	2.110.975	66,49%	100,00%
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	Terpenuhinya Jasa Komunikasi, Air dan Listrik (penambahan menjadi 23.000 VA)	126.000.000	101.419.072	24.580.928	80,49%	100,00%
3	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Tercapainya jasa pemeliharaan / perijinan kendaraan dinas (4 mobil dan 53 sepeda motor)	23.544.850	12.642.100	10.902.750	53,69%	100,00%
4	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Terlaksananya administrasi keuangan secara tepat waktu	5.526.000	5.526.000	-	100,00%	100,00%
5	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tercapainya kebersihan lingkungan kantor	32.174.000	32.142.000	32.000	99,90%	100,00%
6	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Terlaksananya administrasi perkantoran	43.680.850	34.387.570	9.293.280	78,72%	100,00%
7	Penyediaan Barang Cetak Dan Penggandaan	Terlaksananya administrasi perkantoran	12.075.000	9.215.000	2.860.000	76,31%	100,00%
8	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Terciptanya penyelenggaraan pelaksanaan tugas	5.175.000	4.800.000	375.000	92,75%	100,00%
9	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Peningkatan wawasan dan pengetahuan aparatur	28.800.000	27.360.000	1.440.000	95,00%	100,00%
10	Penyediaan Makanan Dan Minuman	Terjaminnya kelancaran pelaksanaan rapat	49.680.000	40.900.000	8.780.000	82,33%	100,00%
11	Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi	Peningkatan konsultasi/koordinasi dalam pelaksanaan	126.169.400	122.789.426	3.379.974	97,32%	100,00%

LAKIP DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA – Tahun 2017

BAB III Akuntabilitas Kinerja

No.	Program / Kegiatan	Uraian Indikator	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Sisa Anggaran (Rp.)	Realisasi Anggaran (%)	Capaian (%)
	Ke Luar Daerah	tugas ke luar daerah					
12	Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Dalam Daerah	Peningkatan koordinasi/monitoring dalam pelaksanaan tugas dalam daerah	22.390.000	12.835.000	9.555.000	57,32%	100,00%
13	Pameran Pembangunan	Meningkatnya pemahaman dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan	25.450.000	25.050.000	400.000	98,43%	100,00%
2.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		<u>128.323.286</u>	<u>91.980.497</u>	<u>36.342.789</u>	<u>71,68%</u>	<u>100,00%</u>
1	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terjaminnya pemeliharaan Gedung Kantor	53.337.286	27.609.200	25.728.086	51,76%	100,00%
2	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terjaminnya pemeliharaan kendaraan dinas operasional	58.586.000	54.596.297	3.989.703	93,19%	100,00%
3	Pemeliharaan rutin / berkala peralatan gedung kantor	Terjaminnya pemeliharaan peralatan Kantor	16.400.000	9.775.000	6.625.000	59,60%	100,00%
3.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		<u>20.905.000</u>	<u>18.470.000</u>	<u>2.435.000</u>	<u>88,35%</u>	<u>100,00%</u>
1	Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran	terlaksananya Penyusunan laporan secara tepat waktu	4.575.000	3.962.500	612.500	86,61%	100,00%
2	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	terlaksananya Penyusunan laporan akhir tahun tepat waktu	2.750.000	2.387.500	362.500	86,82%	100,00%
3	Penyusunan Penetapan Kinerja	terlaksananya Penyusunan tapkin dan lakip tepat waktu	3.750.000	3.525.000	225.000	94,00%	100,00%
4	Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	terlaksananya Penyusunan LPPD & LKPJ secara tepat waktu	2.530.000	2.485.000	45.000	98,22%	100,00%

LAKIP DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA – Tahun 2017

BAB III Akuntabilitas Kinerja

No.	Program / Kegiatan	Uraian Indikator	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Sisa Anggaran (Rp.)	Realisasi Anggaran (%)	Capaian (%)
5	Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran SKPD	terlaksananya Penyusunan rencana kerja tepat waktu	7.300.000	6.110.000	1.190.000	83,70%	100,00%
4.	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan		<u>11.219.325.078</u>	<u>9.758.701.350</u>	<u>1.460.623.728</u>	<u>86,98%</u>	<u>100,00%</u>
1	Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Teknis dan Masyarakat	Meningkatnya keterampilan UKM dalam pengelolaan rumput laut menjadi produk non konsumsi (sabun dan shampoo) untuk 35 peserta dari 7 UKM dan pengelolaan design produk dan kemasan dengan sentuhan teknologi untuk 25 orang peserta dari 5 UKM.	120.000.000	97.869.170	22.130.830	81,56%	100,00%
2	Jalin Matra	Terlaksananya kegiatan monitoring, evaluasi kegiatan program Jalin Matra Provinsi Jawa Timur Tahun 2016 di Kab. Sumenep. 1). Penanggulangan Kerentanan Kemiskinan (132 RTS) 2). Penanggulangan Feminisasi Kemiskinan (PFK) / 905 RTS	98.598.700	81.804.750	16.793.950	82,97%	100,00%
3	Pengendalian, Pemantauan dan Evaluasi Pengelolaan Keuangan Desa	Terlaksananya kegiatan monitoring, evaluasi dan pembinaan program Pengendalian Pemantauan dan Evaluasi Pengelolaan Keuangan Desa di Kab. Sumenep Tahun 2017 (287 Desa)	195.256.000	159.928.255	35.327.745	81,91%	100,00%
4	Pemasarakan Teknologi Tepat Guna Melalui Pos Pelayanan Teknologi Tepat Guna	Terampilnya Pengurus Posyantek Tentang Tugas Dan Fungsinya berjumlah 30 orang dari 5 kecamatan yaitu	27.000.000	15.150.000	11.850.000	56,11%	100,00%

No.	Program / Kegiatan	Uraian Indikator	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Sisa Anggaran (Rp.)	Realisasi Anggaran (%)	Capaian (%)
		Kec. Kalianget, Kec. Dasuk, Kec. Ambunten, Kec. Rubaru dan Kec. Ambunten, masing – masing kecamatan terdiri dari 6 (enam) orang tokoh pemuda dari kecamatan.					
5	Pemberdayaan Penyandang Disabilitas	Membantu mendorong ketahanan sosial ekonomi dalam memenuhi kebutuhan hidup dasarnya serta memberikan motivasi berusaha serta kemampuan dalam meningkatkan kesejahteraannya kepada 15 orang penyandang disabilitas	5.000.000	4.960.000	40.000	99,20%	100,00%
6	Pengembangan Inovasi Teknologi Tepat Guna	Tersedianya 1 Alat Teknologi Tepat Guna Sederhana dan Inovatif (Penetas Telur Otomatis dengan Kontrol HP).	50.000.000	47.173.100	2.826.900	94,35%	100,00%
7	Fasilitasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Desa	Terlaksananya kegiatan Pelatihan Sistem Keuangan Desa bagi Aparat Kecamatan, Operator Desa dan Tenaga Pendamping Desa dalam rangka entry Data kedalam aplikasi Siskeudes 1). Terlatihnya 56 orang Aparat Kecamatan 2). Terlatihnya 27 orang Pendamping Desa 3). Terlatihnya 330 orang Operator Desa 4). Terlaksanya Entry Data 330 APBDes Tahun 2017	338.654.500	299.582.545	39.071.955	88,46%	100,00%
8	Pilot Proyek Desa Membangun	Terciptanya Kemitraan Pemerintah Desa dan Masyarakat Desa	30.000.000	27.935.000	2.065.000	93,12%	100,00%

LAKIP DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA – Tahun 2017

BAB III Akuntabilitas Kinerja

No.	Program / Kegiatan	Uraian Indikator	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Sisa Anggaran (Rp.)	Realisasi Anggaran (%)	Capaian (%)
9	Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga	Memandirikan PKK se Kabupaten Sumenep secara profesional dan mandiri	2.000.000.000	1.340.981.530	659.018.470	67,05%	90,00%
10	Pemberdayaan dan Penguatan Lembaga Organisasi Wanita	Peningkatan kinerja organisasi wanita di sumenep	400.000.000	345.223.000	54.777.000	86,31%	90,00%
11	Peningkatan Manajemen Operasional Dharma Wanita Persatuan	Peningkatan kinerja organisasi wanita di sumenep	137.553.500	76.655.750	60.897.750	55,73%	85,00%
12	Operasional Pembinaan Kelistrikan Daerah Terpencil dan Kepulauan	Terbangunnya sarana dan jaringan kelistrikan daerah terpencil dan kepulauan pada Kecamatan : Giligenting, Manding, Arjasa, Kangayan, Nonggunong, Saronggi, Bluto	7.567.262.378	7.057.646.250	509.616.128	93,27%	100,00%
13	Pemberian Penghargaan Bagi Tokoh Berprestasi	Terlaksananya pemberian penghargaan kepada 18 orang tokoh yang dianggap berprestasi	250.000.000	203.792.000	46.208.000	81,52%	100,00%
5.	Program Pengembangan Ekonomi Perdesaan		<u>250.000.000</u>	<u>230.604.000</u>	<u>19.396.000</u>	<u>92,24%</u>	<u>100,00%</u>
1	Pemberdayaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)	Terlatihnya 19 orang Kepala Desa, 19 orang Ketua dan 19 orang Bendahara BUMDes, dalam upaya peningkatan tata kelola administrasi dan pengembangan usaha Badan Usaha Milik Desa	250.000.000	230.604.000	19.396.000	92,24%	100,00%
6.	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa		<u>85.000.000</u>	<u>63.327.500</u>	<u>21.672.500</u>	<u>74,50%</u>	<u>100,00%</u>
1	Peringatan Gerakan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Terlaksananya peringatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat dan Hari Kesatuan Gerak PKK di	35.000.000	29.800.000	5.200.000	85,14%	100,00%

LAKIP DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA – Tahun 2017

BAB III Akuntabilitas Kinerja

No.	Program / Kegiatan	Uraian Indikator	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Sisa Anggaran (Rp.)	Realisasi Anggaran (%)	Capaian (%)
		Tingkat Kabupaten					
2	Fasilitasi Pendataan Profil Desa	Terlaksananya Penataan Pemerintah Desa dan Lembaga Kemasyarakatan Desa pada 40 Desa / 18 Kecamatan	50.000.000	33.527.500	16.472.500	67,06%	85,00%
7.	Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa		<u>926.351.000</u>	<u>628.146.000</u>	<u>298.205.000</u>	<u>67,81%</u>	<u>100,00%</u>
1	Pembekalan Kepala Desa	Terlaksananya Kegiatan Pembekalan Kepala Desa bagi 35 orang Kepala Desa	285.669.100	267.077.100	18.592.000	93,49%	100,00%
2	Pelantikan Kepala Desa	Terlaksananya Pelantikan oleh Bupati Sumenep bagi 28 orang Kepala Desa	161.663.900	105.945.000	55.718.900	65,53%	100,00%
3	Penyusunan Peraturan Perundang-undangan tentang Desa	Terbitnya Peraturan Bupati Sumenep Nomor : 33, 34, 71, 72, dan 74	170.124.000	57.166.600	112.957.400	33,60%	100,00%
4	Perumusan Pedoman dan Penghitungan Alokasi Dana Desa Sumber Dana APBN	Tercapainya Refrensi Hukum terkait Pengelolaan Keuangan Desa	129.334.000	124.262.400	5.071.600	96,08%	100,00%
5	Penanganan Kasus pada Wilayah Pemerintahan Desa	Terfasilitasinya 30 permasalahan / kasus di desa	179.560.000	73.694.900	105.865.100	41,04%	100,00%
Jumlah Realisasi Anggaran			16.084.663.768	13.837.830.910	2.246.832.858	86,03%	100,00%

BAB IV**PENUTUP**

Sebagaimana yang telah diuraikan tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumenep Tahun 2017 adalah merupakan upaya pencapaian sistem akuntabilitas kinerja sebagai penyelenggara pemerintahan dan pembangunan dibidang pemberdayaan masyarakat dan desa dilingkungan Pemerintah Kabupaten Sumenep, yang secara umum telah dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsi yang dibebankan atau menjadi tanggungjawabnya sesuai dengan prinsip-prinsip penganggaran yakni efektif dan efisien.

Sumenep, Januari 2018

**KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT,
DAN DESA KABUPATEN SUMENEP**



H. AHMAD MASUNI, SE., MM
Pembina Utama Muda

NIP. 19631027 198903 1 006